RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2018 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013–2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tuban untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016–2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun
12. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2016–2021 dan perencanaan tahunan RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang (1) Latar belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar dokumen, (4) Sistematika Penulisan, (5) Maksud dan Tujuan;
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, (4) Aspek Daya Saing Daerah;
c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab ini berisi: Kinerja keuangan masa lalu, yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan perhitungan kerangka pendanaan;

d. Bab IV Analisis Isu-isu Strategis. Bab ini berisi: (1) Permasalahan Pembangunan, (2) Isu-Isu Strategis;
e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisi: (1) Visi, (2) Misi, (3) Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini berisi: (1) Strategi, (2) Arah Kebijakan;
g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Bab ini berisi: (1) Kebijakan Umum, (2) Program Pembangunan Daerah;
h. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini mengulas tentang program-program prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya rencana kerja yang semestinya ditetapkan disertai kebutuhan pendanaan;
i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini mengulas aspek indikator kinerja pembangunan daerah, kondisi kinerja pada awal periode, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode;
j. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini berisi: (1) Pedoman Transisi, (2) Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJMD berikut matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 6

(1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

(2) Bupati melalui OPD yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(3) OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra OPD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 63

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 427-24/2016

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Visi Kabupaten Tuban yaitu "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera" merupakan visi pada RPJMD Tahun 2016-2021, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2016 – 2021.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen perencanaan diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Melalui peraturan tersebut Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan daerah. Dokumen RPJMD ini disusun menurut sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sementara itu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW

kabupaten/kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Sedangkan pada pasal 76 disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Adapun pelantikan Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 di Kabupaten Tuban adalah tanggal 20 Juni 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki dan sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan lima tahun yang lalu, dan isu-isu strategis yang berkembang serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tuban, yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang.

Memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja, maka proses penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga diperoleh kesepakatan dan komitmen bersama, yang kemudian diproses di legislatif untuk mendapatkan legalitas menjadi Peraturan Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evalusi terhadap pelaksanaan RPJMD periode 2010-2015, dan disusun berdasarkan beberapa pendekatan :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agnda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas – Bawah (*top down*) dan Bawah – Atas (*bottom up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Gambar 1.1

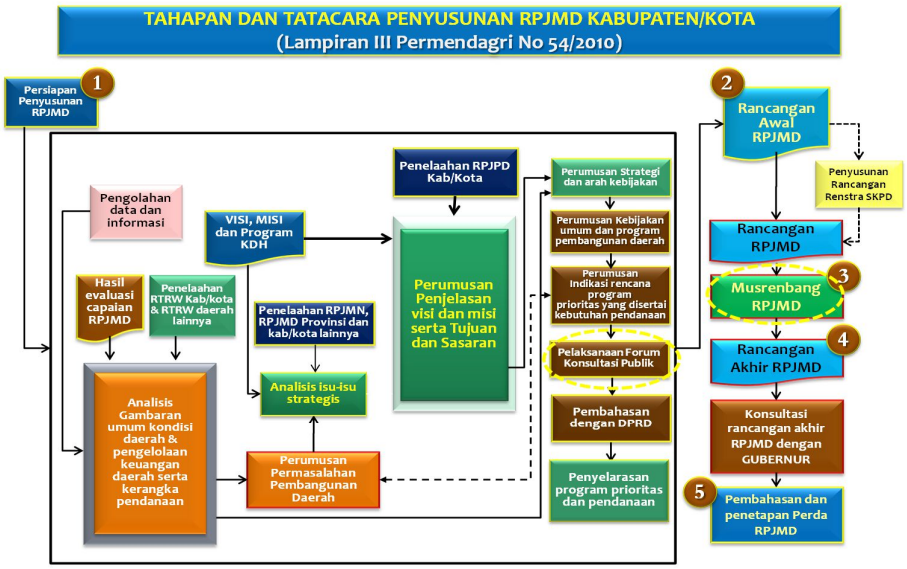

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis dan politis, yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Tuban merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selaras dengan nasional dan propinsi;
2. RPJMD Kabupaten Tuban merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
3. RPJMD Kabupaten Tubanmerupakan instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda serta instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
4. RPJMD Kabupaten Tuban merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada tahap berikutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berlaku untuk satu tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana-rencana kerja dan pendanaannya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten TubanTahun 2016-2021 berlandaskan:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
3. Landasan Operasional:
   a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
   f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
   g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
   h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
   j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
   k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
   l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
   m. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

v. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

w. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

y. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

z. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

aa. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

bb. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

cc. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

dd. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

hh. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

ii. Peraturan DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

jj. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032;

kk. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2016.

mm. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban, Rencana Strategi SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

   RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong***". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

   a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemadirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
   b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
   c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
   d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
   e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
   f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
   g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

   Untuk menunjukkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut : NAWA CITA. Adapun agenda Prioritas Nasional tersebut yaitu :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur

RPJM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 -2019 memiliki visi "***Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak***". Untuk mewujudkan visi tersebut di tempuh melalui lima misi yang diberi judul "***Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik*** ", yaitu :

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi;
c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfatan dan pengendalian ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah,

sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Timur bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Materi yang diatur dalam rencana tata ruang ini adalah terkait dengan pokok-pokok arahan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ini maka berbagai program pembangunan baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur harus dilakukan secara bersinergis dan saling menunjang sesuai dengan program dan prioritas pembangunan di daerah.

Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kabupaten Tuban adalah Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah. Struktur Pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di provinsi Jawa Timur.

Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah adalah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh Wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di pedesaan dan perkotaan.

Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan. Perwilayahan Jawa Timur di bagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu :

a. SWP Germakertosusila Plus
b. SWP Malang Raya
c. SWP Madiun dan Sekitarnya
d. SWP Kediri dan sekitarnya
e. SWP Probolinggo Lumajang
f. SWP Blitar
g. SWP Jember
h. SWP Banyuwangi
i. SWP Madura dan Kepulauan

Sedangkan Kabupaten Tuban masuk didalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Germakertosusila Plus dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan,

perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, parieisata, transportasi, dan industri. Kedudukan Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri Jawa Timur. Kawasan industri tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Jenu, Kerek, Tambakboyo dan Bancar. Untuk kawasan industri yang paling luas terdapat di Kecamatan Jenu. Di Kecamatan Kerek terdapat industri Semen Gersik, sedangkan industri kimia dasar berada di Kecamatan Jenu dimana industri ini sudah menjangkau skala regional. Selain itu juga terdapat industri minyak di Kecamatan Soko, Senori dan rengel.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban

   RPJPD Kabupaten Tuban berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban

   RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Tuban.

6. Rencana Strategi (Renstra) SKPD

   Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

7. Rencana Kerja (Renja) SKPD

   Renja SKPD, merupakan pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kabupaten Tuban

RKPD Kabupaten Tuban berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Selanjutnya dalam rangka mengetahui hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

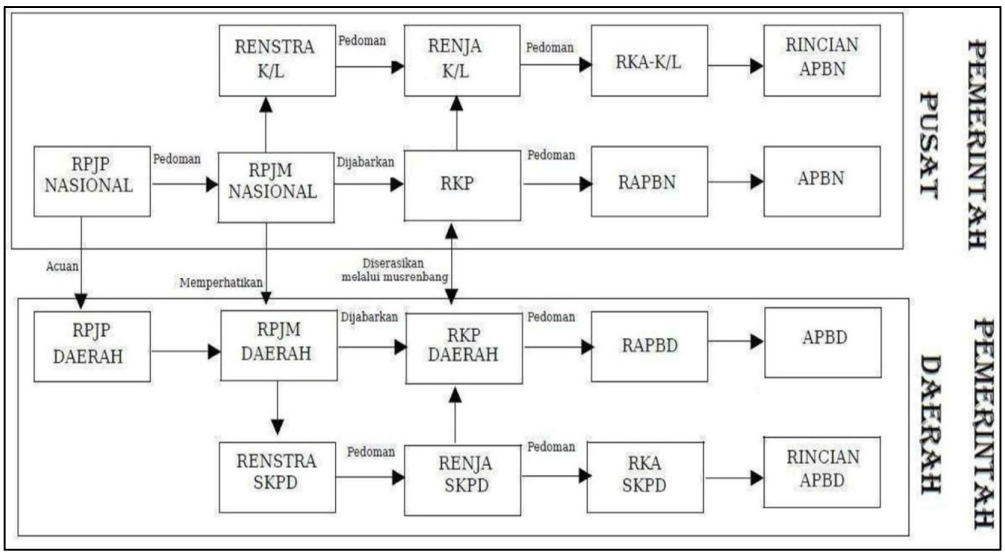

perencanaan Iainnya yakni disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Tahun 2014-2019 dan RPJMD kabupaten sekitar. RPJMD juga disusun dengan berpedoman pada RTRW KabupatenTubanserta memperhatikanRTRW Provinsi, RTRW Nasional dan RTRWKabupaten sekitar.

Selain itu secara khusus keterkaitan antara Misi dan Sasaran RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1
Keselarasan Misi RPJMD 2016-2021 dengan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tuban

Misi RPJMD 2016-2021	Keselarasan Dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Misi 1: Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalamberbagai aspek kehidupan dengan	✓		Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan Berketrampilan

Misi RPJMD 2016-2021	Keselarasan Dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama			
Misi 2: Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih	✓		Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Profesional
Misi 3: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah	✓		Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Tuban yang indah, bersih, tertib, aman, dan nyaman dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai Misi 5: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari sesuai dengan daya dukung lingkungan
Misi 4: Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif	✓		Misi 1: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	✓		Misi 1: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri

Tabel diatas menunjukkan adanya keselarasan antara misi RPJMD 2016-2021 dengan misi RPJPD 2005-2025. Sedangkan keselarasan Sasaran RPJMD dengan RPJPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Sasaran RPJPD 2005-2025 Yang Selaras Dengan RPJMD 2016-2021

No	Sasaran RPJPD 2005-2025
1	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya agrobisnis yang berbasis pada potensi lokal dan keunggulan kompetitif, yang termasuk didalamnya antara lain sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan
2	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya sektor industri dan UMKM yang berdaya saing serta berbasis potensi lokal
3	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing
4	Sasaran Pokok 4: Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Kedudukan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tuban dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam melalui gambar di bawah ini.

Gambar 1.3.
Kedudukan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tuban
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

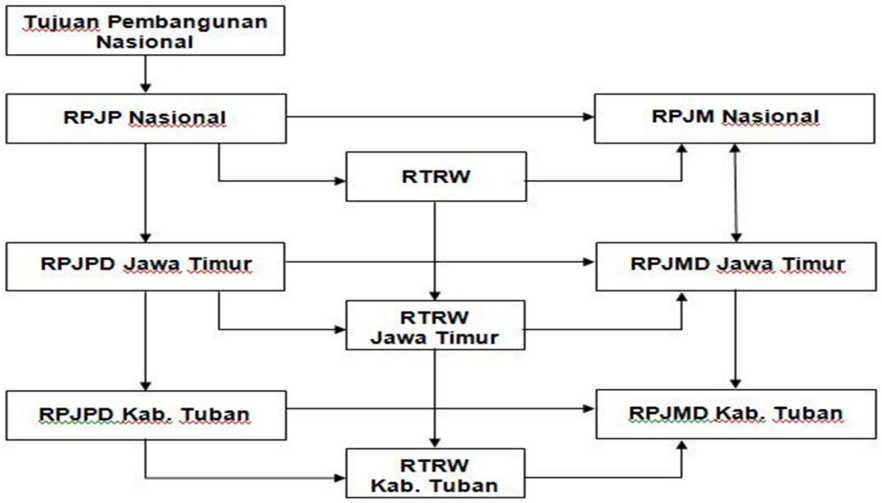

Sedangkan hubungan antara dokumen RTRW dengan RPJMD Kabupaten Tuban dapat dilihat melalui tabel di bawah ini tentang beberapa kebijakan yang berhubungan dengan RPJMD.

Tabel 1.3
Kebijakan dan Strategi Dokumen RTRW 2012-2032 Yang Selaras dengan Dokumen RPJMD 2016-2021

No	Dokumen RTRW 2012-2032
1	Kebijakan 1: Pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan, dan pertambangan
	Strategi 1.1: Mengembangkan kawasan industri terpadu, pertanian, perikanan, dan pertambangan dengan pengembangan potensi kawasan yang dimiliki
	Strategi 1.2: Meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri pertanian, perikanan, dan pertambangan
	Strategi 1.3: Memberikan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi dan peran kawasan perkotaan dalam skala yang lebih luas
	Strategi 1.4: Menetapkan sentra pengembangan agropolitan dan minapolitan pada kawasan potensial

No	Dokumen RTRW 2012-2032
2	Kebijakan 2: Penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal untuk pendukung perkembangan kawasan perkotaan Gerbangkertosusila (GKS) Plus
	Strategi 2.1: Meningkatkan peran wilayah pengembangan berdasarkan potensi dan fungsi wilayah
	Strategi 2.2: Mendorong pengembangan sistem perkotaan secara berjenjang dan bertahap melalui penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki
	Strategi 2.3: Mengembangkan wilayah melalui pembagian Wilayah Pengembangan (WP)
	Stretegi 2.4: Meningkatkan aksesbilitas antara perkotaan dan perdesaan
	Strategi 2.5: Memantapan keterkaitan antar simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai wilayah pendukung daerah sekitar pusat kota (*hinterland*)
	Stretegi 2.6: Mendorong pengembangan perkotaan utama dan wilayah pantura
3	Kebijakan 3: Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi
	Strategi 3.1: Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut yang terpadu dan terintegrasi untuk pengembangan wilayah
	Stretegi 3.2: Meningkatkan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi Jawa – Bali menunjang kebutuhan listrik di wilayah kabupaten
	Stretegi 3.3: Mengembangkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi dalam mendukung ketahanan energi nasional
	Stretegi 3.4: Meningkatkan efisiensi pelayanan jaringan telepon seluler melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama
	Stretegi 3.5: Mengembangkan jaringan sumber daya air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
	Stretegi 3.6: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri untuk wilayah perdesaan untuk mendukung pertanian
	Stretegi 3.7: Mengembangkan pengelolaan limbah industri untuk B3 dan non B3
	Strategi 3.8: Menyediakan jalur evakuasi bencana di kawasan – kawasan yang rawan bencana
4	Kebijakan 4: pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan
	Stretegi 4.1: Mengembalikan fungsi hutan lindung secara bertahap melalui reboisasi
	Stretegi 4.2: Melestarikan kawasan yang termasuk hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pengembangan hutan lindung dan hutan produksi secara ketat
	Stretegi 4.3: Mengendalikan secara ketat pengembangan kawasan fungsional di sempadan pantai yang meliputi kawasan pariwisata, pelabuhan, dan permukiman dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir

No	Dokumen RTRW 2012-2032
	Stretegi 4.4: Mengendalikan secara ketat kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai, sempadan waduk, sempadan irigasi, dan sempadan mata air mata air
	Stretegi 4.5: Mengelola Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air baku
	Stretegi 4.6: Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi RTH Perkotaan di wilayah kabupaten
	Stretegi 4.7: Mempertahankan fungsi ekologis kawasan cagar alam dan upaya konservasi
	Strategi 4.8: Meningkatkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
	Strategi 4.9: Menyediakan jalur dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana
	Stretegi 4.10: Meningkatkan konservasi tanah dan air untuk mengurangi pendangkalan di dasar sungai
	Stretegi 4.11: Mengembangkan dan mengelola kawasan lindung geologi sebagai kawasan pariwisata dan ilmu pengetahuan alam
	Stretegi 4.12: Mengendalikan secara ketat untuk kegiatan pertambangan di sekitar kawasan lindung geologi serta melestarikan dan memberi perlindungan terhadap air tanah
5	Kebijakan 5: Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan aspek konservasi sumber daya alam
	Stretegi 5.1: Melakukan penanaman dan penebangan secara terencana serta pengolahan hasil hutan
	Stretegi 5.2: Mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Stretegi 5.3: Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan pengolahan hasil dengan teknologi tepat guna
	Stretegi 5.4: Mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan
	Stretegi 5.5: Mengembangkan dan memberdayakan industri besar, menengah dan kecil mikro untuk pengolahan hasil sumber daya alam
	Stretegi 5.6: Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata dan penetapan jalur wisata khusus
	Stretegi 5.7: Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan
6	Kebijakan 6: Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
	Stretegi 6.1: Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
	Stretegi 6.2: Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun

No	Dokumen RTRW 2012-2032
	Stretegi 6.3: Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan keamanan

Berdasarkan penjelasan diatas maka RPJMD dilatarbelakangi beberapa dokumen pembangunan lainnya dalam rangka mensukseskan tujuan pembangunan lokal dan nasional. Oleh karena itu, RPJMD sebagai dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan nasional. Kepala Daerah terpilih tetap harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal dan horizontal. Di dalam proses perumusan RPJMD, sinkronisasi dan keberlanjutan antar dokumen menjadi sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menghasilkan pola perencanaan yang harmonis.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Tuban 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kinerja keuangan masa lalu, yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan perhitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Tuban

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakanberdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan tentang hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja utama daerah serta indikator kinerja utama organisasi perangkat daerah sebagai penunjang pencapaian indikator kinerja utama daerah.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan pembangunan daerah tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2016-2021, termasuk di dalamnya menentukan program-program prioritas dan indikator kinerja.

4. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai tujuan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yg ditetapkan dalam penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan membangun konsensus antar *stakeholders*.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program baik antar wilayah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat, daerah, kecamatan dan desa.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah
4. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Tuban berada di wilayah paling barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Letak astronomi Kabupaten Tuban berada pada koordinat 111^{o} 30' - 112^{o} 35' Bujur Timur dan 6^{o} 40' – 7 ^{o} 18' Lintang Selatan. Panjang wilayah pantai yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah sepanjang 65 km dari mulai dari Kecamatan Palang di ujung Timur sampai Kecamatan Bancar di ujung barat. Luas wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah 22.608 Km2. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan dengan jumlah 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan) serta terbagi lagi menjadi 1.733 RW (Rukun Warga) dan 6.469 RT (Rukun Tetangga) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

Gambar 2.1. berikut adalah peta administrasi Kabupaten Tuban.

Gambar 2.1
Luas dan Batas Administrasi

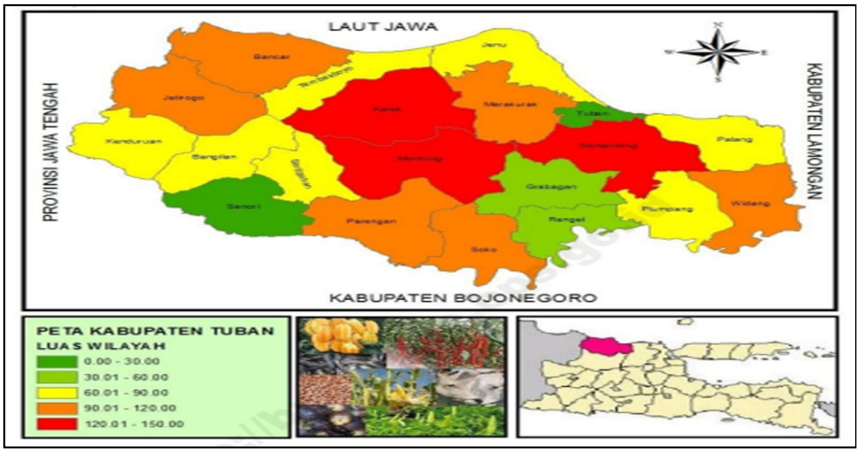

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban, 2016

2.1.2 Geologi dan Tanah

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah barat – timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang merupakan batuan endapan dan umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur. Ditinjau dari susunan litologi, Kabupaten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan sumberdaya alam yaitu berupa bahan tambang galian golongan C dan golongan A . Bahan galian golongan C diantaranya : pasir silica, clay, ball clay, phospat, dolomit dan trass. Sedangkan bahan galian tambang golongan A berupa Minyak Bumi. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian utara Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang memiliki ketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban adalah :

a. Alluvial: jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Kenduruan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Bangilan, Jatirogo, Kerek, Montong, Senori dan Singgahan, dan Grabagan.
b. Regosol: jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, Jatirogo dan Bancar. Sedangkan 5 kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah iniadalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Jenu, Merakurak, dan Tambakboyo.
c. Grumosol : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Tambakboyo, Jatirogo, dan

Bancar. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Kecamatan Montong, Grabagan, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, merakurak, dan Kerek.

d. Komplek Mediteran Litosol : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Rengel, Grabagan, Widang, Palang, kerek, dan Tambakboyo dengan luas 19.358,563 Ha.
e. Komplek Mediteran Litosol/Renzina : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang,Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

Kemampuan tanah disuatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : topografi, tingkat erosi, jenis batuan, kedalaman efektif tanah, muka air tanah, kekeringan, banjir dan iklim. Wilayah Kabupaten Tuban sebagian besar tanahnya tidak memiliki sifat tidak mudah erosi, dari luas 200.226,97 Ha, daerah yang terkena erosi adalah seluas 66.915,73 Ha. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 54.860.530 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 129.134,031 Ha. Lahan pertanian di Kabupaten Tuban didominasi oleh lahan kering (ladang/tegalan) dengan luas 57.485,44 Ha atau 30,22 %, sedangkan untuk luasan lahan sawah termasuk didalamnya sawah tambak adalah sebesar 18.731 Ha.

2.1.3 Hidrologi

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.881 Ha. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo dengan luas areal irigasi 5.430 Ha selanjutnya sungai kening dengan luas areal irigasi 2.522 Ha. Sedangkan luas terbesar untuk sempadannya terdapat pada sungai Kening dengan luas 1.200 Ha. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Widang hampir setiap tahun mengalami kebanjiran akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel.

2.1.4 Klimatologi

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun.Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 20 Kecamatan, sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan.

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan ekonomi

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomisebagai Kawasan Strategis Propinisi (KSP) berupa kawasan perbatasanantar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban – Lamongan –Bojonegoro dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Tengah – Jawa Timurmelalui kerjasama RATUBANGNEGORO.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomisebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi :

- Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emasTuban – Lamongan – Bojonegoro;
- Kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora – Tuban – Rembang – Bojonegoro (RATUBANGNEGORO) di Kecamatan Jatirogo;
- Kawasan pelabuhan meliputi : Kecamatan Bancar, KecamatanJenu, dan Kecamatan Palang;
- Kawasan industri meliputi Kecamatan Kerek,Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu; dan Kecamatan Merakurak;
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Tuban;
- Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Bancar dan Kecamatan Palang;
- Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Semanding, Kecamatan Palang, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo.

2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan stategis dari sudut kepentingan sosial budaya kabupaten sebagai KSK, meliputi makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban dan Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang. Keberadaan Kota Tuban sebagai Kota Wali dapat diarahkan sebagaikota tujuan religi Nasional. Keberadaan obyek-obyek wisata yangterkait dengan wisata religi seperti Makam Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Makam Ibrahim Asmorokondi. Kawasan strategis sosial budaya kabupaten Tuban meliputi wisata religi dan makam Sunan diKecamatan Tuban.Berikut arahan pengembangan kawasan strategis sosial budaya berupaoptimalisasi pengelolaan kawasan strategis sosial budaya, meliputi :

a. Pengendalian perkembangan kawasan sekitar obyek religi;
b. Pemanfaatan obyek wisata religi; makam sunan Bonang, Makam Ibrahim Asmorokondi;
c. Peningkatan Perkotaan Tuban sebagai kota wali;
d. Peningkatan pembinaan seni dan budaya;
e. Peningkatan peran dinas pariwisata;
f. Pengembangan penataan kawasan wisata baru;
g. Penyebaran informasi dan potensi pariwisata;
h. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembanganpariwisata; dan
i. Pengembangan pariwisata seni dan budaya.

3) Potensi Pertanian

Potensi Pertanian Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Tuban terdiri dari sawah, ladang/tegalan dan sawah tambak. Lahan pertanian di dominasi oleh pertanian lahan kering (ladang/tegalan) dengan luas 57.485,44 Ha atau (30,22%), luas daerah irigasi sebesar 20.855 Ha. Komposisi tersebut hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sistem irigasi di beberapa tempat khususnya di sepanjang DAS Bengawan Solo dan beberapa sistem irigasi yang non teknis. Pada wilayah bagian Tengah Kabupaten Tuban, merupakan lahan hutan jati dan pertanian lahan kering yang sangat tergantung air hujan/tadah hujan misalnya pada Kecamatan Jatirogo, Singgahan, Semanding, Merakurak, Jenu. Pada bagian Selatan meliputi Kecamatan Bangilan, Singgahan,Senori, Soko, Rengel, Plumpang dan Widang juga merupakan pertanian potensial tetapi dengan ancaman genangan dan luapan air Bengawan Solo serta Kali Kening. Sedang pola yang terjadi pada kawasan pertanian di wilayah kabupaten adalah menyebar di seluruh wilayah selain itu juga sebagai pembatas antara kawasan permukiman dengan kawasan hutan sedangkan kawasan tegalan tersebar pada setiap kecamatan. Pada kawasan tersebut Jenis

komoditinya adalah tanaman perkebunan yaitu : tanaman Kelapa, Jambu Mente, Kapuk randu, Siwalan, Tebu, Tembakau, Kapas, Serat karung dan Kemiri. Tanaman perkebunan masih bercampur pada lahan pertanian yang lainnya.

4) Potensi Industri

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri Jawa Timur. Kawasan Industri tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Jenu, Kerek, Tambakboyo dan Bancar. Untuk kawasan industri yang paling luas terdapat di Kecamatan Jenu. Di Kecamatan Kerek terdapat industri Semen Gresik, sedangkan industri kimia dasar berada di Kecamatan Jenu. dimana industri ini sudah menjangkau skala regional. Selain itu juga terdapat industri minyak di Kecamatan Soko, Senori dan Rengel.

5) Potensi Pariwisata

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:
   a. Pantai Boom di Kecamatan Tuban
   b. Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
   c. Goa Akbar di Kecamatan Tuban
   d. Goa Suci di Kecamatan Palang
   e. Goa Ngerong di Kecamatan Rengel
   f. Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
   g. Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
   h. Air Terjun Nglirip
   i. Sendang Maibit
2. Obyek wisata Budaya terdiri dari:
   a. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
   b. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
   c. Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
   d. Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
   e. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
3. Obyek wisata buatan terdiri dari:
   a. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
   b. Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar
   c. Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.

6) Potensi Pertambangan

Di wilayah Kabupaten Tuban terdapat 3 jenis pertambangan yaitu jenis mineral batuan non logam, mineral batuan non logam jenis tertentu dan batuan serta pertambangan minyak. Pertambangan tersebut tersebar pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Rengel, Kerek, Plumpang, Grabagan, Bancar, Tambakboyo, Singgahan, Palang, Parengan, Soko dan Merakurak. Sedangkan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Soko Rengel, Singgahan, Bangilan dan Senori.

7) Potensi Hutan Hutan produksi

di Kabupaten Tuban terdiri dari 3 KPH yaitu : KPH Tuban, KPH Parengan dan KPH Jatirogo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan 1 KPH yaitu KPH Kebonharjo masuk di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan kawasan hutan rakyat seluas ± 19.412,4Ha tersebar di seluruh Kabupaten Tuban.

8) Potensi Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Tuban terdiri atas : kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan peruntukan pengolahan ikan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan diarahkan pada Kecamatan Bancar, Tambakboyo dan Palang.

2.1.6 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban akhir tahun 2013 adalah 1.288.975 jiwa, terdiri dari 645.971 penduduk laki-laki dan 643.004 penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 100,46 artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki. Penduduk meningkat menjadi 1.291.665 jiwa pada tahun 2014 yang terdiri dari 646.513 penduduk laki-laki dan 645.152 penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 100,21.

Tabel 2.1
Perkembangan Penduduk Kab Tuban Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2011	630.576	628.240	1.258.816
2.	2012	645.264	645.130	1.290.394
3.	2013	645.971	643.004	1.288.975
4.	2014	646.513	645.152	1.291.665
5.	2015	653.413	650.667	1.304.080

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2014 adalah 709 jiwa/km^{2}Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi adalah Tuban (4.419jiwa/km^2) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Kenduruan (361 jiwa/km^2). Sehingga terjadi ketidakmerataan penyebaran penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Tuban yang disebabkan terjadinya pemusatan penduduk di perkotaan yaitu Kecamatan Tuban.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kenduran	15.647	15.310	30.957
2	Bangilan	27.211	26.914	54.125
3	Senori	23.583	23.399	46.982
4	Singgahan	22.923	22.719	45.642
5	Montong	29.957	28.624	58.581
6	Parengan	30.700	30.570	61.270
7	Soko	46.080	45.341	91.421
8	Rangel	32.485	32.166	64.651
9	Grabagan	21.129	20.949	42.078
10	Plumpang	43.789	43.354	87.143
11	Widang	28.541	28.208	56.749
12	Palang	46.952	46.676	93.628
13	Semanding	59.145	60.150	119.295
14	Tuban	46.300	47.791	94.091
15	Jenu	28.851	28.631	57.482
16	Merakurak	30.691	30.708	61.399
17	Kerek	35.900	36.235	72.135
18	Tambakboyo	22.509	22.179	44.688
19	Jatirogo	30.617	30.231	60.848
20	Bancar	30.403	30.512	60.915
Jumlah		653.413	650.667	1.304.080

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten dideteksi dari beberapa indikator, diantaranya pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban selama 4 tahun terakhir (2011-2014) menunjukkan kinerja yang relatif stabil (sekitar 6,3%). Dibandingkan dengan propinsi

Jawa Timur kinerja pertumbuhan kabupaten Tuban relatif tertinggal, meskipun dengan angka yang kecil. Namun demikian jika dibandingkan dengan rata rata Indonesia kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban masih lebih baik yaitu 4,89%.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional berdasarkan Harga Konstan 2010 (%), 2010 – 2015

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Propinsi Jawa Timur	Indonesia
1.	2015	4,89	5,44	4,79
2.	2014	5,47	5,86	5.02
3.	2013	5.85	6,08	5,56
4.	2012	6.29	6,64	6,03
5.	2011	6.84	6,44	6,17

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2015

2.2.1.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian

Tabel 2.4
Pertumbuhan Sektoral Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha /*Industry*	2010	2011	2012	2013*	2014**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan /*Agriculture, Forestry and Fishing*	19.08	19.22	20.29	20.60	20.95
B	Pertambangan dan Penggalian /*Mining*	8.74	9.31	8.77	8.75	9.44
C	Industri Pengolahan /*Manufacturing*	30.53	29.78	29.19	29.01	28.39
D	Pengadaan Listrik dan Gas /*Electricity*	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang /*Water supply,*	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
F	Konstruksi /*Construction*	13.96	14.01	14.22	14.04	13.92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.51	12.57	12.35	12.68	12.48
H	Transportasi dan Pergudangan	0.49	0.48	0.48	0.51	0.56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum /*Accommodation and Food*	0.76	0.76	0.76	0.78	0.82
J	Informasi dan Komunikasi /*Information*	4.85	4.84	4.84	4.48	4.32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /*Financial*	1.66	1.71	1.81	1.94	1.98
L	Real Estat /*Real Estate Activities*	1.23	1.27	1.27	1.32	1.31
M,N	Jasa Perusahaan /*Business Activities*	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib /*Public*	2.73	2.58	2.59	2.45	2.27
P	Jasa Pendidikan /*Education*	1.45	1.48	1.52	1.56	1.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial /*Human Health and Social Work*	0.41	0.43	0.43	0.44	0.47
R,S,T,U	Jasa lainnya /*Other Services Activities*	1.22	1.19	1.12	1.10	1.14
	Produk Domestik Regional Bruto /*Gross Regional Domestic Product*	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka semen... /*Summary Figures*

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2015

Secara umum pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Tuban didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yaitu lapangan usaha kategori Industri Pengolahan dengan nilai PDRB sebesar 12.490.707,20 juta rupiah, lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai PDRB sebesar 9.217.795,79 juta rupiah dan

lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 6.126.893,08 juta rupiah. Sedikit mengalami pergeseran bila dibandingkan dengan penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 dimana sektor dominan yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pergeseran struktur ekonomi ini dikarenakan adanya perubahan dalam penghitungan yaitu menggunakan tahun dasar 2010.

Struktur lapangan usaha di Kabupaten Tuban telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 28,39 persen, kemudian lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan sebesar 20,95 persen, lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 13,92 persen, lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 12,48 persen; dan lapangan usaha kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,44 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita

Selama periode 2010-2014 Pendapatan per kapita kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.Tahun 2010 Pendapatan per kapita ADHB di kabupaten Tuban adalah Rp.16.987.019,56 rupiah meningkat pada tahun berikutnya sebesar 11,72 persen menjadi Rp. 18.961.183,79; Sedangkan pada tahun 2012 Pendapatan perkapita ADHB mencapai 21.226.168,78; pada tahun 2013 mencapai Rp.24.192.079,14 dan akhirnya pada tahun 2014 mencapai Rp. 27.428.086,33.Pada tahun 2014 merupakan kenaikan pendapatan per kapita yang tertinggi selama periode 2010-2014, yaitu sebesar 14,67 persen. Hal ini mencerminkan perekonomian yang stabil. Akan tetapi peningkatan pendapatan per kapita ADHB masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli sebagai cermin kesejahteraan masyarakat di kabupaten Tuban secara makro. Hal ini disebabkan pada pendapatan perkapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan nominal daya beli masyarakat. Selain itu juga diperlukan indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan untuk meningkatkan keakuratan dalam evaluasi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia, 2010-2015

Tahun	PDRB Per capita (Rp 000)		
	Kabupaten Tuban	Propinsi Jawa Timur	Indonesia
2010	16.987,02	26.371,10	28.778,17
2011	18.961,18	27.864,26	30.112,37
2012	21.226,17	29.508,40	31.519,93
2013	24.192,08	31.093,39	32.874,76
2014	27.428,09	32.703,80	34.127,72
2015	41.810,67	43.500,30	45.176,20

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2015; BPS, Jawa Timur dalam Angka, 2015

Apabila dibandingkan dengan capaian propinsi Jawa Timur dan Indonesia, pendapatan per kapita Kabupaten Tuban memang cukup rendah. Meskipun demikian tiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai hal positif untuk menciptakan optimisme. Ketika Kabupaten Tuban mampu tumbuh lebih cepat, maka dapat dipastikan bahwa kinerja Kabupaten Tuban akan dapat menyamai kinerja Jawa Timur juga Nasional.

2.2.1.4 Inflasi

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2014

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Indonesia
1.	2010	5.58	7.00	6.69
2.	2011	4.84	4.09	3.79
3.	2012	5.87	4.50	4.30
4.	2013	7.14	7.59	8.38
5.	2014	7.03	7.77	8.36

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Secara umum, tingkat inflasi di Tuban rata-rata lebih rendah dibandingkan angka nasional. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2010-2014, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman. Pada periode tersebut, tingkat inflasi di Kabupaten Tuban berada di dalam koridor target yang ditetapkan dalam RPJMD yang mencapai sebesar 5-7 persen per tahun. Patut juga untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang dicapai Kabupaten Tuban juga berada dibawah level inflasi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh normalnya jumlah permintaan, produksi dan penyediaan bahan pokok yang sangat memadai, harga-harga komoditas dunia yang sedang dalam tren penurunan dan jugabelum adanya imported inflasi akibat penurunan rupiah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Tabel 2.7
Indeks Gini Kab. Tuban Tahun 2010-2014

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Indonesia
1.	2010	0,25	0,34	0,38
2.	2011	0,28	0,37	0,41
3.	2012	0,27	0,36	0,41
4.	2013	0,30	0,36	0,41
5.	2014	0,24	0,40	0.41
6.	2015	0,29	0,42	0,41

Sumber : Bappeda Tuban, 2015

Koefisien Gini yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidak merataan meningkat atau menurun.Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Dari table di atas dapat dilihat penurunan indeks gini dari tahun ke tahun. semakin kecil indeks Gini tersebut menunjukkan semakin rendah derajat ketimpangan istribusi pendapatan daerah yang ada di Kebaupaten Tuban. Sehingga tingkat pemerataan pendapatan yang ada di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.8
Angka Kemiskinan

Tahun	Tuban			Jawa Timur			Indonesia		
	P	P1	P2	P	P1	P2	P	P1	P2
2011	18,78	2,26	0,40	14,23	2,27	0,54	12,50	2,08	0.55
2012	17,84	2,55	0,56	13,08	1,93	0,44	11,70	1,90	0,49
2013	17,23	2,83	0,71	12,73	2,07	0,5	11,50	1,89	0,48
2014	16,64	2,53	0,64	12,28	1,85	0,44	11,25	1,75	0,44
2015	17,08	2,96	0,79	12,34	2,06	0,52	11,22	1,97	0,54

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2015

Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan

menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Sedangkan kemiskinan (P) adalah tingkat kemiskinan secara umum.

Jika dilihat dari tabel di atas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban lebih tinggi daripada Jawa Timur maupun Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tuban lebih parah. Sehingga kehidupan ekonomi penduduk miskin di Kabupaten Tuban semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Jawa Timur atau Indonesia. Namun demikian jika dilihat secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi suatu indikasi positif terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga masih diperlukan program penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif untuk mengurangi kemiskinan yang ada.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Sesuai panduan Permendagri nomor 54 tahun 2010, kondisi aspek kesejahteraan sosial di deteksi dari angka melek huruf dan rata rata lama sekolah.Komponen penentu IPM berikutnya adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dimana kedua ukuran ini akan menghasilkan indeks pendidikan. Angka melek huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Pengertian Angka Melek Huruf (AMH) adalah tidak berbeda dengan angka buta huruf yang telah dikenal masyarakat, dalam arti kebalikannya. Angka melek huruf di Kabupaten Tuban tahun 2014 sebesar 99.02 % lebih tinggi daripada angka melek huruf di Jawa Timur yang mencapai 91.36 %. Hal ini berarti hanya 0.92% penduduk yang buta huruf. Selain itu, tiap tahunnya tren angka melek huruf juga terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 mencapai 96,90%. Kondisi seperti ini merupakan pencapaian yang cukup baik, sehingga ke depannya Kabupaten Tuban bisa menjadi kabupaten yang bebas dari buta huruf.

Tabel 2.9
Angka Melek Huruf dan Rata Rata Lama Sekolah Kab. Tuban, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2010-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf					
• Tuban	97,36	97,95	98,09	99,02	96,90
• Jawa Timur	88,71	89,11	90,60	91,36	92,30
• Nasional	92,80	93,10	94,10		
Angka rata-rata lama sekolah					
• Tuban	6,49	6,53	6,82	6,81	6,83
• Jawa Timur	7,34	7,45	7,53	7,61	7,71
• Nasional	7,10	7,20	7,50	8,02	7,84

Sumber : Dinas Pendidikan 2015; BPS Provinsi Jawa Timur 2014; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tahun 2015

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Years Of Schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir. Dari tabel diatas, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2014 adalah 6,81 tahun yang berarti penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Tuban rata-rata bersekolah hingga tingkat SLTP kelas 1 semester 1 (6 tahun 8 bulan atau baru masuk ke kelas 1 SLTP).

Untuk Jawa Timur rata-rata lama sekolahnya adalah 7,61 tahun, artinya apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur kondisi Kabupaten Tuban masih dibawah rata-rata dan apabila dibandingkan dengan nasional, maka Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Bila dibandingkan dengan daerah sekitar, yaitu Bojonegoro dan Lamongan, Kabupaten Tuban termasuk paling rendah. Sehingga perlu adanya kebijakan peningkatan rata-rata lama sekolah, yang nantinya akan memberi pengaruh ideks pembangunan manusia di Kabupaten Tuban.

Tabel 2.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya
Tahun 2010-2015

Kabupaten	IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bojonegoro	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17
Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52
Lamongan	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau

indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Tuban masih berada pada kisaran 64,58 yang berarti masuk kategori sedang dengan tren positif dari tahun ke tahun.

Bila dibandingkan dengan IPM Jawa Timur, IPM Kabupaten Tuban masih lebih rendah (IPM Jawa Timur adalah 73,98). Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Tuban masih lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM di Provinsi Jawa Timur secara umum. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih konkrit dan berkesinambungan yang dilakukan secara bersinergi dari semua elemen, terutama pemerintah daerah, dalam rangka mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Tuban ini, agar tidak tertinggal dengan daerah lain. Keberhasilan pembangunan manusia pada suatu tahun adalah hasil akumulasi dari intervensi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tuban ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tuban sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya, meningkatnya jumlah grup kesenian serta industri alat musik tradisional seperti gitar dan rabana. Industri alat musik ini berada di Kecamatan Rengel, Palang, dan Jatirogo. Selain itu juga adanya kerajinan sangkar burung banyak dikembangkan di Kecamatan Widang, Plumpang dan Kecamatan Soko. Mulai dari sangkar burung perkutut, sangkar burung kicauan dengan berbagai ukuran. Bahan baku dari bambu dan kayu jati.Selain itu juga Kabupaten Tuban mempuntai motif batik yang khas. Motif–motif batik di Kabupaten Tuban dari sejumlah sentra kerajinan batik dan tenun khas Tuban dengan jumlah unit usaha mencapai 671 unit yang terdapat di beberapa wilayah pedesaan. Beberapa batik khas Tuban yaitu:

a. Batik Gedog, terdapat di desa : Margorejo dan Gaji (Kecamatan Kerek).
b. Batik Tulis, terdapat di desa : Karang, Prunggahan Kulon, Semanding (Kecamatan Semanding), Gesikharjo (Kecamatan Palang), dan Karanglo (Kecamatan Kerek).

c. Tenun Gedog, terdapat di desa : Gaji, Margorejo, Kedungrejo (Kecamatan Kerek).

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilakukan melalui berbagai pembinaan generasi muda dan olahraga. Pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka(Paskibraka), Pramuka, dan penyelenggaraan upacara bendera.Pembinaan olahraga dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Dalam publikasi ini, kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik dibawah Depertemen Pendidikan dan di luar Departemen tersebut, yaitu dibawah Departemen Agama. Kegiatan Pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid dan Guru di rinci menurut jenjang yaitu SD, SMP, SMA dan sekolah kejuruan. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12 yang memperoleh pendidikan di SD/MI atau menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/SMK, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18 yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK.Kinerja capaian kinerja bidang pendidikan diidntifikasi dari capian APK, APM dan APS, ditambah dengan kinerja pendukung seperti fasilitas sekolah maupun jumlah tenaga pengajar. Kinerja APK dan APM kabupaten Tuban dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah terbesar berada pada usia 7-12 tahun atau setara dengan jenjang SD/MI/Sederajat. Dan semakin besar usianya angka paartisipasi sekolah justru terus mengalami penurunan. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tren dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini tentunya menunjukkan perkembangan pendidikan yang terus mengalami peningkatan.

Angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK serta Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI atau SMP/MTs, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI dibanding penduduk usia 7-12 tahun atau menunjukkan siswa SMP/MTs dibanding jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun dan siswa SMA/MA/SMK dibanding jumlah penduduk dengan usia 16-18 tahun.

Dari tabel dibawah dapat dilihat jika APK dan APM pada tingkat SMA/MA/SMK masih rendah. Dengan demikian kecenderungan untuk tidak meneruskan sekolah hingga ke tingkat berikutnya tergolong tinggi. Tingkat pendidikan yang cenderung rendah memunculkan kualitas sumberdaya manusia pencari kerja yang rendah, sehingga level pekerjaan yang akan ditekuni adalah pekerjaan dengan ketrampilan bukan keahlian. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memberikan perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung dan sarana pendukung sekolah padatingkat SMP dan SMU/SMK. Hal tersebut sebaiknya juga diikuti dengan upaya untuk lebih menumbuhkan animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya dengan pemberian beasiswa atau memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi lulusan SMU/SMK.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Kab. Tuban Tahun 2010- 2014

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
Angka Partisipasi Sekolah				
1). 7 - 12 Tahun	96,26	95,31	106,43	107,43
2). 13 - 15 Tahun	83,78	82,95	88,49	89,98
3). 16 - 18 Tahun	45,21	52,26	53,87	56,94
Angka Partisipasi Sekolah Usia Di Bawah 7 Tahun				
1). Jenjang Prasekolah	79,81	73,9	93,55	95,31
2). Jenjang SD/MI/Sederajat	63,57	61,40	97,13	83,03
Angka Partisipasi Kasar				
1). Jenjang SD/MI/Sederajat	101,28	9,691	108,31	109,82
2). Jenjang SMP/MTs/Sederajat	84,78	88,24	90,56	94,56
Angka Partisipasi Murni				
1). Jenjang SD/MI/Paket A	98,5	86,39	96,91	97,32
2). Jenjang SMP/MTs/Paket B	66,08	65,34	69,21	70,21
3). Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	41,08	4,907	49,17	49,55

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban 2015

Tabel 2.13
Jumlah Siswa TK hingga Perguruan Tinggi di Kabupaten Tuban 2010-2014

Jumlah Siswa / Mahasiswa	2011	2012	2013	2014
1). Taman Kanak-Kanak (TK)	22,6	31,224	30,944	24,452
1. Negeri	48	48	30	65
2. Swasta	22,552	31,176	30,914	24,387
2). Sekolah Luar Biasa (SLB)	172	143	157	206
1. Negeri	79	86	98	108
2. Swasta	93	57	59	98
3). Sekolah Dasar (SD)	83,024	80,713	78,33	75,776
1. Negeri	80,597	78,031	75,635	72,9
2. Swasta	2,427	2,682	2,695	2,876
4). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	29,837	30,851	31,734	32,201
1. Negeri	26,12	26,787	27,179	27,475
2. Swasta	3,717	4,064	4,555	4,726
5). Sekolah Menengah Atas (SMA)	11,06	10,831	10,823	11,027
1. Negeri	9,464	9,381	9,468	9,765
2. Swasta	1,596	1,45	1,355	1,262
6). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	12,105	12,788	14,386	13,736
1. Negeri	7,057	7,407	8,523	7,491
2. Swasta	5,048	5,381	5,863	6,245
7). Perguruan Tinggi (PT)			20,07	23,081
1. Negeri				
2. Swasta			20,07	23,081

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban 2015

Jika dilihat dari tabel diatas, maka jumlah siswa dari SD/MI/Sederajat ke jenjang yang lebih tinggi terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Tuban saat ini berada di jenjang SD/MI/Sederajat dan jumlahnya semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sehingga semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sedikit peminatnya dikarenakan banyaknya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan.

Tabel 2.14
Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Tuban Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Guru dan Dosen	2011	2012	2013	2014
1). Taman Kanak-Kanak (TK)	1,162	2,352	2,569	2,664
1. Negeri	5	6	7	8
2. Swasta	1,157	2,346	2,562	2,656
2). Sekolah Luar Biasa (SLB)	46	46	58	48
1. Negeri	29	29	30	31
2. Swasta	17	17	28	17
3). Sekolah Dasar (SD)	6,089	6,552	6,386	6,189
1. Negeri	5,9	6,34	6,152	5,95
2. Swasta	189	212	234	239
4). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	1,952	2,158	2,194	2,221
1. Negeri	1,538	1,644	1,639	1,603

Jumlah Guru dan Dosen	2011	2012	2013	2014
2. Swasta	414	514	555	618
5). Sekolah Menengah Atas (SMA)	940	961	961	966
1. Negeri	654	673	685	694
2. Swasta	286	288	276	272
6). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	945	1,068	1,147	1,129
1. Negeri	559	639	720	545
2. Swasta	386	429	427	584
7). Perguruan Tinggi (PT)			310	326
1. Negeri				
2. Swasta			310	326
8). Lembaga Pendidikan Ketrampilan	351	145	133	

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban 2015

Jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Tuban saat ini sudah cukup memadahi di setiap jenjang pendidikan. Dan tenaga pendidik terbanyak berada pada jenjang SD/MI/Sederajat. Hal ini tentunya seimbang dengan banyaknya siswa pada jenjang pendidikan ini. Selain itu pendidikan negeri SD hingga SMA/SMK mempunyai tenaga pendidik jauh lebih banyak dibandingkan dengan swasta, hal ini dikarenakan banyaknya siswa di pendidikan negeri dibanding dengan swasta.

2.3.1.2 Kesehatan

Indikator capian kinerja kesehatan yang paling lengkap diwakili oleh angka harapan hidup. Tahun 2012 angka harapan hidup Kabupaten Tuban sebesar 70,15 tahun. Dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu 69.87,capian Tuban ini lebih tinggi. Dan tren umur harapan hidup jikadilihat dari tabel di bawah inisecara internal terlihat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.15
Umur Harapan Hidup (UHH) Kab. Tuban
dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2014

No	Tahun	UHH Tuban
1	2011	70,07
2	2012	70,15
3	2013	70,22
4	2014	70,25
5	2015	70,55

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2015

Penambahan usia harapan hidup menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup akan sebanding dengan peningkatan status sosio-ekonomi keluarga. Sedangkan kualitas lingkungan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan fisik yang lebih baik.

Terdapat beberapa indikator kesehatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Diantaranya adalah angka kematian bayi. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka jumlah kematian bayi yang lahirsemestinya semakin turun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tuban selama lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada tahun 2010 AKB Kabupaten Tuban sekitar 36,96 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini semakin turun hingga pada tahun 2014 AKB menjadi 31,59 atau dengan kata lain dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 32 bayi yang meninggal. Dengan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat diharapkan AKB ini bisa ditekan lagi hingga seminimal mungkin.Faktor utama kematian bayi tersebut adalah faktor ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang buruk menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi ibu saat hamil. Akibatnya, tidak sedikit kelahiran bayi yang mengalami kematian sebab kurangnya asupan gizi. Angka kematian bayi bisa ditekan apabila angka kemiskinan juga bisa dikurangi. Target penurunan yang musti dicapai kisaran 10 - 15 persen. Jika target tersebut tercapai, kematian bayi dan bayi gizi buruk bisa ditekan.

Tabel 2.16
AKI dan Balita Gizi Buruk Tahun 2011-2015

Tahun	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Balita Gizi Buruk (%)
2011	96,87	0,23
2012	140,53	0,38
2013	71,3	0,40
2014	58.84	0,45
2015	72,97	0,42

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, 2015

Angka kematian ibu hamil saat melahirkan di Kabupaten Tuban masih terbilang cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2015 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban mencatat ada 72 kejadian saat ibu hamil melahirkan mengalami kematian. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kematian ibu hamil saat melahirkan. Antara lain pernikahan usia muda, hal ini bisa berbahaya lantaran kandungan sang ibu belum siap atau masih labil. Selain itu, masih kurangnya pemahaman orang tua terutama ibu dalam perawatan kandungan. Untuk meminimalisir angka kematian ibu ini salah satu caranya adalah pembentukan Forum Masyarakat Madani (FMM) di 20 kecamatan. FMM adalah forum yang diinisiasi oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang peduli mengenai kasus ini. Sudah ada 20 OMS dan organisasi lintas profesi dengan berbagai latar belakang. Harapannya, dengan pembentukan ini bisa meneruskan isu-isu mengenai AKI kepada masyarakat, serta bagaimana usaha penanganan untuk meminimalisir kasus ini.

Tabel 2.17
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tuban Tahun 2010-2015

Fasilitas Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2014
1. Posyandu	1,417	1,421	1,427	1,427	1,427
1). Posyandu Terdaftar		1427	1,427	1,427	1,427
2). Posyandu Tidak Aktif		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2. PosKesDes	279	288	288	328	328
3. Puskesmas	146	146	159	141	141
1). Induk	33	33	33	33	33
2). Pembantu	54	54	54	54	54
3). Keliling	59	59	60	54	54
4). Poliklinik		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4. Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
1). Tipe A	-	-	-	-	-
2). Tipe B	1	1	1	1	1
3). Tipe C	-	-	-	-	-
4). Tipe D	-	-	-	-	-
5. Rumah Sakit Umum Swasta	3	3	2	2	2

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2015

Sedangkan untuk balita gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya kemiskinan sehingga asupan gizi balita tersebut tidak mencukupi sehingga diperlukan upaya penanganan dari pemerintah untuk meminimalisir persentase gizi buruk pada balita, diantaranya penggalakkan posyandu dan sosialisasi parenting untuk para orang tua.

Tabel 2.18
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1	Kenduran	1	2	1
2	Bangilan	1	3	2
3	Senori	1	3	1
4	Singgahan	1	2	2
5	Montong	2	2	3
6	Parengan	2	3	2
7	Soko	2	3	3
8	Rangel	2	4	5
9	Grabagan	1	1	1
10	Plumpang	2	3	4
11	Widang	2	3	3
12	Palang	2	4	2
13	Semanding	2	3	4
14	Tuban	2	2	3
15	Jenu	1	2	1
16	Merakurak	2	3	2
17	Kerek	2	2	3
18	Tambakboyo	1	3	1
19	Jatirogo	2	3	3
20	Bancar	2	3	3
Jumlah		33	54	49

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2015

Kinerja kesehatan berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia juga sikap dan perilaku masyarakat. Tabel di atas menyajikan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Tuban. Dari data yang tersedia, seluruh kecamatan telah memiliki puskesmas. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban tergolong cukup memadai baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Fasilitas tersebut antara lain satu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dua rumah sakit yang dimiliki oleh swasta. Keberadaan rumah sakit umum adalah di Kecamatan Tuban. Adapun puskesmas dan puskesmas pembantu telah ada di tiap kecamatan. Disisi lain, bahwa terkait dengan pelayanan kesehatan masih dijumpai keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1 Sarana dan Prasarana Umum

Infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Hal ini dikarena fungsi strategis keberadaan jalan sebagai alat penghubung antar daerah dan juga mempercepat pertumbuhan di bidang lainnya terutama sarana transportasi. Manfaat langsung dari pembangunan jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan Daerah satu kedaerah lainnya. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Tuban.

Kondisi jalan di Kabupaten Tuban sebagian bear sudah diaspal, hal ini mengingat lokasinya yang berada di jalan pantura lintas utara. Kondisi Jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan. Panjang jalan negara dengan kondisi baik pada tahun 2013 mencapai 48.671 km dan meningkat menjadi 90.851 km. Begitu juga kondisi jalan Kabupaten pada tahun 2013 mencapai 600.210 km dan meningkat menjadi 647.280 pada tahun 2014. Namun meskipun demikian, jalan dengan kondisi rusak pun masih cukup tinggi terutama jalan propinsi yang mencapai 36.000 km pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 36.640 km pada tahun 2014. Begitu pula pada jalan Kabupaten yang mencapai 46.900 km pada tahun 2013.Sejumlah faktor menjadi penyebab kerusakan jalan diantaranya lamanya usia bangunan,faktor alam atau bencana, bahkan faktor pengguna jalan melebihi kapasitas.Musim hujan kerusakan jalan lebih banyak, karena disebabkan banjir maupun tanah longsor. Untuk mengurangi dampak buruk akibat kendaraan melebihi tonase melintas, perlu dipasang rambu larangan. Selain itu juga perlu diperbanyak portal atau batas jalan agar kendaraan tonase besar tidak melintas.

Tabel 2.19
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Kab. Tuban Tahun 2013-2014

Keadaan *Condition*	Jalan Negara *State Road* (Km)		Jalan Propinsi *Province Road* (Km)		Jalan Kabupaten *Regency Road* (Km)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Jenis Permukaan						
a Diaspal	94.051	93.271	81.760	81.760	726.120	726.120
b. Kerikil	-	-	-	-	-	-
c. Tanah	-	-	-	-	-	-
d. Tdk Dirinci	-	0.780	-	-	-	-
Jumlah/*Total*	**94.051**	**94.051**	**81.760**	**81.760**	**726.120**	**726.120**
II. Kondisi Jln						
a. Baik	48.671	90.851	35.210	29.120	600.210	647.280
b. Sedang	25.720	-	10.550	16.000	68.890	49.440
c. Rusak	19.660	3.200	36.000	36.640	46.900	24.800
d. Rusak Berat	-	-	-	-	10.120	4.600
Jumlah/*Total*	**94.051**	**94.051**	**81.760**	**81.760**	**726.120**	**726.120**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban, Tahun 2015

2.3.1.3.2 Sarana dan Prasarana Sosial

a) Tempat Ibadah

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan tempat ibadah untuk umat muslim di Kabupaten Tuban sudah memenuhi kebutuhan. Terlebih Kabupaten Tuban terkenal dengan jargon kota religi karena keberadaan salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Sehingga tempat ibadah khususnya bagi warga muslim sudah sangat mencukupi. Baik berupa masjid, mushola maupun pondok pesantren. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Tuban juga tetap menyediakan tempat ibadah bagi penganut agama lain. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan gereja dan klenteng yang ada di Kabupaten Tuban. Gereja terbanyak terdapat di Kecamatan Tuban, yakni mencapai 14 gereja. Sayangnya sampai sejauh ini belum ada vihara dan pura untuk penganut agama Budha dan Hindu.

Tabel 2.20
Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Tuban 2011-2015

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Masjid	876	898	921	921	921
2	Langgar / Musholla	6.368	6.529	6.701	6.701	6.701
3	Gereja Kristen Protestan	33	33	33	33	33
4	Gereja Kristen Katolik	4	4	4	4	4
5	Klenteng	2	2	2	2	2
6	Pondok Pesantren	234	251	254	254	254

Sumber : Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Tuban 2015

Tabel 2.21
Jumlah Tempat Ibadah Kabupaten Tuban Berdasarkan Kecamatan 2014

Kecamatan *Sub Regency*	Masjid *Mosque*	Musholla *Musholla*	Gereja *Church*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kenduruan	42	225	-
2. Bangilan	44	497	2
3. Senori	31	293	1
4. Singgahan	46	360	2
5. Montong	49	404	2
6. Parengan	60	436	2
7. Soko	102	691	1
8. Rengel	59	508	4
9. Grabagan	53	258	-
10. Plumpang	53	605	3
11. Widang	56	362	-
12. Palang	83	404	1
13. Semanding	78	501	4
14. Tuban	55	416	14
15. Jenu	52	455	1
16. Merakurak	65	535	1
17. Kerek	58	418	4
18. Tambakboyo	45	478	2
19. Jatirogo	45	359	4
20. Bancar	88	564	1
Jumlah/*Total* 2014	**1.164**	**8.769**	**49**
Jumlah/*Total* 2013	**921**	**6.701**	**45**
Jumlah/ Total 2012	**898**	**6.523**	**41**

Sumber/*Source* : Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

Sumber : Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Tuban 2015

Pemeluk agama di Kabupaten Tuban bervariasi. Berdasarkan tabel dibawah jumlah pemeluk agamaIslam pada tahun 2014 mencapai 1.216.949 jiwa, agama Kristen pada tahun 2014 terdapat 5.954 jiwa, agama Katolik pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 626 jiwa dari 2.312 menjadi 2.938, agama Hindu pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah penduduk sebanyak 72 jiwa dari 115 jiwa menjadi 43 jiwa, agama Budha pada tahun 2014 terdaat 502 jiwa, agama Konghucu pada tahun 2014 juga mengalami penurunan jumlah penduduk menjadi 89 jiwa yang pada tahun sebelumnya mencapai 211 jiwa.

Tabel 2.22
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Tuban Tahun 2010-2014

Agama	2010	2011	2012	2013	2014
1. Islam	1.106.119	1.130.644	1.280.994	1.279.183	1.216.949
2. Kristen	5,066	5,997	6,238	6,465	5.954
3. Katolik	1,557	3,295	2,176	2,312	2.938
4. Hindu	85	224	96	115	43
5. Budha	449	715	674	684	502
6. Konghucu	160	55	216	211	89
7. Lainnya	5,028			5	-

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2015

Tabel 2.23
Jumlah Konflik Agama di Kabupaten Tuban

Katagori	2011	2012	2013	2014	2015
Konflik agama	16	16	15	15	15

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2015

b) Perdagangan

Tabel 2.24
Jumlah Pasar di Kabupaten Tuban 2014-2015

No	Kategori Pasar	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Tradisional	91	91	91	91	91
2	Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	5	27	42	42	46

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 2015

Jika dilihat dari tabel di atas, terdapat persamaan jumlah pasar tradisional sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Pasar tradisional ini berupa pasar desa dan pasar daerah. Sedangkan jumlah pasar swalayan mengalami kenaikan yang sangat pesat. Yang awalnya hanya 5 unit pada tahun 2011, terus mengalami peningkatan untuk tahun berikutnya hingga mencapai 46 unit pada tahun 2015. Hal ini seiring dengan banyaknya toko reatail modern yang didirikan di Kabupaten Tuban karena kemudahan perijinan. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tuban, karena dengan semakin banyaknya toko retail modern akan merugikan pasar tradisional jika tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas dan sarana pada pasar tradisional. Selain itu, kebardaaan pasar modern ini juga akan merugikan usaha kecil yang ada di sekitarnya karena masyarakat akan lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern dengan pertimbangan kenyamanan dan prestige yang melekat pada pasar modern.

Tabel 2.25
Jumlah Pasar Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Kecamatan 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pasar	Pasar Desa	Pasar Daerah
1	Kenduruan	1	1	-
2	Bangilan	2	1	1
3	Senori	2	2	-
4	Singgahan	4	4	-
5	Montong	4	4	-
6	Parengan	6	6	-
7	Soko	4	4	-
8	Rangel	3	3	-
9	Grabagan	1	1	-
10	Plumpang	6	6	-
11	Widang	5	5	-
12	Palang	10	9	1
13	Semanding	9	7	2
14	Tuban	9	5	4
15	Jenu	2	2	-
16	Merakurak	2	2	-
17	Kerek	2	2	-
18	Tambakboyo	5	5	-
19	Jatirogo	8	7	1
20	Bancar	6	6	-
Jumlah		91	82	9

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 2015

c) Perhubungan

Pembangunan di bidang perhubungan dapat mempengaruhi kelancaran di berbagai bidang dan lintas sektoral. Salah satu aspek yang dilihat dari pembangunan yang berkaitan dengan perhubungan adalah fasilitas rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Tuban, kondisi t*raffic light* , Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tuban dan jumlah uji KIR kendaraan bermotor. Secara lengkap data perkembangan perhubungan dapat ditinjau pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Rambu-Rambu di Kabupaten Tuban 2010-2014

Rambu-Rambu	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pemasangan rambu-rambu	180	136	118	106	319
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	418	385	420	2,222	1,802

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban 2015

Salah satu upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan adalah dengan pemasangan rambu jalan baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan serta pengamanan lalu lintas juga terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kenyamanan transportasi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data di atas dapat dilhat adanya peningkatan jumlah rambu-rambu tiap tahunnya. Pada tahun 2013 mencapai 106 unit dan meningkat drastis menjadi 319 unit pada tahun 2014. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan tetapi rambu-rambu yang tersedia masih belum mencukupi. Idealnya untuk tahun 2014 seharusnya ada 1.802 rambu-rambu yang tersedia. Sehingga masih membutuhkan sekitar 1,483 unit yang belum disediakaan.

Tabel 2.27
Jumlah Terminal Penumpang di Kabupaten Tuban Berdasarkan Kelas Tahun 201-2015

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015
Kelas A	1	1	1	1	1
Kelas B	-	-	-	-	-
Kelas C	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2016

Tabel 2.28
Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan di Kabupaten Tuban 2010-2015

No	Kategori	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Izin Trayek antarkota antar provinsi	**Yang Mengeluarkan DLLAJ Provinsi**					
2	Izin Trayek Perkotaan	40	40	40	40	30	35
3	Izin Trayek Pedesaan	171	169	182	178	188	165
4	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	**211**	**209**	**222**	**218**	**218**	**200**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2016

Menurunnya jumlah ijin trayek angkutan penumpang disebabkan oleh semakin menurunnya angkutan penumpang yang beroperasi,akibat mudahnya masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan roda dua (sepeda motor) sebagai alat transportasi. Sehingga masyarakat cenderung beralih meninggalkan angkutan umum dan pada akhirnya perusahaan jasa angkutan banyak yang gulung tikar.Terlebih lagi usia kendaraan angkutan penumpang umum yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan faktor muat (load factor) rata-rata dibawah 60% (enam puluh persen) sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan angkutan penumpang umum menjadi rendah. Sehingga perlu adanya Lebih pengefektifan armada yang masih beroperasi untuk peremajaan armada, sehingga kenyamanan penumpang lebih meningkat yang bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan jasa angkutan penumpang tersebut.

Tabel 2.29
Uji KIR Angkutan Umum 2010-2015

No	Kategori Kendaraan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Mobil Penumpang Umum	166	173	182	199	161	140
2	Mobil Bus	372	381	395	407	401	378
3	Mobil Barang	10.113	10.356	12.722	14.054	15	13.506
4	Kereta Gandengan	11	12	15	26	25	20
5	Kereta Tempelan	81	86	94	97	142	146
6	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.743	11.008	13.408	14.783	14.744	14.190

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2016

Uji KIR pada angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan angkutan umum sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan meningkatkan keselamatan masyarakat ketika menggunakan angkutan umum. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, khususnya pada mobil penumpang umum. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan jasa angkutan yang gulung tikar karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

d) Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup melakukan sampling terhadap kebisingan dan kadar debu di setiap kecamatan. Pengukuran dilakukan di halaman depan setiap kantor kecamatan pada kondisi musim kemarau sehingga timbulan debu dari pengaruh musim dapat diamati. kegiatan sampling ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sebaran debu dan kebisingan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tuban. Dari data

hasil pemantauan yang diperoleh, kadar TSP terendah terdapat di Kecamatan Parengan dengan nilai *0,068 mg/ N m*^{3}. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh letak lokasi pengambilan sampel berada jauh dari kegiatan masyarakat. Sedangkan untuk kadar TSP tertinggi adalah Kecamatan Plumpang, pada saat pengambilan, lokasi berhadapan langsung dengan jalan raya yang banyak aktifitas kendaraan dan manusia. Mungkin hal inilah yang menyebabkan tingginya kadar debu di Kecamatan Plumpang yaitu dengan konsentrasi *0,305 mg/ N m*^{3}.

Dan untuk data kebisingan tertinggi yaitu Kecamatan Tambakboyo dengan intensitas 77,38 dBA dan yang terendah adalah kecamatan Kenduruan yaitu dengan intensitas 50,69 dBA. Untuk parameter kadar debu hanya ada 1 kecamatan yang berada di atas baku mutu, yaitu Kecamatan Plumpang sedangkan kecamatan lainya nilai kadar debunya masih di bawah baku mutu. Sedang untuk tingkat kebisingan hanya ada 7 kecamatan yang di bawah baku mutu, yaitu kecamatan Kenduruan, Singgahan, Soko, Rengel, Palang, Semanding, dan Grabagan. Untuk kecamatan lainnya semua berada di atas baku mutu. Hal ini perlu segera disikapi dengan meningkatkan revegetasi di wilayah Kabupaten Tuban sehingga dispersi debu dan kebisingan dapat dikurangi. Hal teknis lain yang dimungkinkan berpengaruh pada hasil pengukuran kebisingan dan kadar debu adalah kondisi aktivitas kerja (pada saat pengukuran berlangsung rehab gedung, aktivitas lalu lintas, dan faktor klimatologi di sekitar lokasi pengukuran.

Tabel 2.30
Uji Pencemaran Air Kabupaten Tuban 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
71.43	85.71	100	100	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban 2015

Tabel 2.31
Akses Air Bersih di Kabupaten Tuban 201-2015

2011	2012	2013	2014	2015
55,99	68	70	73	73,3

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban 2015

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, begitu juga di Kabupaten Tuban. Dari tahun ke tahun akses terhadap air bersih di Kabupaten Tuban terus meningkat. Pada tahun 2011 hanya 55,99 %, atau hanya setengah dari masyarakat Tuban yang mendapatkan akses air bersih. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 68% dan mencapai 73,3 % di tahun 2015. Hal ini tentunya terdapat perkembangan yang cukup

signifikan selama 5 tahun terakhir. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari program pemerintah Tuban untuk menyediakan akses air bersih yang merata untuk masyarakat. Kondisi seperti ini harus terus ditingkatkan karena bagaimanapun juga masih ada sekitar 26,7 % masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih.Proyeksi permasalahan terkait dengan keberadaan sumber air permukaan yang ada di Kabupaten Tuban yang ada dalam bentuk air tanah (aquifer air tanah dalam dan aquifer air tanah dangkal), sungai permukaan, sungai bawah tanah, danau, rawa-rawa dan laut pada masa-masa yang akan datang adalah bahwa akan terjadi peningkatan demand air dan penurunan kualitas air. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah penduduk, pengambilan air oleh kegiatan industri, penurunan areal resapan, penurunan areal dan mutu *catchment area* dan terjadinya peningkatan pencemaran.

Tabel 2.32
Terumbu Karang di Kabupaten Tuban 2010-2014

Terumbu Karang	2010	2011	2012	2013	2014
Luas Terumbu Karang (Ha)	154,7500	154,7500	154,7500	154,7500	154,7500
Kondisi Terumbu Karang (Ha)					
1. Baik Sekali (75-100%)	27,1250	27,1250	27,1250		
2. Sedang (25-49,5%)	30,9500	30,9500	30,9500	75,3500	30,9500
3. Buruk (0-24,9%)	96,6750	96,6750	96,6750	79,4000	92,8500
4. Baik (50-74,9%)					30,9500

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban 2015

Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis sebagai habitat, penyedia makanan (nutrient) bagi biota perairan, perlindungan fisik, tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan bagi berbagai biota. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti : berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara. Dari segi estetika, terumbu karang yang masih utuh dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah (pariwisata laut).Keberadaan Kabupaten Tuban di pesisir Laut Jawa menjadikan Kabupaten ini mempunyai terumbu karang yang cukup luas yaitu mencapai 154,7500 Ha. Sayangnya dari luas tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Sebagian besar tergolong dalam kategori buruk yakni mencapai 92,8500 Ha. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya pencemaran terutama polusi industri yang ada di Tuban.Sebenarnya Tuban termasuk daerah potensial untuk ikan

tangkapan. Sumber daya ikan tangkapan mencapai 3,2 ton per kapal. Namun, potensi tersebut akan terus menyusut jika terumbu karang yang rusak tidak segera diremajakan.

Tabel 2.33
Luas Penghijauan dan Kasus Lingkungan di Kabupaten Tuban

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	Satuan
Penghijauan	20	22	22	24	18	Ha
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda	10	11	11	12	9	Kasus
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ada	10	11	11	12	9	Kasus

Sumber : Badan Lingkungan Hidup 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan penghijauan dari tahun 2010 yang mencapai 20 Ha meningkat hingga24 Ha pada tahun 2013. Sayangnya tren ini tidak terjadi pada tahun 2014 yang menurun cukup drastis hanya mencapai 18 Ha, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan lahan yang ada di Kabupaten Tuban. Terkait kasus lingkungan, terjadi peningkatan kasus pada tahun 2010 yang mencapai 10 kasus hingga tahun 2013 sebanyak 12 kasus. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan kasus yakni 9 kasus, hal ini dikarenakan pemerintah semakin mengupayakan penegakan hukum dan peraturan terkait masalah lingkungan. Sehingga dapat meminimalisasi kasus yang ada.

e) Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban melayani berbagai dokumen kependudukan, pencatatan sipil dan kartu insentif anak. Dokumen kependudukan yang dilayani antara lain pelayanan e-KTP, pencatatan biodata, pelayanan KK dan KTP. Sedangkan pencatatan sipil terdiri dari pelayanan akta dan pelayanan surat keterangan. Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis sehingga untuk memperpendek jarak pelayanan bagi penduduk yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, pemerintah Kabupaten Tuban telah mengambil kebijakan terkait pembuatan KTP dapat dilaksanakan di setiap kecamatan. Namun sejak ada kebijakan e-KTP, kewenangan kecamatan hanya sebatas pelayanan administrasi, sedangkan yang menandatangani kepala dinas kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.34
Capaian Pelayanan KependudukanDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tuban
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan KTP	84,06	84,34	86,44	86,89	86,91
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran	53,36	81,87	80,63	82,67	79,24
Rasio Pasangan ber Akta nikah	90,97	89,42	89,95	93,8	90,31
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	52,96	53,1	55,41	57,41	58,51
Kepala Keluarga yang memiliki kartu Keluarga	100	100	100	100	100
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban 2015

Sejauh ini pelayanan dilakukan sudah cukup baik walaupun belum optimal. Hal ini terlihat dari data tahun 2011-2015, rasio penduduk ber KTP, bayi berakte kelahiran dan kepemilikan e-TKP meningkat tajam pada tahun 2012 dan terus meningkat hingga tahun 2014, walaupun belum keseluruhan. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil disebabkan karena masih terbatasnya fasilitas pelayanan seperti akses internet untuk pelayanan e-KTP yang belum lancar, kurang nyamannya ruang tunggu pelayanan, distribusi blangko KTP dari pusat yang terkadang terlambat sehingga menghambat pelayanan e-KTP dan sebagainya. (perlu dikonfirmasi ke SKPD bersangkutan). Selain itu, kepemilikan akta kelahiran bayih masih terbilang rendah yakni hanya mencapai 58,51% hingga tahun 2015. Hal ini menunjukkan sekitar 41,49 % bayi belum memiliki akta kelahiran yang dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih kurangnya kesadaran para orang tua untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

f) Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.35
Pemberdayaan Di Kabupaten Tuban 2012-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100	100	91,81	91,81
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi	0	3,51	7,2	7,2
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	2,52	2,52	0	0
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100
Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman	99,36	99,36	100	100

Sumber : Bapemas, Pemdes dan KB, Kabupaten Tuban 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2012 dan 2013 mencapai 100 % dan menurun menjadi 91,81% pada tahun 2015. Penurunan ini dikarenakan masyarakat ada yang masih enggan mendaftar untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan, di lain sisi juga informasi tentang keberadaan program pembinaan ini belum tersebar luas sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Namun demikian terjadi peningkatan prestasi kelompok binaan yang ada, yang awalnya pada tahun 2013 hanya 3,51%, meningkat menjadi 7,2 % di tahun 2014 dan 2015. Selain itu pemerintah juga tetap menindaklanjuti kegiatan pasca pembinaan sehingga perkembangan hasil binaannya tetap bisa dikontrol dan dikembangkan lebih lanjut.

Di lain sisi, pemerintah juga mengadakan pelatihan dan pendampingan para aparatur desa untuk megelola keuangan desa. Pada tahun 2012, desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman mencapai 99,36% dan pada tahun 2015 sudah mencapai 100%, hal ini berarti semua desa di Kabupaten Tuban telah mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman yang sudah ditetepakan. Selain itu pemerintah Kabupaten Tuban juga melaksanakan program pemberdayaan perempuan, salah satunya dengan mengaktifkan kegiatan PKK dan posyandu.

Tabel 2.36
Presentase PKK dan Posyandu Aktif di Kabupaten Tuban 2012-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
PKK aktif	100	100	100	100
Posyandu aktif	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban 2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012-2015 PKK aktif dan posyandu aktif mencapai 100%, hal ini berarti kedua program ini telah berjalan efektif di Kabupaten Tuban.

g) Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaki kondisi kehidupannya. Jumlah PMKS di Kabupaten Tuban cukup tinggi yaitu mencapai 158,048

orang pada tahun 2013. Dari sekian banyak PMKS yang ada, hanya 20,157 orang saja yang ditangani atau sekitar 20% dari keseluruhan PMKS yang ada. Sebanyak 137,891 belum ditangani. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam penanganan PMKS ini, diantaranya terbatasnya fasilitas yang ada.Tentunya pemerintah harus mengadakan program penanganan PMKS yang lebih intensif dan peningkatan fasilitas sosial untuk meminimalisasi jumlah PMKS yang belum ditangani. Untuk menangani permasalahan sosial ini, pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak, baik organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial lainnya.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	Tahun	
		2014	2015
1	Balita terlantar	291	283
2	Anak terlantar	655	697
3	Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	31	37
4	Anak Jalanan	27	31
5	Anak dengan Kedisabilitasan.	914	901
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan.	8	17
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus.	70	52
8	Lanjut usia terlantar	5.967	6.550
9	Penyandang Disabilitas.	3.807	3.980
10	Tuna Susila	58	54
11	Gelandangan	32	31
12	Pengemis	187	194
13	Pemulung	676	645
14	Kelompok Minoritas	18	7
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).	393	398
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).	9	9
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	79	81
18	Korban Trafficking.	3	3
19	Korban Tindak Kekerasan.	10	25
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	25	25
21	Korban bencana alam dan musibah lainnya.	176	173
22	Korban Bencana Sosial.	2	2
23	Wanita rawan Sosial Ekonomi	5.085	5.032
24	Fakir Miskin.	55.159	-
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	68	75
26	Komunitas Adat Terpencil.	11	5
27	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	-	3.505
28	Orang Gila	-	662

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, tahun 2016.
Keterangan :
Indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tuban antara lain masih adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan yang paling utama adalah masalah tingginya jumlah anak terlantar yang terkadang dapat ditemui secara mudah di beberapa ruas jalan di Kabupaten Tuban. Jumlah fakir miskin di Kabupaten Tuban sangat tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah masalah sosial lainnya. Dan disusul dengan para lansia yang terlantar serta wanita rawan sosial ekonomi. Hal ini tentunya perlu adanya penanganan khusus dari dinas sosial untuk meminimalisir jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun berikutnya.

h) Ketenagakerjaan

Dalam masalah kesejahteraan, semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja maka semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut. Rasio Penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan, namun sudah relative tinggi. Namun pemerintah Kabupaten Tuban masih perlu untuk meningkatkan kesempatan kerja untuk masyarakat di Kabupaten Tuban untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas di Kabupaten Tuban.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dari TPAK dapat dilihat perbandingan persentase penduduk yang telah dan siap masuk pasar kerja.TPAK di Kabupaten Tuban pada tahun 2014 sebesar 64,00 % yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat 64 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran).Dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2010 sebesar 69,96 % berarti terjadi penurunan sebesar 5,96 persen poin.

Tabel 2.38
Indikator Ketenagakerjaan Kab. Tuban Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Angkatan Kerja	599,175	605,606	574,562	608,309	569,185
Penduduk Yang Bekerja	582,059	583,508	550,144	581,979	548,541
Pengangguran	17,116	25,118	24,418	26,330	20,644
TPAK	69.96	69.96	66.55	70.10	64.00
TKK	97.14	95,85	95.75	95.67	96.37
TPT	2.86	4,15	4.25	4.33	3.63

Sumber : BPS, Sakernas 2010 – 2014

Menurut konsep Labour Force, kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam usaha kegiatan ekonomi orang tua/saudara/orang lain. Indikator TKK merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja. Pada tahun 2014, TKK di Kabupaten Tuban mencapai 96,37 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 95,67 persen berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,70 persen poin.

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan adalah besaran data penganggur (TPT/Tingkat Pengangguran Terbuka). Indikator TPT memberikan gambaran tentang seberapa besar angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam kegiatan perekonomian.Pada tahun 2014, angka pengangguran (TPT) di Kabupaten Tuban sebesar 3,63 sedang pada tahun 2008 sebesar 5,74 yang berarti terjadi penurunan angka pengangguran. Menurunnya angka pengangguran ini diakibatkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan keahlian, maka pemerintah Kabupaten Tuban secara konsisten mengadakan pelatihan untuk meningkatkan softskill masyarakat.

Tabel 2.39
Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

Jenis Pelatihan	2011	2012	2013	2014	2015
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	36,8	41,7	63	69	75,72
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	32,85	41,7	56	63	70,38
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	28,9	41,7	49	57	64,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2016

Dari Tabel di atas dapat dilihat peningkatan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dari pemerintah Kabupaten Tuban. Terdapat tren positif dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan. Harapannya terciptanya SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian di Kabupaten Tuban.

i) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kemampuan UMKM dan koperasi sebagai basis penggerak ekonomi kerakyatan terus ditingkatkan melalui berbagai ragam pembinaan dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Sasaran pembinaan dan fasilitasi tersebut adalah keseluruhan koperasi dan UMKM. Dengan menitik beratkan pada pemberdayan dan pengembangan koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing, perbaikan dan pertumbuhan serta guna mengkoordinasi dan memfasilitasi penyediaan kebutuhan pembiayaan untuk permodalan bagi masyarakat pedesaan, Pemerintah Kabupaten Tuban telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Koperasi Majelis Taklim berbasis syariah di setiap desa dan Koperasi Masyarakat Desa Hutan. Pada tahun anggaran 2015 Kabupaten Tuban mendapatkan alokasi sebanyak 140 kelompok Koperasi majelis taklim berbasis syariah dan 2 (dua) kelompok Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) sehingga totalnya 142 kelompok yang masing-masing mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 25.000.000,-.

Upaya lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi adalah dengan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka mempersatukan persepsi dalam memberikan pembinaan demi peningkatan dan kemajuan koperasi serta sebagai bentuk upaya dalam menekan angka kemiskinan dengan memberikan pelatihan ketrampilan dalam menciptakan masyarakat produktif dan mengembangkan sebagai wirausaha baru baik kepada anggota Koperasi Wanita maupun kelompok masyarakat pemula.

Sebagai bukti nyata kesungguhan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya pembinaan dan penggerakan koperasi dan UMKM telah ditunjukkan melalui kebijakan maupun anggaran yang setiap tahun terus meningkat, dan sebagai wujudnya telah dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia dan beberapa gerakan koperasi di Kabupaten Tuban masuk sebagai juara nasional dan Provinsi Jawa Timur, disamping itu Kabupaten Tuban dipercaya sebagai kabupaten penyelenggara Hari Koperasi Provinsi Jawa Timur ke 68 tahun 2015.Pelaksanaan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Tuban dari tahun ketahun menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan dengan telah terbentuknya koperasi yang merata di pelosok desa bahkan tingkat RT dan RW, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.40
Industri Kecil di Kabupaten Tuban 2010-2014

No	Jenis	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Unit Kerja	11.806	11.916	11.991	12.125	12.277	Unit
2	Tenaga Kerja	29.924	30.202	30.370	30.679	31.080	Orang
3	Nilai Produksi	9.161.161,20	12.942.831,10	1.382.052,50	12.992.503,32	13.057.466,00	Rp Juta

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 2015

Tabel 2.41
Perkembangan Kondisi Koperasi di Kabupaten Tuban
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi	Unit	1.052	1.020	1.043	1.068	1.088
2.	Jumlah Anggota	Orang	64.872	77.994	80.215	83.074	85.004
3.	Jumlah Pegawai	Orang	790	793	793	816	826
4.	Jumlah Simpanan	Juta	66.905	69.566	71.653	74.268	75.068
5.	Modal Sendiri	Juta	127.857	93.442	97.585	102.434	113.164
6.	Jumlah Cadangan	Juta	16.314	16.483	17.308	18.391	18.991
7.	Jumlah Dana	Juta	6.468	9.286	9.472	9.795	10.145
8.	Jumlah Hutang	Juta	42.411	57.684	58.837	60.066	64.988
9.	Volume Usaha	Juta	402.303	525.894	531.152	538.428	588.828
10.	S H U	Juta	4.114	7.393	8.624	10.333	11.263

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat banyaknya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kabupaten Tuban. Meskipun persebarannya kurang merata, tetapi kedua usaha ini tersebar di setap kecamatan. Kecamatan Tuban dan Kecamatan Semanding mempunyai jumlah yang paling banyak yaitu 1.470 dan 1.443. Banyaknya industri kecil ini merupakan suatu potensi besar yang dapat menyokong perekonomian masyarakat di Kabupaten Tuban. Sehingga diperlukan suatu pembinaan sehingga jumlah yang besar tersebut tidak hanya berkontribusi pada pelaku usaha tetapi juga Kabupaten Tuban secara keseluruhan.

Tabel 2.42
Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2014

Kecamatan *Sub Regency*	Jumlah/ *Number*		Produksi / *Production* (Rp. 000)	
	Perusahaan *Establishment*	Tenaga Kerja *Person Engaged*	Biaya *Cost*	Nilai *Value*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kenduruan	301	650	8.400.856	15.381.805
2. Bangilan	662	1.369	14.464.187	36.920.070
3. Senori	389	841	7.974.000	12.340.000
4. Singgahan	563	1.259	13.444.463	20.181.793
5. Montong	466	1.296	11.260.182	12.773.371
6. Parengan	906	2.220	20.733.799	33.669.358
7. Soko	1.258	2.957	16.085.179	33.317.492
8. Rengel	1.123	2.744	21.914.756	41.725.807
9. Grabagan	16	35	187.000	350.000
10. Plumpang	735	3.252	22.415.949	65.605.517
11. Widang	881	2.885	33.992.526	62.568.431
12. Palang	1.142	2.661	40.093.100	68.583.750
13. Semanding	1.443	4.511	31.750.735	60.599.236
14. Tuban	1.470	5.697	69.573.053	181.481.877
15. Jenu	586	2.455	175.869.698	341.916.577
16. Merakurak	782	1.919	15.813.140	24.959.453
17. Kerek	1.316	3.267	20.084.165	97.616.753
18. Tambakboyo	392	1.273	18.346.514	46.739.181
19. Jatirogo	843	2.274	55.848.985	192.376.407
20. Bancar	908	2.754	21.206.562	77.321.430
Jumlah/*Total* 2014	**16.182**	**46.319**	**601.130.682**	**1.426.428.308**

Sumber/*Source* : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban terus berupaya meningkatkan peran sektor industri khususnya UKM dengan melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku UKM baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam sentra industri. Peningkatan peran sektor industri, khususnya UKM, juga terus dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku UKM. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) keberadaannya dirasa semakin penting, perannya yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja dan mendayagunakan sumber daya lokal dalam proses produksi juga berperan besar sebagai salah satu katup pengaman terhadap gejolak ekonomi nasional.

Tabel 2.43
Jumlah Koperasi di Kabupaten Tuban 2011-2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Koperasi Aktif	524	604	627	797	879
2	Jumlah UKM non BPR / LKM	29.489	29.849	31.664	35.181	41.391
3	Jumlah BPR / LKM	984	989	998	1.057	1.057
4	Usaha Mikro dan Kecil	30.080	31.664	33.330	37.033	43.569

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 2015

j) Kebudayaan

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi seni dan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan urusan Kebudayaan merupakan upaya pengembangan sektor seni dan budaya daerah sebagai pendukung daya tarik wisata di Kabupaten Tuban, dengan program-program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 diantaranya melalui : Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya serta program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : Pergelaran Seni Tradisi di TMII Jakarta menampilkan pergelaran aneka tari dan Campursari Tayub, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dengan kegiatan Pemilihan Penari Daerah, Pemilihan Group Lagu Daerah, Karya Tari di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan mendapat penghargaan Penyaji Terbaik, serta Pementasan Seni Tradisi di Obyek Wisata, Bulan Purnama, dan Acara Kenegaraaan Daerah.

Dalam rangka Gelar Budaya Daerah telah dilaksanakan Kegiatan Gelar Seni Budaya (GSB) di Taman Budaya Jatim dan Kirab Budaya Daerah. Kegiatan GSB yang dilaksanakan tersebut mengambil tema “Tuban Bumi Wali, The Spirit of Harmony”, menampilkan Pergelaran Aneka Tari, Ketoprak Siswo Kawedar dengan Judul “Rangsang Tuban”, Gelar Langen Tayub, Sajian Band, serta Pameran Potensi Wisata, Produk Unggulan, dan Kuliner. Selain itu dalam kegiatan Kirab Budaya Daerah yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 ini dipusatkan di Kabupaten Banyuwangi dengan menampilkan kirab budaya “GUNJINGAN”.Sebagai upaya pengembangan seni budaya daerah, Kabupaten Tuban juga berpartisipasi dalam Kegiatan Festival Kesenian Pesisir Utara yang pada tahun 2015 ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo. Pada acara tersebut Kabupaten Tuban menampilkan Group Musik Tradisi-Modern, Pawai Budaya “Sri Uning Mustika Tuban”, serta Pameran Wisata dan Produk Ungulan. Selain itu juga berpartisipasi dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten-Kabupaten di Wilayah Ratubangnegoro dengan mengikuti Kirab Budaya dalam Rangka HUT Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora.

Dalam rangka pengembangan kekayaan potensi budaya daerah, telah dilaksanakan kegiatan pemberian Hibah Daerah berupa seperangkat alat kesenian kepada Ludruk Armada Jaya serta Alat Musik Elektun, kepada beberapa kelompok kesenian di Kabupaten Tuban yang direkomendasikan berdasarkan aspek pembinaan dan penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan.Prestasi yang diraih pada sektor seni dan

budaya yang menjadikan kebanggaan bagi Kabupaten Tuban di Tahun 2015 antara lain dalam Kegiatan Penata Stand dan Penyajian terbaik dalam rangka Pameran Explor Wisata Indonesia Serta Sebagai Penyaji Terbaik dalam Rangka Festival Karya Tari Jawa Timur.

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Group Kesenian (grup)	376	411	425	450	497
2	Jumlah Gedung Kesenian (buah)	1	1	1	1	1
3	Cakupan Kajian Seni (kali)	4	4	4	6	6
4	Cakupan Fasilitas Seni (unit)	1	2	2	5	5
5	Cakupan Gelar Seni (kali)	3	4	4	5	5
6	Cakupan Misi Kesenian (pokok)	5	5	5	5	5
7	Cakupan SDM kesenian (orang)	50	50	50	50	50
8	Cakupan Tempat Kesenian (unit)	4	4	4	4	4
9	Jumlah benda, Situs danKawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584

Sumber : Dinas Perekonomian Dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tuban 2015

k) Penanaman Modal

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanaman Modal

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (unit)	5	6	11	5	28
2	Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Milyar)	11.048	16.990	20.993	9.123	86.889
3	Meningkatnya realisasi investasi dan iklim investasi (unit usaha)	2.827	3.018	498	494	507
4	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	1 : 1.130	1 : 2.562	1 : 49	1 : 49	1 : 49,36

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban menjadi daerah tujuan investasi yang cukup diminati di Jawa Timur. Tuban masuk zona industri Gerbang Kerto Susila plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Kawasan industri selama ini tersebar di Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Tingginya minat investasi di Kabupaten Tuban akan berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan berkualifikasi, peluang tersebut yang sampai dengan saat ini belum tergarap dengan baik karena sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Tuban adalah alumni SLTA yang belum dibekali dengan keahlian yang memadai sesuai standar perusahaan. Sejauh ini

belum terbentuknya lembaga yang khusus menangani urusan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPPT yang sudah terbentuk saat ini sudah melaksanakan pelayanan Ijin Prinsip Penanaman Modal akan tetapi belum memiliki tupoksi penyelenggaraan urusan penanaman modal. Selain itu juga belum optimalnya kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.Sehingga Pembentukan lembaga Penanaman Modal yang terintegrasi dengan PTSP yang secara mandiri menangani proses perijinan penanaman modal dan perijinan lainnya sehingga kualitas pelayanan publik di bidang perijinan dapat meningkat. Dan juga perlu adanya mediasi dan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

l) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga terus dilakukan melalui berbagai pembinaan generasi muda dan olahraga. Pembinaan generasi muda yang dilakukan antara lain Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Aubade, Pramuka dan penyelenggaraan upacara bendera. Sedangkan pembinaan olahraga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Jika dilihat dari tabel dibawah ini terdapat peningkatan pada bidang kepemudaan dan olahraha. Peran pemuda terhadap bidang olahraga juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya organisasi pemuda dan juga organisasi olahraga. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berjalan linier dengan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah dan terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan. Sehingga diperlukan pengembangan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan
dan Olah Raga Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan (orang)	180	180	180	180	180
2	Jumlah Organisasi Pemuda (organisasi)	-	12	20	20	30
3	Jumlah Organisasi Olahraga (organisasi)	-	12	25	25	25
4	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	-	2	6	6	8
5	Jumlah Lapangan Olahraga (lapangan)	-	20	23	40	55
6	Jumlah Dan Jenis Olahraga Berprestasi (jenis)	-	3	6	40	6

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

m) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Tuban di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam implementasi program terkendala dengan beberapa permasalahan di Kabupaten Tuban diantaranya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai mengingat luasnya cakupan dan tanggung jawab sesuai tupoksi yang harus dilaksanakan, situasi dan kondisi masyarakat yang bergerak dinamis berpotensi menimbukan beragam gerakan dan konflik antar individu atau kelompok masyarakat. Dan juga sikap apatis dan skeptis masyarakat terhadap tingkat profesionalisme dan transparansi apart pemerintah daerah sehingga mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Tuban dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Meningkatnya toleransi, kerukunan dan kesadaran antar umat beragama (%)	6,67	6,67	20	20	20
2	Meningkatnya penghormatan atas HAM (%)	75	75	75	80	80
3	Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat (%)	18,90	18,90	45,41	56,33	67,64
4	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP (%)	0	18,90	100	100	100
5	Prosentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Linmas) (%)	0,0093	0,0094	0,0072	0,00717	0,0097

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2016

n) Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015 dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015
A.	**Aspek Pekayanan Umum**		
1	Opini Audit BPK	%	-
2	Pelayanan perijinan tepat waktu	(%)	100
3	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	event	8
4	Penyesuaian penataan kelembagaan (SKPD)		3
5	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui		
	a. Media massa seperti majalah, radio, televisi	Kali/th	18
	b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	Setiap hari
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali/ tahun	3
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan/ atau	kali/ tahun setiap kec.	2
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kali/ tahun	87
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	15
7	Prosentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	%	0,0072
8	Prosentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	
9	Penegakan Perda	kali	
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (menit)	menit	
12	Aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya	%/org	183/1.625
13	Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir tepat waktu	%	199 (0,18)
14	PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti	%	160
15	SPM yang diterapkan (%)	%	100
16	SKPD yang mencapai target SPM (%)	%	0,10
17	SKPD yang menerapkan SOP (%)	SKPD	100
18	Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	%	100
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (unit SKPD)	SKPD	20
20	Jumlah pelayanan berstandar internasional (ISO)	buah	4
21	Pelanggaran disiplin PNS (Orang)	orang	28
22	Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi stakeholder	buah	20
B	**Aspek Daya Saing Daerah**		
1	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	Buah	2
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	-
3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	rupiah	-
4	Produktivitas total daerah (juta)	juta	-
5	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Buah	-
6	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Buah	-
7	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Buah	-
8	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Buah	-
9	Angka kriminalitas (Pelanggaran Perda / Tipiring)	Buah	-
10	Jumlah demo	Kali	
11	Lama proses perijinan	Hari	7,25
12	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah	Buah Buah Buah	29 11 18
13	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Buah	2

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tuban, 2016

Tabel 2.49
Nilai Opini BPK dan Nilai SAKIP

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Opini BPK	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
Nilai SAKIP	-	-	-	C	C

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, 2016

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar, sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) berarti bahwa laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Opini WDP diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

o) Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama

Pada Tahun 2015 telah diterbitkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/118/KPTS/414.012/2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Tahun 2015. Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.Adapun target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Tuban ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Nomor : 188.45/1289/KPTS/414.104/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban. Penetapan SPM tersebut

digunakan sebagai acuan dan perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal oleh pemerintah Kabupaten, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Tabel 2.50
Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Regulasi Ketahanan Pangan	50	75	70	75	79
Tingkat Kemandirian Pangan	70	75	80	85	90
Penguatan Cadangan Pangan	70	83	83	85	90
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	60	45	70	85	90
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60	65	70	80	90
Skor Pola Pangan Harapan	78	80	80	87	87
Pengawasan dan Pembinaan Pangan	50	63	73	78	89,5
Penanganan Daerah Rawan Pangan	20	31	44	55	60

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban 2015

Dari tabel di atas dapa dilihat adanya tren positif di setiap indikator ketahanan pangan di Kabupaten Tuban. Hampir keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Regulasi ketahanan pangan yang awalanya hanya 50% pada tahun 2011 meningkat menjadi 79% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah tentang penataan ketersediaan pangan di Kabupaten Tuban dan sebagai uapaya untuk menjaga ketahanan pangan yang ada. Hal ini berimbas pada tingkat kemandirian pangan di Kabupaten Tuban yang pada tahun 2011 hanya mencapai 70% meningkat menjadi 90% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Tuban dalam menyediakan kebutuhan pangannya cukup baik. Selain itu juga didukung dengan adanya informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah. Sehingga masyarakat juga bisa terus memantau perkembangan ketersediaan pangan yang ada. Dengan adanya pemantauan bersama terkait pasokan dan harga serta akses pangan, menyebabkan adanya stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Tuban, dimana persentase dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pengawasan dan pembinaan pangan pun terus ditingkatkan. Pada tahun 2011 hanya mencapai 50% dan pada tahun 2015 sudah mencapai 89,5%. Di lain sisi pemerintah juga sigap dalam penanganan daerah rawan pangan. Dimana pada tahun 2011 penanganannya hanya mencapai 20%, naik menjadi 60% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin luas dan besar cakupan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Tuban.

Kontribusi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kemandirian pangan diwujudkan melalui pelaksanaan pembinaan Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan, dengan hasil capaian kegiatan berupa pendampingan pengembangan modal pada kelompok afinitas penerima bantuan sosial Desa Mandiri Pangan. Adapun capaian Tingkat Kemandirian Pangan Kabupaten Tuban dapat diperoleh dari rata-rata capaian kemandirian pangan daerah pada komponen prosentase realisasi Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan dengan yang direncanakan serta prosentase realisasi Lumbung Pangan yang dikembangkan dengan yang direncanakan. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Skor PPH Kabupaten Tuban Tahun 2015 adalah sebesar 87%, angka tersebut telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan skor PPH tahun 2011 yang hanya mencapai 78%. Perhitungan skor tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara prosentase Angka Kecukupan Gizi dari masing-masing sumber energi (% AKG) dengan bobot yang telah ditetapkan, yang meliputi 9 kelompok bahan pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, serta kelompok bahan pangan lain sesuai standar Neraca Bahan Makanan.

Selain itu pemerintah Kabupaten Tuban juga telah berupaya meminimalisir daerah rawan pangan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penanganan daerah rawan pangan antara lain adalah intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil skoring Tim SKPG maupun rawan pangan akibat bencana; penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan; serta melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan melalui program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dan dipadukan dengan program lainnya. Secara konkrit, penanganan daerah rawan pangan yang dilaksanakan selama Tahun 2011-2015 dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial langsung kepada masyarakat berupa bantuan beras sebesar 10 kg setiap KK yang berada di daerah rawan pangan.

p) Statistik

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum yang berkaitan urusan statistik selama periode 2010-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.51
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku ”Kecamatan Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku ”ICOR dan ILOR”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku ”Indeks Harga Konsumen”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku ”Indeks Pembangunan Manusia”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku ”Nilai Tukar Petani”	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban tahun 2016

Dari tabel urusan statistik diatas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun ke tahun.Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. Kemudian dengan keluarnya Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah, maka Pemerintah KabupatenTuban perlu lebih mengoptimalkan kembali manajemen data pembangunan di KabupatenTuban.

q) Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Tuban tidak mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Rasio wartel/warnet pun masih sama. Hanya saja untuk jumlah penerbit surat kabar nasional dan lokal bertambah dari 6 penerbit pada tahun 2011 menjadi 12 penerbit pada tahun 2014. Jumlah penyiaran radio juga berkurang pada tahun 2014 menjadi 6 buah yang awalnya 7 buah di tahun 2013. Hal ini dikarenakan minat masyarakat terhadap informasi yang disarkan melalui radio semakin berkurang. Saat ini masyarakat lebih tertarik pada informasi yang disiarkan di televisi maupun secara online.

Tabel 2.52
Perkembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban

Aspek	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Jaringan Komunikasi (buah)	199	199	199	199	199
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (buah)	10 : 1.000	10 : 1.000	10 : 1.000	10 : 1.000	10 : 1.000
Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)	6	6	6	12	12
Jumlah penyiaran radio/tv lokal (buah)	7	7	7	6	6
Website milik pemerintah daerah (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah pameran/expo (kali)	4	4	4	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban Tahun 2015

r) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting yang dapat mendukung pencarian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah perpustakaan yang ada akanmenunjukkan mudah tidaknya masyarakat dalam mendapatkan informasi untuk memperluas pengetahuan demikian halnya di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi melaksanakan program Pengembangan Minat Budaya Baca dan Pembinaan Perpustaakan. Program ini dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang bermuara pada peningkatan dan pengembangan minat budaya baca masyarakat agar di era informasi terbuka ini masyarakat mampu mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.53
Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah anggota perpustakaan (orang)	2.565	4.066	5.000	9.900	13.788
2	Jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan (eksemplar)	38.928	44.885	40.000	54.000	56.146
3	Jumlah pengunjung perpustakaan (Orang)	47.042	651.209	90.000	75.000	171.086
4	Jumlah bahan pustaka yang dipinjam (eksemplar)	46.371	67.214	80.000	150.000	155.677
5	Jumlah berbagai jenis perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	15	15	15	15	20
6	Jumlah perpustakaan peserta program kemitraan (perpustakaan)	-	-	30	50	72
7	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola perpustakaan (kali/orang)	-	1	1	2	2

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Tuban, Tahun 2015

Untuk meningkatkan pengelolaan urusan kearsipan dan untuk menyelamatkan serta menatausahakan dokumen-dokumen daerah yang masih aktif, diperlukan sistem kearsipan dan sarana penyimpanan arsip dokumen yang handal, meliputi dokumen yang ada di SKPD-SKPD maupun yang ada di gudang arsip Pemerintah Daerah

3.2. Urusan Pilihan

3.2.1 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tuban khususnya tanaman pangan. Terdapat beberapa komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tuban antara lain padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Dari beberapa komoditas tersebut, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari komoditas lainnya. Namun sayangnya produktivitas padi, baik padi sawah maupun padi ladang mengalami kenaikan fluktuatif dalam lima tahun terakhir (2010-2014), sebagaimana dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.

Gambar. 2.1. Grafik Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Tahun 2010-2014

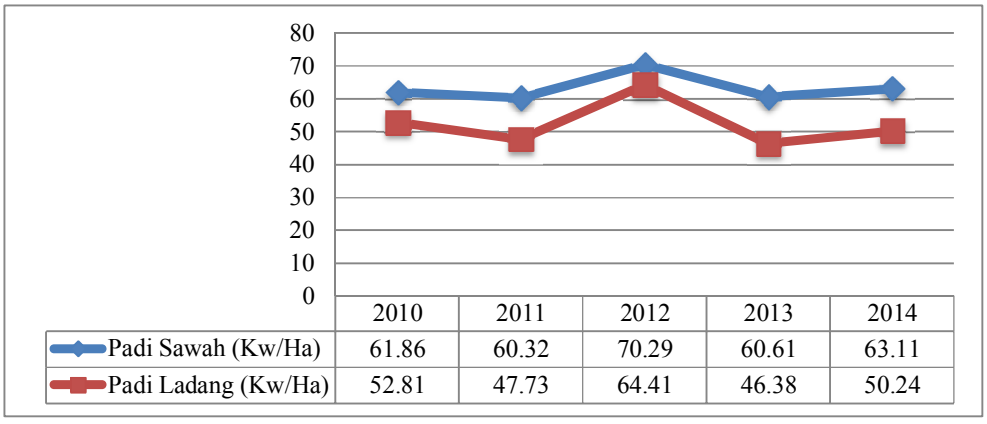

	2010	2011	2012	2013	2014
Padi Sawah (Kw/Ha)	61.86	60.32	70.29	60.61	63.11
Padi Ladang (Kw/Ha)	52.81	47.73	64.41	46.38	50.24

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2014

Grafik diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2010-2014) produktivitas padi, baik padi sawah maupun padi ladang mengalami kenaikan fluktuatif. Produktivitas padi terbesar adalah pada tahun 2012, dimana produktivitas padi sawah mencapai 70,29 Kw/Ha, sedangkan produktivitas padi ladang mencapai 64,41 Kw/Ha. Dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional produktivitas padi di Kabupaten Tuban lebih tinggi di tahun 2013 dan 2014 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Tabel Perbandingan Produktivitas Padi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional

Uraian	2013	2014
Kabupaten Tuban (Kw/Ha)	60,61	63,11
Jawa Timur (Kw/Ha)	59,15	59,81
Nasional (Kw/Ha)	51,52	51,35

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan BPS Provinsi Jatim

Produktivitas yang fluktuatif tersebut berkaitan dengan cuaca atau iklim, konversi lahan pertanian yang tidak terkendali dan hama tanaman yang terus berkembang ketika musim tanam dan panen menjadi sebab jumlah produksi sektor pertanian khususnya sub-sektor tanaman bahan pangan menurun dalam beberapa tahun. Untuk lebih jelasnya, luas panen dan produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang
Tahun 2010-2014

Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2010	83.305	81.667	505.215	1.192	1.192	6.295
2011	89.319	83.268	502.293	3.213	3.213	15.337
2012	86.005	80.502	565.866	1.801	1.801	11.600
2013	81.538	80.655	488.839	1.732	1.732	8.033
2014	86.877	83.806	528.908	1.836	1.743	8.757

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban tahun, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, luas panen padi sawah dan padi ladang di Kabupaten tuban mengalami kenaikan fluktuatif. Demikian halnya dengan produksinya. Produksi tertinggi padi sawah adalah pada tahun 2012 dengan total produksi sebesar 565.866 ton, sedangkan untuk padi ladang adalah pada tahun 2011 dengan total produksi sebesar 15.337 ton. Produksi terendah untuk padi sawah adalah pada tahun 2013 dengan total produksi sebesar ton, sedangkan untuk padi ladang adalah pada tahun 2010 dengan total produksi sebesar 6.295 ton.

Sedangkan untuk komoditas jagung, luas panen dan produksinya dalam lima tahun terakhir juga mengalami kenaikan fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56
Luas Panen dan Produksi Jagung di Kabupaten Tuban tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	99.946	92.443	83.473	94.711	95.975
Produksi (Ton)	525.381	506.571	431.776	454.784	506.966
Produktivitas (Kw/Ha)	52,57	54,80	51,73	48,02	52.82

*) Angka sementara
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir luas panen dan produksi jagung di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif. Jumlah produksi jagung tertinggi adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 525.381 ton dengan luas panen sebesar 99.946 Ha. Namun sayangnya dua tahun berikutnya produksi jagung mengalami penurunan yaitu menjadi 506.571 ton di tahun 2012 dan 431.775 di tahun 2013, dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015. Kenaikan dan penurunan produksi jagung di Kabupaten Tuban ini terjadi seiring dengan kenaikan dan penurunan luas penen. Penurunan produksi yang terjadi ditahun 2012 dan 2013 disebabkan karena turunnya minat petani dalam menanam jagung karena curah hujan yang fluktuatif. Curah hujan yang terjadi di tuban pada tahun 2012 bisa dikatakan sangat fluktuatif dan tidak menentu. ada bulan tertentu dimana curah hujan cukup tinggi yaitu di bulan desember (435 milimeter), namun ada juga bulan-bulan dimana tidak terjadi hujan sama sekali yaitu di bulan april, juli, agustus dan september (0 milimeter) (tuban dalam angka tahun 2013), demikian halnya curah hujan yang terjadi di tahun 2013, dimana pada bulan januari curah hujan cukup tinggi yaitu (344 milimeter), namun di bulan-bulan lain curah hujan cukup rendah bahkan tidak terjadi hujan sama sekali yaitu bulan agustus dan September.

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, pada tahun 2013 produktivitas komoditas Jagung di Kabupaten Tuban lebih tinggi dibandingkan dnegan produktivitas jagung di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2014 produktivitas jagung di Kabupaten Tuban menurun dari tahun sebelumnya namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan produksi jagung di tingkat Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Perbandingan Produktivitas Komoditas Jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional tahun 2013-2014

Uraian	2013	2014
Kabupaten Tuban (Kw/Ha)	51,73	48,02
Jawa Timur (Kw/Ha)	48,03	47,72
Nasional (Kw/Ha)	48,44	49,54

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan BPS Provinsi Jatim

Komoditas pertanian lain yang ada di Kabupaten Tuban adalah kacang kedelai. Dalam lima tahun terakhir luas panen dan produksi kacang kedelai di Kabupaten Tuban cenderung menurun sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Luas Panen dan Produksi Kacang Kedelai di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	3.041	2.060	1.973	1.480	1.821
Produksi (Ton)	3.929	2.623	2.531	2.034	1.821
Produktivitas (Kw/Ha)	12,92	12,73	12,83	13,74	10,40

*) Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir produksi kacang kedelai di Kabupaten Tuban cenderung menurun. Produksi kacang kedelai menunjukkan selisih yang cukup jauh dari ratusan hingga ribuan ton setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas tanam kacang kedelai sehingga luas panen dan produksinya juga menurun. Dari sisi produktivitas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir produktivitas kacang kedelai mengalami pertumbuhan fluktuatif.

Pada tahun 2013 dan 2014 perbandingan produktivitas kacang kedelai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Perbandingan Produktivitas Komoditas Kacang Kedelai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional tahun 2013-2014

Uraian	2013	2014
Kabupaten Tuban (Kw/Ha)	12,83	13,74
Jawa Timur (Kw/Ha)	15,64	16,54
Nasional (Kw/Ha)	14,16	15,51

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan BPS Provinsi Jatim

Tabel diatas menunjukkan bahwa produktivitas kacang kedelai mengalami kenaikan baik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional. Peningkatan produktivitas tersebut disinyalir adanya Gerakan Penerapan pengelolaan tanaman Terpadu (GPPTT), penggunaan pupuk sesuai anjuran dan Tepat Waktu Pemupukan dan pendeteksian serangan OPT lebih dini yang dilakukan oleh petugas lapangan (PPL, POPT, dan Mantri Tani). Namun sayangnya produktivitas kacang kedelai di Kabupaten Tuban lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas di tingkat Jawa Timur dan Nasional. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tuban perlu untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya Gerakan Penerapan pengelolaan tanaman Terpadu (GPPTT), penggunaan pupuk sesuai anjuran dan Tepat Waktu Pemupukan dan pendeteksian serangan OPT lebih dini yang dilakukan oleh petugas lapangan agar produktivitas kacang kedelai di Kabupaten Tuban dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Komoditas pertanian lain yang ada di Kabupaten Tuban adalah kacang hijau. Dalam lima tahun terakhir luas panen dan produksi kacang hijau cenderung menurun, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.60
Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	7.825	5.090	4.590	3.456	2.934
Produksi (Ton)	7.829	4.108	3.439	2.482	2.188
Produktivitas (Kw/Ha)	10	8,07	7,49	7,18	7,46

*) Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir produksi kacang hijau di Kabupaten Tuban cenderung menurun. Produksi kacang hijau menunjukkan selisih yang cukup jauh yaitu hingga ribuan ton setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas tanam kacang hijau sehingga luas panen dan produksinya juga menurun. Produksi tertinggi adalah di tahun 2011 yaitu sebesar 7.829 ton.

Komoditas pertanian lain yang ada di Kabupaten Tuban adalah kacang tanah. Dalam lima tahun terakhir luas panen dan produksi kacang tanah mengalami pertumbuhan fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61
Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	29.747	30.617	29.899	26.349	28.799
Produksi (Ton)	54.222	51.063	81.836	45.447	41.599
Produktivitas (Kw/Ha)	18,23	16,68	27,37	17,29	14,43

*) Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Ubi kayu juga merupakan salah satu komoditas dari sektor pertanian di Kabupaten Tuban. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir luast tanam dan produksi ubi kayu di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	4.129	5.903	628	4.218	4.422
Produksi (Ton)	86.146	136.129	143.589	95.730	123.545
Produktivitas (Kw/Ha)	208,63	230,61	228,64	226,95	279,39

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2015

Ubi jalar merupakan salah satu tanaman pangan sektor pertanian di Kabupaten Tuban. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir luas tanam dan produksi ubi jalar di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Tuban tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Luas Panen (Ha)	671	575	373	679	0
Produksi (Ton)	75.558	12.931	15.753	13.389	5.720
Produktivitas (Kw/Ha)	112,64	224,88	422,33	197,19	0

*) Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Disamping terjadi fluktuatif peningkatan dan penurunan produksi dari berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, secara umum nilai produksi dari komoditi tanaman tersebut cukup baik. Terutama pada nilai produksi tanaman hortikultura dari tahun 2011 sampai dengan 2015 trendnya mengalami kenaikan.Adapun nilai produksi dari masing-masing komoditi tanaman pangan dan hartikultura, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Nilai Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Tuban

NO	JENIS TANAMAN	NILAI PRODUKSI (Rp) x 1000				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi	2.190.634.160	2.448.455.840	1.955.356.000	4.676.470.500	2.696.363.520
2.	Jagung	1.293.335.160	1.246.164.660	1.252.147.500	1.778.588.000	1.698.423.000
3.	Kedelai	23.299.920	16.288.830	18.967.500	16.794.000	7.677.200
4.	Kacang Tanah	359.316.960	339.058.320	793.828.600	465.568.600	229.432.500
5.	Kacang Hijau	47.262.600	24.859.450	34.380.000	47.396.000	33.660.000
6.	Ubi Kayu	153.020.000	272.258.000	100.512.300	264.635.000	159.722.400
7.	Ubi Jalar	16.183.200	42.869.200	15.573.000	39.957.000	8.209.500
	JUMLAH	4.083.052.000	4.389.954.300	4.170.764.900	7.289.409.100	4.833.488.120

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban, sebagaimana daerah lain di Jawa juga menghasilkan berbagai macam buah dan sayur. Kinerja produksi buah buhan dan sayur sayuran dapat dilihat pada tebel di bawah ini.

Tabel 2.65
Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Tuban 2011-2015 (Ton)

Jenis Buah-Buahan	Tahun (Ton)			
	2011	2012	2013	2014
Melon	27	117	51	1.041
Semangka	2.330	3.125	105	984
Blewah	1.937	5.569	1.665	941
Belimbing	1.575	1.624	1.539	1.013
Mangga	27.460	31.287	22.288	13.905
Duku	4	7	13	8
Sawo	5.126	1.148	677	607
Jambu Biji	523	434	402	461
Jambu Air	373	415	146	51
Jeruk Keprok Siam	20	16	71	149
Nangka	8.145	2.529	1.317	1.983
Pepaya	1.197	918	716	553
Pisang	297.056	4.990	383	4.197
Sirsak	28	46	33	67
Sukun	1.337	293	129	169
Rambutan	28	3	2	1,2
Salak	2	5	4	1,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010-2015, produksi buah-buahan di kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif. Secara umum mangga dan nangka adalah jenis buah yang dihasilkan dalam jumlah cukup banyak setiap tahunnya. Produksi mangga paling banyak dihasilkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 31.287 ton, namun sayangnya untuk tahun-tahun berikutnya jumlah produksi mangga menurun. Sedangkan produksi nangka paling banyak dihasilkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 8.145 ton. Data ini menunjukkan bahwa kedua jenis buah tersebut merupakan hasil pertanian yang berpotensi menjadi nilai tambah apabila dijadikan sebagai produk olahan. Selain itu data ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Tuban sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan agar jumlah produksinya dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.66
Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Tuban 2011-2015 (Ton)

Jenis Sayur-Sayuran	Tahun (Ton)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bawang Merah	49	85	32	108	480
Sawi	2	27	11	40	8
Kacang Panjang	43	250	53	116	130
Cabe Besar		8.528	3.133	14.536	-
Cabe Rawit	5.360	8.528	2.998	19.638	11.724
Jamur	0.0800	0,100	51	0,2120	1.188
Tomat	275	584	78	83	205
Terong	690	724	629	459	348
Mentimun	15	206	22	25	72
Kangkung	125	125	19	233	240
Bayam	12	12	23	34	8
Melinjo	2	8	3	1,8	10,0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2016

Sedangkan jumlah produksi sayur-sayuran di Kabupaten Tuban pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Terdapat dua belas ketegori jenis sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten Tuban, antara lain bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terong, mentimun, kangkung, bayam dan mlinjo.Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Tuban pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam lima tahun terakhir nilai produksi sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut.

Tabel 2.67
Tabel Nilai Produksi Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan di Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015

NO	JENIS TANAMAN	NILAI PRODUKSI (Rp) x 1000				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	**Sayuran**	-				
1	Bawang Merah	-	511.800	252.000	864.000	3.480.000
2	Sawi	-	52.500	59.513	45.000	15.736
3	Kacang Panjang	-	161.700	89.999	262.972	369.590
4	Cabe Besar	-	47.094.000	71.098.500	294.570.000	247.408.000
5	Cabe Rawit	-	38.266.150	41.654.090	193.241.584	293.100.000
6	Jamur	-	96.000	768.000	3.180.000	14.000
7	Tomat	-	590.625	965.911	1.408.446	714.630
8	Terong	-	1.300.140	2.062.190	1.504.602	1.200.600
9	Mentimun	-	619.200	60.861	67.925	275.976
10	Kangkung	-	187.050	21.492	251.640	288.000
11	Bayam	-	21.300	10.850	43.520	10.850
12	Melinjo	-	-	8.267	2.667	33.330
	JUMLAH	-	88.900.465	117.070.647	495.442.356	546.910.712
B	**Buah-buahan**	-				
1	Melon	-	11.712.000	1.926.144	3.664.320	5.575.535
2	Semangka	-	9.370.190	2.392.373	2.098.872	8.786.925
3	Blewah	-	11.138.000	2.897.100,00	1.637.340	3.014.802
4	Belimbing	-	11.694.000	9.011.125	5.943.271	13.253.336
5	Mangga	-	97.652.780	87.236.798	54.424.170	108.087.720
6	Duku	-	152.000	268.000	160.000	1.617.000
7	Sawo	-	3.996.952	2.936.041	2.630.131	8.676.290
8	Jambu Biji	-	1.172.755	1.487.138	1.702.012	4.278.000
9	Jambu Air	-	926.550	633.180	220.575	4.488.289
10	Jeruk Keprok Siam	-	147.520	428.400	894.000	4.396.000
11	Nangka	-	6.255.462	4.438.940	6.658.914	5.415.196
12	Pepaya	-	1.609.845	1.994.278	1.535.128	5.017.628
13	Pisang	-	15.216.590	19.133.347	20.964.015	38.000.928
14	Sirsak	-	177.612	121.320	241.200	519.200
15	Sukun	-	336.035	209.269	272.259	290.700
16	Rambutan	-	-	8.800	3.667	243.309
17	Salak	-	-	22.050	4.900	9.334
	JUMLAH	-	171.558.291	135.144.303	103.054.774	211.670.192
	TOTAL	-	260.458.756	252.214.950	598.497.130	758.580.904

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tuban, 2016

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura terus diusahakan, baik melalui optimalisasi pengolahan lahan, pengendalian hama dan penyakit maupun upaya meningkatkan perluasan areal tanam dan indeks pertanaman melalui kegiatan pengembangan sumber-sumber air pertanian pembangunan pompanisasi air sungai, perbaikan jaringan irigasi, dan pengadaan sumur bor pertanian.

Untuk mendukung dalam meningkatkan perluasan areal tanam, secara intensif dilakukan melalui kegiatan pengadaan dan pengembangan jaringan pompanisasi dan pengadaan sumur bor.Setiap unit pompanisasi air sungai dapat meningkatkan perluasan areal tanam seluas 10 Ha, sedangkan pengadaan sumur bor pertanian per unit dapat meningkatkan perluasan areal tanam seluas 2,5 Ha.

Kegiatan perluasan areal tanaman di Kabupaten Tuban tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Kegiatan Perluasan Areal Tanam di Kabupaten Tuban

No	Uraian Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pompanisasi Air Sungai	4	15	11	2	0
2.	Pengadaan Sumur Bor Pertanian	1	1	1	0	100
3.	Pengadaan Mesin Pompa Air Permukaan	0	0	0	47	120
Total Perluasan Areal Tanam (Ha)		346	455	170	170	137,5

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Tuban, 2016

Selain itu kinerja pertanian kiranya didukung oleh ketersediaan saluran irigasi. Berikut ini adalah jenis irigasi sawah yang mendukung sektor pertanian di kabupaten Tuban.

Tabel 2.69
Jenis Irigasi Sawah di Kabupaten Tuban tahun 2010-2014

Jenis Irigasi Sawah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Teknis (Ha)	10.647	10.608	14.386	30.090	27.604
Setengah Teknis (Ha)	5.124	5.833	6.616	0	0
Sederhana (Ha)	2.960	3.221	2.559	0	0
Pengairan Desa/Non PU (Ha)	6.538	6.540	5.632	0	0
Tadah Hujan (Ha)	30.207	29.265	26.948	26.285	28.870
Lebak/Polder dan Lainnya (Ha)	8	8	8	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban tahun, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis irigasi untuk pertanian di Kabupaten tuban pada tahun 2010-2014 terdiri atas irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, pengairan Desa/Non PU, tadah hujan dan lebak/polder dan lainnya. Jenis irigasi sawah terbanyak adalah tadah hujan. Namun sayangnya dalam lima tahun terakhir jumlah irigasi jenis ini mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah irigasi sawah jenis tadah hujan di Kabupaten Tuban mencapai 28.870 Ha.

Agar kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban dapat meningkat maka diperlukan suatu program pembangunan yang dapat mendorong masyarakat petani untuk mengembangkan usaha baik *on farm* maupun *off farm*, sehingga produk pertanian dapat dikelola dan diolah sehingga dapat memberikan nilai tambah sebelum dipasarkan. Selain itu juga diperlukan program pendampingan terhadap petani di Kabupaten Tuban melalui fasilitasi dan bantuan yang diberikan kepada para petani dalam menghadapi permasalah yang muncul seperti terbatasnya akses permodalan, ketergantungan terhadap tengkulak, merosotnya harga produk pertanian pada saat panen raya, kelangkaan pupuk, menurunnya kualitas tanah, serangan hama, rendahnya kualitas SDM petani di bidang pengelolaan hasil pertanian dan lain sebagainya.

Secara umum kinerja sub sektor perternakan di Kabupaten Tuban menunjukkan kinerja yang fluktuatif, baik ternak besar (sapi, sapi perah, kerbau, dan kuda) ternak kecil (kambing, domba, dan babi) maupun unggas. Salah satu penyebab kinerja fluktuatif ini adalah adanya penyakit hewan seperti anthrax, rabies dan pes. Populasi ternak di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Tuban 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sapi	312.013	314.810	311.359	314.937	324.295
Sapi Perah	1.735	1.791	1.794	443	189
Kerbau	1.993	1.993	1.840	1.875	1.448
Kuda	458	458	347	347	67

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban

Sapi merupakan jenis ternak besar yang memiliki jumlah paling banyak di Kabupaten Tuban, dibandingkan ketiga jenis lainnya. Namun sayangnya dalam lima tahun terakhir jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif. Populasi terbesar adalah pada tahun 2015 adalah sapi yaitu sebanyak 324.295 ekor. Sedangkan kuda merupakan jenis ternak besar yang memiliki populasi paling kecil. Pada tahun 2015, populasi ternak kuda di Kabupaten Tuban hanya mencapai 67 ekor. Hal

ini menunjukkan bawa perlu adanya upaya pengelolaan ternak di Kabupaten Tuban, dengan harapan jumlah populasi ternak dapat meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan populasi ternak kecil di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan sebagaiamana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Tuban 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kambing	81.041	81.708	105.639	115.623	118.797
Domba	70.261	71.144	75.402	77.288	84.972
Babi	240	250	260	300	300

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2016

Kambing merupakan populasi ternak kecil yang memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dengan dua jenis ternak lain yaitu domba dan babi. Dalam lima tahun terakhir populasi kambing terus mengalami kenaikan hingga mencapai 118.797 ekor di tahun 2015. Demikian halnya dengan domba. Pada tahun 2015 populasi domba mencapai 84.972 ekor sedangkan populasi babi tetap yaitu 300 ekor.

Sedangkan populasi unggas Kabupaten Tuban pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Populasi Unggas di Kabupaten Tuban 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ayam Buras	826.341	826.988	1.005.860	1.243.668	1.312.880
Ayam Petelur	168.752	170.960	101.405	155.918	192.475
Ayam Ras	942.700	944.950	1.159.545	9.351.071	10.632.108
Entog	36.422	36.606	80.593	81.189	175.870
Itik	33.951	34.644	65.777	70.587	58.900

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa, populasi unggas di Kabupaten Tuban di bagi kedalam lima kategori antara lain, ayam buras, ayam petelur, ayam ras, entog dan itik. Dalam lima tahun terakhir jumlah populasi unggas cenderung mengalami kenaikan kecuali jenis ayam petelur yang sempat mengalami penurunan ditahun 2013, namun kembali naik di tahun 2015, dan itik juga sempat mengalami penurunan di tahun 2015. Jumlah populasi ternak jenis ayam buras paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.312.880 ekor, sedangkan paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 826.341 ekor. Jumlah populasi ayam petelur paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 192.475 ekor, sedangkan jumlah populasi terkecilnya adalah pada tahun 2013

yang mencapai 101.405 ekor. Jumlah ayam ras terbesar adalah pada tahun 2015 yang mencapai 10.632.108 ekor. Jumlah entog terbesar adalah pada tahun 2015 yaitu mencapai 175.870 ekor. Sedangkan jumlah populasi itik terbesar adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 70.587 ekor.

Sedangkan perbandingan populasi peternakan Jawa Timur dan Kabupaten Tuban pada tahun 2013, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Perbandingan Populasi Peternakan Jawa Timur
dan Kabupaten Tuban 2013

Jenis Ternak	Populasi ternak di Jawa Timur (ekor)	Populasi Ternak di Kabupaten Tuban (ekor)
Ternak besar	4.225.469	315.339
Ternak kecil	4.169.542	181.301
Unggas	134.321.624	2.413.180

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka 2013

Data diatas menunjukkan bahwa, populasi peternakan di Jawa Timur dan Kabupaten Tuban pada tahun 2013 dibagi kedalam tiga kategori. Yang pertama adalah ternak besar. Pada tahun 2013, populasi ternak besar di Jawa Timur adalah sebanyak 4.225.469 ekor, sedangkan populasi ternak di Kabupaten Tuban adalah sebesar 315.339 ekor. Populasi ternak kecil di Jawa timur adalah sebesar 4.169.542 ekor, sedangkan populasi ternak kecil di Kabupaten Tuban adalah sebesar 181.301 ekor. Dan populasi unggas di Jawa Timur adalah sebesar 134.321.624 ekor, sedangkan populasi unggas di Kabupaten Tuban adalah sebesar 2.413.180 ekor. Jika di bandingkan dengan jumlah populasi di Jawa Timur maka jumlah populasi peternakan di Kabupaten Tuban cukup rendah. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan produksi peternakan di Kabupaten Tuban agar jumlah produksi dan populasi ternak di tahun-tahun berikutnya dapat meningkat.

Sedangkan untuk sektor perkebunan, di Kabupaten Tuban sektor perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan terkait pula dengan upaya untuk membuka kesempatan kerja, peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri serta pemerataan pembangunan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering yang ada. Dalam hal ini komoditas perkebunan yang telah diupayakan perkembangannya antara lain

kelapa, jambu mente, tebu dan tembakau. Hasil perkebunan di Kabupaten Tuban dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.74
Perkembangan Hasil Komoditas Perkebunan di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015

NO	Komoditi	NILAI PRODUKSI (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelapa	12.658	13.875	10.785	8.261	7.848
2	Jambu Mete	1.534	1.466	434	508	493
3	Tebu (Ton Tebu)	75.725	97.500	96.519	101.79	78.712
4	Tembakau (Ton Daun Basah)	14.410	14.904	5.312	13.763	17.288

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa komoditi perkebunan yang telah dikembangakan terdiri atas kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Secara umum produksi kelapa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tingginya tingkat serangan hama kwangwung pada Kawasan Sentra Produksi Kelapa (KSP). Sedangkan produksi tebu di tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan karena terjadi penurunan harga gula sehingga menyebabkan luas areal tebu menurun yang pada akhirnya terjadi penurunan total produksi tebu. Sedangkan komoditas Tembakau mengalami peningkatan produksi, karena harga tembakau cukup bagus sehingga mendorong petani tembakau untuk menanam tembakau dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan produksi tembakau.

Sedangkan jumlah nilai produksi dari komoditas perkebunan tersebut pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Nilai Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tuban tahun2011-2015

NO	KOMODITI	NILAI PRODUKSI (Rp) x 1000				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelapa	379.740.000	416.250.000	323.550.000	247.830.000	255.060.000
2	Jambu Mete	9.204.000	8.796.000	2.604.000	3.048.000	5.916.000
3	Tebu Basah	26.503.750	34.125.000	33.781.650	35.612.150	35.420.400
4	Tembakau (Daun Basah)	18.012.500	18.630.000	6.640.000	17.203.750	34.576.000
	JUMLAH	433.460.250	477.801.000	366.575.650	303.693.900	330.972.400

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, 2016

2.3.2.2. Kehutanan

Bidang kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan dalam pembangunan jangka menengah daerah. Dalam empat tahun terakhir nilai produksi hasil hutan di

Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai produksi hutan Negara mencapai Rp.21.817.123.400,-. Nilai produksi ini menurun dari tahun sebelumnya (2014) yang mencapai Rp.31.294.619.450,-. Perkembangan nilai produksi hasil hutan di Kabupaten Tuban tahun 2012-2015 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

Gambar 2.2.
Diagram Perkembangan Nilai Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Tuban Tahun 2012-2015

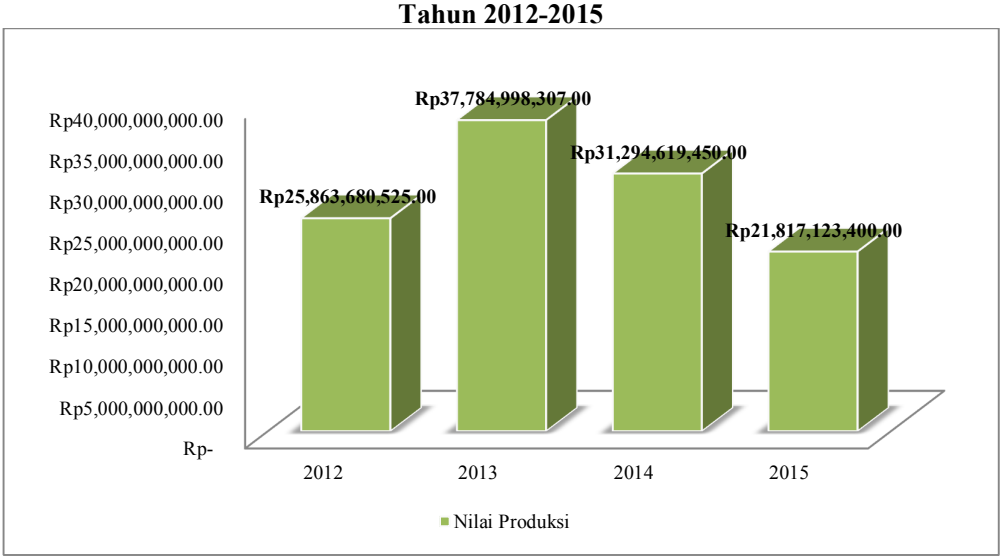

Sumber Dinas Pertanian, 2016

Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan nilai produksi hasil hutan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.37.784.998.307, meningkat dari nilai produksi di tahun sebelumnya. Namun sayangnya di tahun 2014 dan 2015 nilai produksi hasil hutan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan.

Pertumbuhan nilai produksi tersebut berasal dari beberapa komoditi, antara lain jati, mahoni dan sonobrit, kayu bulat lain, sono keeling, rimba campur, kayu bakar dan daun kayu putih. Berikut ini rincian nilai produksi hasil hutan di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015.

Tabel 2.76
Nilai Produksi Hail Hutan (Hutan Negara/Perhutani)

NO.	KOMODITI	NILAI PRODUKSI (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jati A 1	-	2.771.149.000	7.777.834.000	6.967.886.000	5.124.139.000
2	Jati A 2	-	2.786.148.000	5.852.119.500	5.831.275.500	4.127.902.500
3	Jati A 3	-	16.662.350.000	21.323.850.000	16.912.200.000	11.549.450.000
4	Jati KBP A1	-	62.000.000	75.404.000	61.998.000	33.657.000
5	Jati KBP A2	-	366.598.500	374.760.000	195.544.500	168.931.500
6	Jati KBP A3	-	2.228.100.000	1.875.600.000	900.825.000	556.777.500
7	Jati C 1	-	32.388.000	31.066.100	21.700.000	11.170.000
8	Jati C 3	-	45.125.000	30.884.000	1.805.000	895.000
9	Mahoni dan Sonobrit A 1	-	17.928.000	22.984.000	17.422.000	11.582.000
10	Mahoni dan Sonobrit A 2	-	69.777.600	68.169.600	45.590.400	32.499.200
11	Mahoni dan Sonobrit A 3	-	171.465.000	228.233.600	188.563.200	47.840.000
12	Mahoni & Sonobrit C 1	-	67.400	15.126	16.800	-
13	Mahoni & Sonobrit C 3	-	228.197.000	193.200	-	-
14	Kayu Bulat Lain A1	-	235.354.000	19.920.000	6.732.000	1.515.000
15	Kayu Bulat Lain A2	-	129.697.600	12.111.400	6.609.400	578.200
16	Kayu Bulat Lain A3	-	954.800	656.000	209.600	2.136.000
17	Kayu Bulat Lain C1	-	434.000	58.472	-	-
18	Sono Keling A1	-	-	6.222.000	10.926.000	4.005.000
19	Sono Keling A2	-	-	16.596.000	11.466.000	15.420.000
20	Sono Keling A3	-	-	450.000	5.454.000	2.727.000
21	Rimba Camp A1	-	954.800	428.400	3.833.900	426.300
22	Rimba Camp A2	-	434.000	313.000	16.044.000	611.000
23	Rimba Camp A3	-	16.684.640	5.623.800	19.338.200	5.037.200
24	Rimba Campur C1	-	778.400	23.324	-	-
25	Kayu Bakar	-	1.125.000	-	315.000	144.000
26	Daun Kayu Putih	-	37.358.585	-	68.864.950	119.680.000
	Jumlah	-	25.863.680.525	37.784.998.307	31.294.619.450	21.817.123.400

Sumber: Dinas Pertanian

Pada tahun 2012 hingga tahun 2015, komoditas yang memiliki nilai produksi tertinggi adalah Jati A 3. Pada tahun 2012 nilai produksi komoditas jati A 3 mencapai Rp.16.662.250.000 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 hingga mencapai nilai produksi Rp. 21.323.850.000. Namun sayangnya dua tahun berikutnya nilai produksi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya komoditas Jati A 3 merupakan komoditas yang berpotensi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tuban karena memiliki nilai produksi yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan nilai produksi hasil hutan rakyat di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Nilai Produksi Hasil Hutan Rakyat di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

NO	KOMODITI	NILAI PRODUKSI (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jati A 1	-	2.740.747.600	2.103.112.800	1.388.400.000	1.073.600.000
2	Jati A 2	-	2.466.672.840	1.314.445.200	1.179.800.000	1.288.320.000
3	Jati A 3	-	2.740.747.600	1.314.446.000	1.501.900.000	1.073.600.000
	Jumlah	-	7.948.168.040	4.732.004.000	4.030.100.000	3.435.520.000

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

Hasil hutan rakyat di Kabupaten Tuban berasal dari tiga komoditi yaitu Jati A 1, Jati A 2, dan Jati A 3. Tahun 2012-2015 jumlah nilai produksi hasil hutan rakyat di Kabupatan Tuban mengalami penurunan setiap tahunnya. Hingga tahun 2015 nilai produksi hasil hutan rakyat hanya mencapai Rp.3.435.520.000, menurun sebesar 56,7% dalam empat tahun terakhir.

Penyebab menurunnya nilai produksi hasil hutan baik hasil hutan Negara/perhutani maupun hutan rakyat adalah karena adannya lahan kritis, dan kerusakan kawasan hutan. Di Kabupaten Tuban, sampai dengan tahun 2015 terdapat lahan kritis seluas 42.110 Ha. Di tahun 2009, berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, di Kabupaten Tuban terdapat lahan kritis seluas 54.484 Ha. Sampai dengan tahun 2015, lahan kritis yang telah tertangani adalah seluas 12.374 Ha atau 22,7%. Sedangkan kerusakan kawasan hutan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Target dan Capaian Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

Tahun	Capaian (%)
2011	0,30
2012	0,28
2013	0,08
2014	0,19
2015	0,11

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

Dalam lima tahun terakhir kerusakan hutan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,19%. Namun sayangnya presentase kerusakan hutan sempat mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 0,19% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,08%.

Untuk mengatasi kerusakan hutan maka dilakukan program rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan dan Konservasi. Program konservasi dan penghijauan

dilakukan melalui empat kegiatan yaitu pembangunan hutan rakyat, pembuatan truk, penghijauan pantai dan penghijauan lingkungan turus jalan, sebagaimana dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Gambaran Kegiatan Penghijauan dan Konservasi

No	Uraian Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan Hutan Rakyat (Ha.)	680	325	-	55	513
2	Pembuatan Trucuk (M)	70	370	258	180	-
3	Penghijauan Pantai (Ha.)	3,2	4,8	-	2,4	-
4	Penghijauan Lingkungan Turus Jalan					
	- Jumlah Bibit (Batang)	33.322	31.380	-	15.000	17.500
	- Panjang Jalan yang dihijaukan (km)	75,25	65,00	-	37,50	43,80

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam merehabilitasi lahan kritis dan kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.80
Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis Tahun 2011-2015

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	(+/-)
2011	5,54	3,53	-2,01
2012	5,80	7,14	1,34
2013	6,06	8,48	2,42
2014	6,34	10,69	4,35
2015	6,62	11,34	4,72

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

Dalam lima tahun terakhir capaian program dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis melampau target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 11,24%. Dalam lima tahun terakhir capaian program dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis meningkat sebesar 7,81%. Diharapkan adanya gerakan yang lebih bedar dan lebih nyata dalam penanganan lahan kritis agar ditahun-tahun berikutnya lahan kritis di Kabupaten Tuban semakin berkurang.

Dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tuban mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tuban mencapai Rp 52.951.000.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp Juta)	Capaian (Rp Juta)	(+/-)
2011	47.945	48.707	762
2012	48.904	49.910	1.006
2013	49.882	52.391	2.509
2014	50.880	52.951	2.071
2015	51.897	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Tuban memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Potensi pertambangan hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Potensi ini dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negative bagi Kabupaten Tuban. Dampak positifnya adalah dapat menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban, sedangkan dampak negatifnya adalah menurunnya kualitas lingkungan apabila kegiatan pertambangan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan urusan energi sumberdaya mineral khususnya Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Bawah Tanah serta Listrik Pedesaan adalah Dinas Pertambangan dan Energi.

Berdasarkan Peta Potensi Bahan Galian Golongan C tahun 2001 yang pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan ITS Surabaya, Kabupaten Tuban memiliki potensi tambang berupa tanah liat dan batu kapur yang cukup besar. Selain itu Kabupaten Tuban juga memiliki potensi minyak bumi, namun sayangnya depositnya belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan penelitian secara meneluruh. Saat ini terdapat dua perusahaan minyak yang ada di Kabupaten Tuban yaitu JOB-PETROCHINA dan PERTAMINA EP CEPU.

Perkembangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Produksi Pertambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
I.	**EKSPLOITASI**					
	1. PT. SEMEN DWIMA AGUNG					
	a. Batu Kapur	10.707.840	12.519.366	-	200.917	1.343.114
	b. Tanah Liat	2.588.686	3.525.498	-	24.562	314.272
	2. PT. SEMEN GRESIK Tbk					
	a. Batu Kapur	32.485,15	59.332	14.080.835	14.321.457	13.441.335
	b. Tanah Liat	-	-	3.731.528	3.415.579	3.175.072
	3. SUPLAYER di PT. SEMEN GRESIK Tbk.					
	a. Pasir Kwarsa	241.205,5	210.392	-	-	-
	b. Tanah Liat	365.513	976.088	-	-	-
	4. NON PT. SEMEN GRESIK Tbk	50.549	103.279			
	a. Batu Kapur	5.575	2.629	252.443	165.538	142.782
	b. Pedel	201.658,58	234.944	820.679	518.456	522.242
	c. Ballclay	695	743	117.582	130.560	133.764
	d. Dolomit	53.165	16.370	4.130	220.452	168.012
	e. Pasir Kuarsa			231.036	-	-
	f. Phospat	40.490	-	618	198	162
	g. Tanah Urug	18.756	-	118.536	107.178	18.030
II.	**PENGOLAHAN**	29.523	-			
	a. Batu Kapur	9.045	-	144.650		
	b. Dolomit	170	-	-		
	c. Pasir Kuarsa			43.270,97		
	d. Phospat			3.828,83		
	e. Ball Clay			-		

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan eksploitasi bahan galian yang pertama dilakukan oleh PT. Semen Dwima Agung. Perusahaan ini mengeksploitasi batu kapur dan tanah liat. Dalam lima tahun terakhir produksi pertambangan dan tanah liat yang dieksploitasi oleh perusahaan ini mengalami kenaikan fluktuatif. Produksi terbesar batu kapur dan tanah liat dihasilkan pada tahun 2012. Kedua adalah eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Semen Gersik Tbk. Perusahaan ini mengeksploitasi batu kapur dan tanah liat. Produksi pertambangan terbesar adalah pada tahun 2014. Sedangkan produksi tanah liat terbesar adalah pada tahun 2013. Ketiga adalah eksploitasi yang dilakukan oleh Suplayer di PT. Semen Gersik, Tbk. Perusahaan ini mengeksploitasi pasir kwarsa dan tanah liat namun hanya dilakukan pada tahun 2011-2012. Keempat adalah eksploitasi yang dilakukan oleh Non PT. Semen Gersik Tbk yang meneksploitasi batu kapur, pedel ballclay, dolomite, pasir kwarsa,

phospat dan tanah urug. Sedangkan jenis bahan galian yang diolah antara lain batu kapur, dolomite, pasir kuarsa, phospat dan ball clay.

Dalam lima tahun terkahir luas areal ekploitasi bahan galian tambang bahan mineral bukan logam dan batuan mengalami perkembangan fluktuatif sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.83
Perkembangan Luas Areal Eksploitasi Tambang Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Jenis Bahan Galian	Tahun/Ha 2011	Tahun/Ha 2012	Tahun/Ha 2013	Tahun/Ha 2014	Tahun/Ha 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Pedel/Tanah Urug	2,191	2,191	7,781	6,8876	7,781
2	Ballclay	2,127	2,679	2,67965	3,82495	1,1453
3	Tanah Liat	526,491	459,788	459,7884	460,7093	600,3121
4	Pasir Kuarsa	1.329,886	19,275	1.330,9897	1.341,1366	25,6703
5	Dolomit	-	-	0,724	-	-
6	Batu Gamping/Kapur	1.117,360	1.579,55	1.570,8189	1.583,6889	1.575,2972
7	Trass	-	-	-	-	-
8	Phospat	1,256	-	0,7198	0,7198	-
9	Clay	-	140,799	-	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi

Dalam lima tahun terakhir perkembangan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) mengalami kenaikan fluktuatif sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)

No.	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pedel/Tanah Urug	3	-	9	-	-
2	Ballclay	6	-		2	-
3	Tanah Liat	3	5	5	3	-
4	Pasir Kuarsa	25	7	26	18	-
5	Dolomit	-	-		-	-
6	Batu Gamping/Kapur	24	4	24	10	-
7	Trass	-	-	-	-	-
8	Phospat	8	-	1	-	-
9	Clay	-	1	4	1	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi

Demikian halnya dengan jumlah surat izin pemanfaatan air bawah tanah dalam lima tahun terakhir yang juga mengalami perkembangan fluktuaitif sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Perkembangan Izin Usaha Permanfaatan Air Bawah Tanah

No.	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	S I P P A T	-	-	-	-	-
	(Surat Ijin Perusahaan Pengambilan Air Bawah Tanah)	2	1	-	-	-
2.	S I P A	5	4	-	4	-
	(Surat Ijin Pengambilan Air BawahTanah)	8	15	11	11	-
3.	S I J B	-	-	-	-	-
	(Surat Ijin Juru Bor)	2	1	-	-	-
4.	S I P	3	-	-	5	-
	(Surat Ijin Pengeboran)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

Sedangkan untuk potensi energi listrik saat ini telah dikembangkan pemerataan penyediaan listrik bagi desa/dusun yang belum teraliri listrik, melalui bantuan pembangunan jaringan listrik pedesaan. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 108 desa/dusun yang diberi bantuan pembangunan jaringan listrik pedesaan. Namun mulai tahun 2014 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan sudah diambil alih oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sedangkan perkembangan konsumsi bahan bakar per kapita per hari adalah tetap, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Perkembangan Konsumsi Bahan Bakar Per Kapita Per Hari

Jenisn Bahan Bakar	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Bensin (liter)	1	1	1	1
Minyak Tanah (liter)				
Solar (liter)	5	5	5	5
BBG (liter)				
Elpiji (kg)	0,3	0,3	0,3	0,3

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

Dalam lima tahun terakhir capaian indikator kinerja bidang energi dan pertambangan di Kabupaten Tuban mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui tercapainya target yang telah ditetapkan baik dalam indikator terpenuhinya disiplin aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas, tersedianya data daerah sulit air, terwujudnya pembinaan dan pendawasan bidan tambang, serta terwujudnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Bidang Energi dan Pertambangan
Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun	Target	Capaian	(+/-)
1	Terpenuhinya Disiplin Aparatur dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	%	2011			
			2012			
			2013	100	100	
			2014	100	100	
			2015	100	100	
2	Tersedianya Data Daerah Sulit Air	%	2011			
			2012			
			2013	100	100	
			2014	100	100	
			2015	100	100	
3	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Tambang	%	2011	100	100	
			2012	100	100	
			2013	100	100	
			2014	100	100	
			2015	100	100	
4	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan	%	2011			
			2012			
			2013		100	
			2014	100	100	
			2015	100		

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

2.3.2.4. Pariwisata

Kabupaten Tuban memiliki lima obyek wisata utama yang memberikan kontribusi dalam perkembangan PAD pada tahun 2011-2015 diantaranya obyek wisata Goa akbar, Pemandian Alam Baktiharjo, pantai BOOM, Terminal Wisata Tuban, dan Air Panas Prataan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata khususnya Tempat Wisata secara umum pada tahun 2011 - 2015 telah mencapai target yang ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.88
Perkembangan Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Retribusi Goa Akbar	313.722.000	504.737.000	500.012.000	485.031.000	484.026.000
2	Retribusi Pemandian Alam Bektiharjo	183.355.000	241.209.000	249.250.000	271.794.000	276.623.000
3	RetribusiPantai BOOM	195.000.000	199.200.000	207.000.000	268.131.500	352.341.000
4	Retribusi Terminal Wisata Tuban	14.994.000	13.779.500	18.300.000	15.187,500	10.055.000
5	Retribusi Air Panas Prataan	18.520.170	20.195.930	28551090	32.989.220	60.441.060
	Jumlah	725.581.170	979.121.430	974.562.000	1.073.133.220	1.183.486.060

Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 2015

Selain kelima obyek wisata tersebut, terdapat beberapa obyek wisata lain yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan penghasilan masayarakat sekitar di Kabupaten Tuban, antara lain Makam Sunan Bonang (dikelola oleh yayasan), Makam Ibrahim Asmoro Qondi (dikelola oleh yayasan), Goa Ngerong (dikelola Desa),Air Terjun

Nglirip, Pantai Sowan,Makam Syeh Maulana Magribi Gedung Ombo Semanding (dikelola Yayasan),Makam Barat Ketigo Prunggahan Wetan Semanding (dikelola Yayasan),Mangrove Center, Pantai Kelapa danPantai Sugiwaras.

Sampai saat ini bidang pariwisata dan kebudayaan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menarik jumlah wisatawan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang daya tarik wisata, pengembangan potensi pariwisata baru, peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah, serta pembinaan, pengembangan dan fasilitasi bidang seni dan budaya daerah sebagai daya dukung dalam menarik wisatawan sekaligus sebagai upaya dalam melestarika kearifan lokal.

Dalam lima tahun terakhir Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan fluktuatif, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.89
Jumlah Kunjungan Wisatawan di kabupaten Tuban tahun 2011-2015

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Wisatawan						
• Nusantara (*)	Org	5.071.796	3.889.459	3.290.253	3.643.614	4.772.288
• Mancanegara	Org	-	-	250	572	566

*Perkembangan Jumlah Wisatawan dihitung berdasarkan jumlah pengunjung Goa Akbar, Pemandian Alam Bektiharjo, Goa Ngerong, Prataan, dan peziarah Makam Sunan Bonang, Makam Ibrahim Asmoro Qondi, Makam Sunan Bejagung.
Sumber : Dinas Perekonomian dan Pariwisata

Dalam lima tahun terakhir perkembangan jumlah kunjungan pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90
Kunjungan Pariwisata dan Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Tuban terhadap PDRB Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun	Target	Capaian	(+/-)
1	Kunjungan Wisata	%	2011	10	239,20	229,20
			2012	20	268,05	248,05
			2013	30	272,90	242,90
			2014	40	290,36	250,36
			2015	40	229,89	179,89
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Thd PDRB	%	2011	0,25	0,21	-0,04
			2012	0,25	0,22	-0,03
			2013	0,25	0,22	-0,03
			2014	0,25	0,23	-0,02

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata

Data diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir target kunjungan wisata mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Dan capaian kunJungan wisata selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya jumlah kunjungan wisata selalu mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir untuk setiap tahunnya, meskipun capaian mengalami pertumbuhan fluktuatif. sedangkan target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah tetap. Namun sayangnya meskipun capain kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami kenaikan namun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Tuban memiliki potensi cukup beragam di bidang perikanan dan kelautan. Untuk pengembangan potensi tersebut, maka salah satu urusan yang menjadi kewenangan di Kabupaten Tuban adalah urusan perikanan dan kelautan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban. Kabupaten ini memiliki wilayah perairan laut sepanjang 65 km meliputi Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang. Selain itu juga terdapat wilayah perairan darat berupa: tambak, sawah tambak, kolam, karamba, jaring apung dan beberapa sungai yang salah satunya adalah Sungai Bengawan Solo yang melewati Kabupaten Tuban.

Dalam sektor perikanan Tuban, didukung oleh produksi ikan. Dilihat dari perkembangannya produksi ikan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berikut ini adalah produksi perikanan di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir (tahun 2011-2015).

Gambar. 2.2. Produksi Ikan di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015

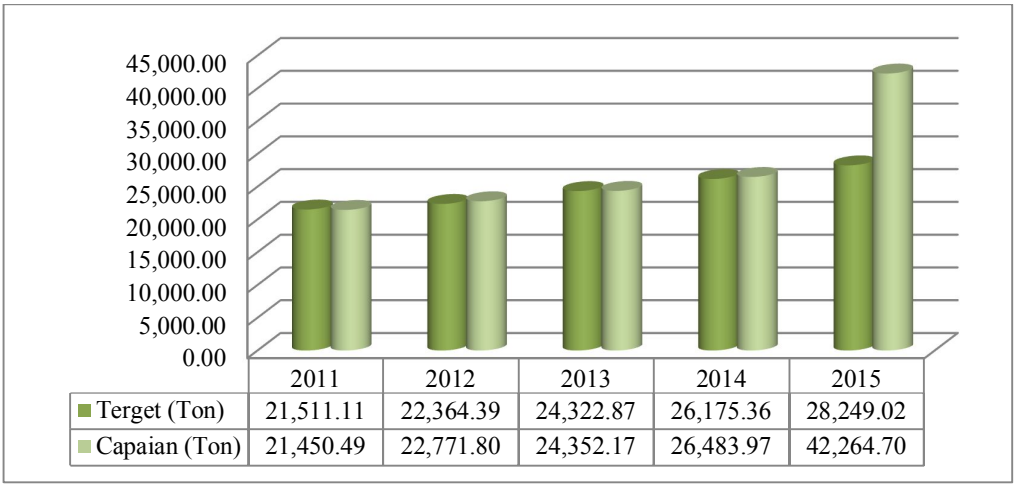

	2011	2012	2013	2014	2015
Terget (Ton)	21,511.11	22,364.39	24,322.87	26,175.36	28,249.02
Capaian (Ton)	21,450.49	22,771.80	24,352.17	26,483.97	42,264.70

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016

Sedangkan perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir fluktuatif sebagaimana dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar. 2.3. Perkembangan Konsumsi Ikan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

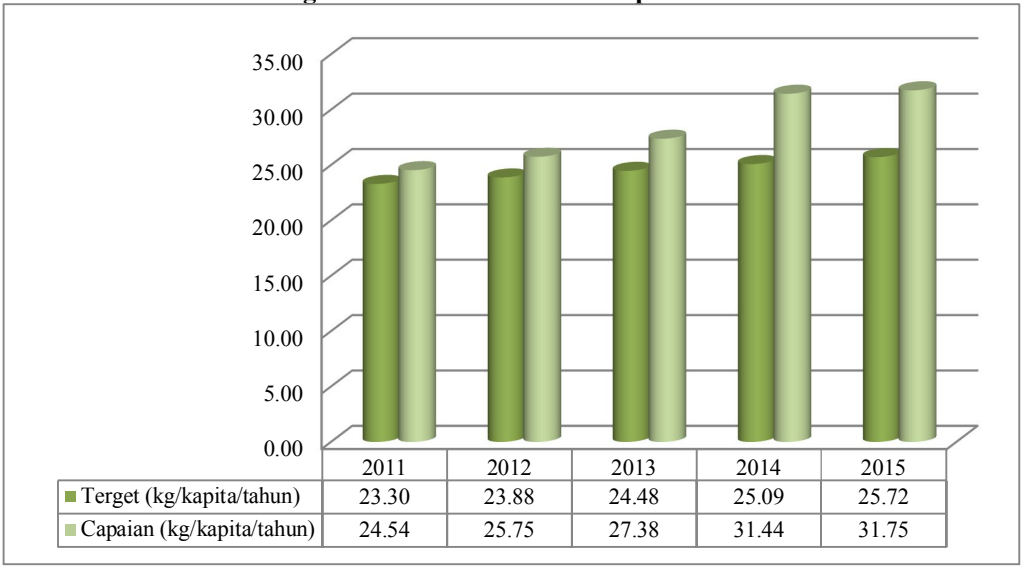

	2011	2012	2013	2014	2015
Terget (kg/kapita/tahun)	23.30	23.88	24.48	25.09	25.72
Capaian (kg/kapita/tahun)	24.54	25.75	27.38	31.44	31.75

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016

Namun sayangnya dalam lima tahun terakhir cakupan bina kelompok nelayan mengalami pertumbuhan fluktuatif, sedangkan produksi perikanan kelompok nelayan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kabupaten Tuban

No	Uraian	Satuan	Tahun	Target	Capaian	(+/-)
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	2011	102	102	0
			2012	85	110	25
			2013	85	148	63
			2014	95	315	220
			2015	105	116	11
2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	2011	5.010,72	5.080,15	69,43
			2012	5.372,08	5.397,09	25,01
			2013	5.743,16	5.750,08	6,92
			2014	6.124,17	6.131,65	7,48
			2015	6.515,31	6.762,35	247,04

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016

2.3.2.6. Perdagangan

Dalam sektor perdagangan pemerintah Kabupaten Tuban berupaya untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan usaha di bidang perdagangan melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang semakin sehat serta mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen. Pada tahun 2015 jumlah usaha dagang formal di Kabupaten Tuban mencapai 876 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 3.504 orang. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat dari nlai investasi usaha dagan, dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 nilai investasi usaha dagang mencapai Rp.25.857.000.000,-, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.92
Perkembangan Sub Sektor Perdagangan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jml. Usaha dagang Formal	Unit	935	1.061	854	993	876
2.	Jml. Penyerapan tenaga kerja	Org.	4.032	4.894	3.843	4.074	3.504
3.	Nilai investasi usaha dagang,	JutaRp.	19.505	22.255	24.255	24.983	25.857

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, 2016

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir realisasi pendapatan dari hasil retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sektor perdagangan mampu memberikan kontribusi sebesar Rp.3.488.281.455,- terhadap PAD Kabupaten Tuban. Target dan realisasi pendapatan dari hasil reribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.93
Target dan Realisasi Pendapatan Dari Hasil Reribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Tuban

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2011	1.966.195.103	1.889.084.534	96,59
2.	2012	2.675.025.200	2.934.737.855	109,71
3.	2013	3.225.000.000	3.209.295.630	99,51
4.	2014	3.256.000.000	3.304.935.080	101,50
5	2015	3.261.258.000	3.488.281.455	106,96

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

Sedangkan capaian indikator bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Tahun	Target	Capaian	(+/-)
1	Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB ADHK	%	2011	18,15	0,13	-2,32
			2012	18,40	15,83	-2,57
			2013	18,65	18,39	-0,26
			2014	18,90	16,17	-2,63
			2015	19,15	18,37	-0,78
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	2011	55	60	5
			2012	60	65	5
			2013	65	67	2
			2014	70	74	4
			2015	75	77	2
3	Jumlah Pameran/ekspor produk unggulan dilaksanakan pertahun	Kali	2011	2	2	0
			2012	2	7	5
			2013	2	8	6
			2014	2	8	6
			2015	2	5	3
4	Omset penjualan komoditas unggulan	Milyar	2011	3.450	3.501	51
			2012	3.625	3.685	60
			2013	3.800	4.225	425
			2014	3.975	4.816	841
			2015	4.150	5.022	907
5	Peningkatan Fasilitas pasar Daerah dan tradisional	%	2011	10	60	50
			2012	20	65	45
			2013	30	73	43
			2014	40	75	35
			2015	50	80	30

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ADHK dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir selalu dapat melampaui target yang telah ditetapkan. dalam lima tahun terakhir kegiatan pameran/ekspor produk unggulan telah dilaskanakan setiap tahunnya. Sedangkan untuk omset penjualan komoditas unggulan, dalam lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Demikian halnya dengan peningkatan fasilitas pasar daerah dan tradisional.

2.3.2.7 Perindustrian

Dalam Lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015, jumlah industri di Kabupaten Tuban berdasarkan jenis dan unitnya terus mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Jumlah industri berdasarkan Jenis dan Unitnya
di Kabupaten Tuban tahun 2011-2015

Jenis/Unit	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
IHPK	**342**	**345**	**349**	**348**	**356**
>Industri Kecil	333	336	337	337	338
>Industri Menengah	9	9	10	10	17
>Industri Besar	-	-	1	1	1
ILMK	**127**	**139**	**142**	**146**	**147**
>Industri Kecil	114	114	115	115	115
>Industri Menengah	19	20	21	25	26
>Industri Besar	4	5	6	6	6
Industri Aneka (IA)	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
>Industri Kecil	3	3	3	3	3
>Industri Menengah	1	1	1	1	1
>Industri Besar	-	-	-	-	-
Jumlah	**473**	**488**	**495**	**498**	**507**

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata, 2016

Industri di Kabupaten Tuban terdiri atas tiga jenis yaitu IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan), ILMK (Industri Logam, Mesin dan Kimia), dan IA (Industri Aneka). Ketiga industri tersebut masing-masing terbagi atas tiga unit yaitu industri kecil, menengah dan besar. Dalam lima tahun terakhir jumlah ketiga jenis industri tersebut mengalami kenaikan sebanyak 34 industri. Selain itu data diatas menunjukkan bahwa sektor industri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri hasil pertanian dan kehutanan, karena jenis industri ini memiliki jumlah terbanyak diantara jenis industri lainnya. Sedangkan jumlah tenaga kerja industri formal yang terserap dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Industri Formal tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	**IHPK**	**16.498**	**16.512**	**18.452**	**18.452**	**20.386**
	- Industri Kecil	16.155	16.169	16.177	16.177	16178
	- Industri Menengah	343	343	365	365	2298
	- Industri Besar	-	-	1.910	1.910	1.910
2.	**ILMK**	**5.157**	**2.085**	**5.495**	**5.732**	**5752**
	- Industri Kecil	1.470	1.470	1.472	1.472	1.472
	- Industri Menengah	608	615	642	879	899
	- Industri Besar	3.079	3.302	3.381	3.381	3.381
3.	**Industri Aneka (IA)**	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**
	- Industri Kecil	203	203	203	203	203
	- Industri Menengah	196	196	196	196	196
	- Industri Besar	-	-	-	-	-
Jumlah :		**22.054**	**18.996**	**24.346**	**24.583**	**26.537**

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada industri kecil yang bergerak di bidang IHPK, dimana pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 18.452 orang tenaga kerja, pada tahun 2015 penyerapannya tenaga kerja menjadi 20.386 orang. Penyerapan tenaga kerja industri kecil pada kelompok Industri Logam, Kimia dan Mineral pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 5.732 orang, sedangkan di tahun 2015 penyerapan tenaga kerja 5.752 orang. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada industri kecil dan industri menengah pada kelompok industri aneka dimana pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 399 orang tenaga kerja, pada tahun 2015 penyerapannya tenaga kerja tetap 399 orang.

Untuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga, jumlah perusahaan, tenaga kerja, biaya dan nilai industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Tuban pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Biaya dan Nilai Industri Kecil Dan Rumah Tangga di Kabupaten Tuban yang Mimiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin pada Tahun 2014

Uraian	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin	Jumlah
Jumlah Perusahaan	498	15.684	16.182
Jumlah Tenaga Kerja	7.662	38.657	46.319
Biaya Produksi (Rp.000)	381.863.440	237.595.409	619.458.849
Nilai Produksi (Rp.000)	1.036.741.559	389.686.749	1.426.428.308

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 16.182 perusahaan yang termasuk kedalam industri kecil dan industri rumah tangga di Kabupaten Tuban yang menyerap tenaga kerja sebanyak 46.319 orang. Dari semua perusahaan tersebut terdapat 498 perusahaan yang memiliki izin dan 15.684 perusahaan yang tidak memiliki izin. Meskipun industri yang memiliki izin memiliki jumlah yang lebih sedikit jika di bandingkan dengan industri yang tidak memiliki izin, namun nilai produksi yang didapatkan pada tahun 2014 jauh lebih besar. Apabila industri-industri tersebut terus dikembangkan maka akan memberikan potensi yang lebih besar untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Tabel 2.98
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil di kabupaten Tuban 2009-2013

Jenis Industri	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kupas Kacang	41	41	41	41	41
Rajang Tembakau	19	19	19	19	70
Bata & Genteng	8	8	8	8	335
Pembakaran Gamping	22	22	22	22	61
Kayu dan Mebel	158	160	165	168	807
Makanan Lain	37	39	43	42	3.664
Es	4	4	4	2	10
Pasir Kwarsa	7	7	8	7	36
Tegel	14	14	14	3	3
Rokok	6	19	19	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2016

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah industri kecil di Kabupaten Tuban tahun 2009-2013 bermacam-macam, terdapat jenis industri yang mengalami pertumbuhan stagnan yaitu industri jenis kupas kacang, mengalami kenaikan jumlah seperti industri Rajang tembakau, bata dan genteng, pembakaran gamping, kayu dan mabel. Selain itu terdapat industri yang mengalami pertumbuhan fluktuatif seperti industri makanan lain, es dan pasir kwarsa. Serta terdapat industri yang mengalami penurunan yaitu industri tegel dan rokok.

Tabel 2.99
Pertumbuhan Jumlah Industri Kerajinan Rumah Tangga
di kabupaten Tuban 2009-2013

Jenis Industri	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Batik	667	697	730	730	1.484
Pande Besi	205	200	200	200	200
Barang dari Tanah Liat	1.407	1.407	1.407	1.407	1.433
Jaring/Jala	825	825	825	825	866
Bordir	-	-	-	-	38
Tenun	231	251	251	251	261
Tempe	580	651	651	651	1.518
Anyam Lontar	149	149	149	149	151
Gula Siwalan	505	398	398	398	402
Rembulung	157	157	133	133	133
Bambu	2.240	2.240	2.240	2.240	2.305
Pandan	985	954	954	954	1.057
Sepet	17	17	17	17	18
Konfeksi	-	-	-	-	50

Sumber :BPS Kabupaten Tuban 2016

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat empat belas jenis industri kerajinan rumah tangga di Kabupaten Tuban yang terdiri atas batik, pande besi, barang dari tanah liat, jariang/jala, border, tenun, tempe, anyam lontar, gula siwalan, rembulung, bamboo, pandan, sepet dan konfeksi. Jenis industri yang paling pesat perkembangannya dalam kurun waktu lima tahun 2009-2013 adalah industri batik, dan tempe. Sedangkan industri kerajinan rumah tangga yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri batik, hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu lima tahun industri tersebut mnegalami perkembangan yang cukup baik. Jika industri batik ini dapat dikembangkan lebih baik lagi maka jumlah industri akan semakin bertambah dan jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan bertambah.

Selain itu dalam kurun waktu tiga tahun banyaknya perusahaan yang mendaftar menurut sektor dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.100
Banyaknya Perusahaan yang Mendaftar Menurut Sektor

No	Sektor	2012	2013	2014
1	Pertanian	-	-	-
2	Pertambangan	-	-	-
3	Industri Pengolahan	1	-	1
4	Listrik, Gas & Air	-	-	-
5	Bangunan	-	-	-
6	Perdagangan	904	828	904
7	Angkutan & Komunikasi	5	4	-
8	Keuangan dan Asuransi	16	2	3
9	Jasa Kemasyarakatan	12	17	8
10	Usaha Lainnya	-	-	12
Jumlah		938	851	928

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka 2015

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat sepuluh sektor perusahaan yang mendaftar di Kabupaten Tuban antara lain pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas & air, bangunan, perdagangan, angkutan & komunikasi, keuangan & asuransi, jasa kemasyarakatan serta usaha lainnya. Namun sayangnya jumlah perusahaan yang mendaftar menurut sektor mengalami pertumbuhan fluktatif dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 2012-2014). Pada tahun 2013 perusahaan yang mendaftar menurut sektor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan baik dalam skala nasional ataupun internasional. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.101
Nilai dan peringkat daya saing 33 Provinsi di Indonesia

No	Propinsi	Nilai
1.	DKI. Jakarta	3,2084
2.	Jawa Timur	0,9111
3.	Jawa Barat	0,9083
4.	Kalimantan Timur	0,6212
5.	Kepulauan Riau	0,3875
6.	Jawa Tengah	0,2862
7.	Banten	0,2649
8.	Bali	0,1384
9.	Riau	1,1354
10.	Sumatera Utara	0,0246
11.	Papua	0,1051
12.	Kalimantan Selatan	0,1147
13.	Kep. Bangka Belitung	0,1310
14.	Jambi	0,1688
15.	Sulawesi Selatan	0,1794
16.	Sumatera Selatan	0,1842
17.	Lampung	0,1864
18.	DI Yogyakarta	0,2399
19.	Papua barat	0,2511
20.	Sulawesi Utara	0,2518
21.	Kalimantan tengah	0,2701
22.	Nusa Tenggara Barat	0,3000
23.	Maluku	0,3003

Sumber: Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dari 33 provinsi d Indonesia, daya saing di provinsi Jawa Timur menempati provinsi ke dua dengan nilai 0,9111. Lebih jelasnya nilai dan peringkat daya saing 33 provinsi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel diatas ini.

Sepuluh provinsi lainnya (tidak berdasarkan peringkat) yaitu Aceh,Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur,Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara.

2.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan. Setiap daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena iklim investasi yang kondusif akan medorong peningkatan modal yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pembangunan. Sebaliknya jika iklim investasi tidak menentu, maka

para investor tidak akan tertarik untuk melakukan investasi sehingga akan menghambat peningkatan modal. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat iklim investasi adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Tuban pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102
Angka Kriminalitas Kab. Tuban Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kriminal	624	582	651	555	542
2.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	556	494	560	460	410

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tuban, Tahun 2011-2015

Dari tahun ke tahun, angka kriminalitas di Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Namun demikian tidak semua tindakan krimina dapat ditangani. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus bisa diminimalisir untuk kedepannya. Selain itu, meskipun mengalami penurunan, jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Tuban masih terbilang banyak. Perlu adanya upaya peningkatan keamanan untuk mengantisipasi tindak kriminal demi tercapainya Kabupaten Tuban yang aman.

2.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam mewujudkan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM), karena SDM berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan fungsi sumber daya lain dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan.

“halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangandaerah serta kerangka pendaan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk mengetahui kondisi mendatang, maka tidak dapat terlepas dari kondisi pada masa lalu. Adapun kondisi masa lalu yang disajikan pada bab ini adalah kondisi pada tahun 2011-2015 yang akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan untuk proyeksi keuangan mendatang yaitu periode 2016-2021. Untuk itu beberapa poin yang perlu diperhatikan pada masa lampau adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan kinerja pemerintah dalam kemampuannya untuk mengelola keuangan dan pendanaan pada periode tertentu. Pada bagian ini disajikan data dari tahun 2011-2015. Kinerja ini, tentunya akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga pemerintah pada periode selanjutnya (2016-2021). Kinerja pelaksanaan APBD ini dalam melihat seberapa besar pemerintah memiliki kemandirian, kemampuan mengoptimalkan pendapatan, serta kemampuan dalam menekan pengeluaran, serta kemampuan dalam menyerap anggaran. Untuk itu dapat dilihat kemampuan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015
Kabupaten Tuban

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**1.180.211.981.414,53**	**1.370.250.605.615,46**	**1.526.016.153.880,56**	**1.823.513.656.640,40**	**2.017.855.147.213,16**	**5,28**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**137.296.864.044,53**	**192.499.442.880,46**	**227.120.525.357,56**	**291.079.944.393,40**	**345.965.620.446,16**	**8,99**
1.1.1.	Pajak daerah	59.317.208.378,25	90.594.010.661,62	133.770.276.946,55	143.821.505.016,45	164.078.450.924,10	7,02
1.1.2.	Retribusi daerah	38.063.038.008,33	17.900.390.797,00	19.241.521.369,00	37.234.345.283,70	22.490.448.766,50	(24,69)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9.821.699.011,91	14.440.021.363,44	9.465.934.352,26	9.937.161.273,62	10.746.001.490,99	3,92
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	30.094.918.646,04	69.565.020.058,40	64.642.792.689,75	100.086.932.819,63	148.650.719.264,57	20,10
1.2.	**Dana Perimbangan**	**803.613.440.935,00**	**946.644.485.204,00**	**1.013.336.747.881,00**	**1.089.336.814.742,00**	**1.124.228.787.332,00**	**1,73**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	131.244.896.935,00	138.930.824.204,00	114.763.665.881,00	114.084.687.742,00	101.683.874.332,00	(5,82)
1.2.2.	Dana alokasi umum	605.942.744.000,00	757.906.831.000,00	849.399.312.000,00	926.685.197.000,00	955.939.873.000,00	1,77
1.2.3.	Dana alokasi khusus	66.425.800.000,00	49.806.830.000,00	49.173.770.000,00	48.566.930.000,00	66.605.040.000,00	15,51
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**239.301.676.435,00**	**231.106.677.531,00**	**285.558.880.642,00**	**443.096.897.505,00**	**547.660.739.435,00**	**10,86**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.1	Hibah	-	-	898.000.000,00	-	5.097.448.000,00	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	62.781.142.555,00	62.303.485.998,00	76.047.580.642,00	121.698.998.505,00	120.861.318.435,00	(0,02)
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	167.658.593.880,00	151.941.147.000,00	196.127.355.000,00	288.298.642.000,00	391.297.020.000,00	15,42
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	8.861.940.000,00	16.862.044.533,00	12.485.945.000,00	33.099.257.000,00	30.404.953.000,00	(3,63)

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016

Dari tabel 3.1 diatas dapat terlihat bahwa Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan pendapatan yang tidak begitu signifikan selama 5 tahun terakhir ini, yaitu hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,28%. Kabupaten Tuban ini jika dilihat dari pertumbuhannya, mengalami pertumbuhan paling tinggi pada lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,86%, disusul dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,99%, dan yang terakhir adalah dana perimbangan hanya sebesar 1,73%. Secara pertumbuhan kondisi tersebut cukup baik, dimana PAD menduduki urunan ke-2 dan melebihi persentase pendapatan secara umum, ini artinya Pemerintah Kabupaten Tuban telah berupaya dan mengoptimalkan peningkatan potensi-potensi daerah menjadi PAD. Namun secara value dana perimbangan masih sangat signifikan di dalam memenuhi kebutuhan pemerintah Kabupaten Tuban, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah dana perimbangan yang hampir 50% mewakili Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Ini artinya pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih optimal lagi meningkatkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD sehingga dapat lebih mandiri lagi.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian inimenguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Adapun Neraca Kabupaten Tuban sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tuban

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan
1.	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**242.707.862.550,41**	**275.122.292.168,38**	**284.922.539.038,41**	**346.617.252.029,94**	**423.741.210.671,01**	**10,19**
1.1.1.	Kas	201.958.836.645,07	184.321.401.483,06	159.012.060.194,13	250.664.833.118,28	298.091.044.141,68	8,75
1.1.2.	Piutang	24.628.360.392,49	22.024.689.376,12	55.239.867.435,89	52.721.713.026,37	46.264.452.685,27	(6,17)
	Penyisihan Piutang tak tertagih	(6.817.128.098,75)	(13.527.920.783,78)	(11.866.904.090,73)	(17.113.909.941,42)	-	(99,55)
1.1.3.	Persediaan	22.937.793.611,60	82.304.122.092,98	82.537.515.499,12	60.344.615.826,71	79.385.713.844,06	14,04
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**52.297.752.252,92**	**77.113.492.644,57**	**78.301.947.372,27**	**84.551.477.043,92**	**91.946.775.203,53**	**4,43**
1.2.1.	Investasi Non Pemanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Investasi Pemanen	52.297.752.252,92	77.113.492.644,57	78.301.947.372,27	84.551.477.043,92	91.946.775.203,53	4,43
1.3.	**ASET TETAP**	**2.770.835.946.424,00**	**3.010.156.391.241,67**	**3.281.076.703.483,23**	**4.490.020.246.901,68**	**3.925.048.353.050,84**	**(6,47)**
1.3.1.	Tanah	269.494.339.777,00	272.492.364.802,00	275.033.508.902,00	1.943.803.040.858,00	1.965.176.357.293,15	1,31
1.3.2.	Peralatan dan mesin	218.960.217.281,00	266.716.911.719,00	310.846.693.591,56	234.335.759.553,36	414.639.491.308,61	27,82
1.3.3.	Gedung dan bangunan	672.491.701.483,00	734.060.375.537,37	853.923.518.171,67	768.049.245.242,32	1.036.392.855.483,20	14,94
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.559.744.225.207,00	1.669.122.381.807,00	1.785.574.055.177,00	1.524.858.438.023,00	2.150.075.118.161,00	17,00

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.5.	Aset tetap lainnya	25.095.780.546,00	30.635.694.222,00	35.563.869.221,00	18.399.452.325,00	57.624.951.323,20	51,45
1.3.5.	Konstruksi dalam pengerjaan	25.049.682.130,00	37.128.663.154,30	20.135.058.420,00	574.310.900,00	82.971.992.140,81	97,58
1.3.6.	Akumulasi penyusutan*	-	-	-	-	(1.781.832.412.659,13)	
1.4.	**DANA CADANGAN***	**-**	**-**	**61.985.443.288,72**	**25.726.769.609,82**	**-**	**(41,34)**
1.4.1	Dana Cadangan*	-	-	61.985.443.288,72	25.726.769.609,82	-	(41,34)
1.5.	ASET LAINNYA	**14.400.140.104,00**	**9.769.162.604,00**	**10.366.518.445,00**	**32.503.621.665,00**	**24.365.394.083,07**	(13,96)
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga*	-	5.945.160.000,00	6.044.160.000,00	-	-	0,83
1.5.4.	Aset tak berwujud	1.221.114.020,00	1.807.645.020,00	2.128.868.020,00	2.541.541.120,00	666.484.060,00	(58,09)
1.5.5.	Aset lain-lain	13.179.026.084,00	2.016.357.584,00	2.193.490.425,00	29.962.080.545,00	12.928.330.211,35	(39,54)
	Aset tidak ditemukan*	-	-	-	-	10.770.579.811,72	-
	JUMLAH ASET DAERAH	**3.080.241.701.331,33**	**3.372.161.338.658,62**	**3.716.653.151.627,63**	**4.979.419.367.250,36**	**4.465.101.733.008,45**	**(5,21)**
2.	**KEWAJIBAN**						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3.093.538.581,75**	**617.122.401,50**	**10.238.791.481,02**	**5.506.384.755,00**	**21.385.216.425,00**	58,97

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga*	2.144.874.623,00	-	-	-	-	
2.1.2.	Utang Bunga*	4.533.913,75	910.742,50	-	-	-	(66,55)
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	-	
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jk Panjang Lainnya*	30.330.000,00	15.165.000,00	-	-	-	(33,33)
2.1.5.	Utang jangka pendek lainnya	913.800.045,00	601.046.659,00	10.238.791.481,02	5.506.384.755,00	21.385.216.425,00	59,43
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**15.165.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
2.2.1	Utang Jk Panjang lainnya	15.165.000,00	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**3.108.703.581,75**	**617.122.401,50**	**10.238.791.481,02**	**5.506.384.755,00**	**21.385.216.425,00**	58,96
3.	**EKUITAS DANA**						
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	239.614.323.968,66	274.505.169.766,88	274.683.747.557,39	341.110.867.274,94	-	(99,82)
3.1.1.	SILPA	199.750.297.763,53	184.273.733.033,06	158.968.722.178,91	250.431.954.314,24	-	(99,89)
3.1.2.	Cadangan piutang	17.811.232.293,74	8.496.768.592,34	43.372.963.345,16	35.607.803.084,95	-	(99,78)
3.1.3.	Cadangan persediaan	22.937.793.611,60	82.304.122.092,98	82.537.515.499,12	60.344.615.826,71	-	(99,59)
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(948.663.958,75)	(617.122.401,50)	(10.238.791.481,02)	(5.281.414.755,00)	-	(99,64)

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan
3.1.5	Pendapatan ditangguhkan	63.664.258,54	47.668.450,00	43.338.015,22	7.908.804,04	-	(100,88)
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	**2.837.518.673.780,92**	**3.097.039.046.490,24**	**3.369.745.169.300,50**	**4.607.075.345.610,60**	**-**	(99,76)
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.770.835.946.424,00	3.010.156.391.241,67	3.281.076.703.483,23	4.490.020.246.901,68	-	(99,76)
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	14.400.140.104,00	9.769.162.604,00	10.366.518.445,00	32.503.621.665,00	-	(99,65)
3.2.3.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	52.297.752.252,92	77.113.492.644,57	78.301.947.372,27	84.551.477.043,92	-	(99,76)
3.2.4.	Dana yg harus disediakan utk pembayaran Utang Jk Panjang*	(15.165.000,00)	-	-	-	-	-
3,3	EKUITAS DANA CADANGAN*	**-**	**-**	**61.985.443.288,72**	**25.726.769.609,82**	**-**	(41,34)
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan*	-	-	61.985.443.288,72	25.726.769.609,82	-	(41,34)
	JUMLAH EKUITAS DANA	**3.077.132.997.749,58**	**3.371.544.216.257,12**	**3.706.414.360.146,61**	**4.973.912.982.495,36**	**-**	(99,76)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.080.241.701.331,33**	**3.372.161.338.658,62**	**3.716.653.151.627,63**	**4.979.419.367.250,36**	**4.465.101.733.008,46**	(5,21)

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016
Keterangan : *Tidak dapat dilihat tingkat pertumbuhannya dikarenakan valuenya hanya terdapat sebanyak 1-2 tahun saja

Aset maupun kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban selama 5 tahun terakhir ini sangat bervariasi, namun secara umum kondisi aset lancar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan yang cukup baik, tidak demikian halnya dengan aset tetap yang mengalami penurunan demikian pula dengan aset lainnya, yang berbanding terbalik dengan kondisi kewajiban yang terus meningkat sangat signifikan baik kewajiban jangka pendek maupun panjang.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset -aset lainnya. Sedangkan kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.Kewajiban timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu.Kewajiban dikelompokkan menjadi dua, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi antara lain : Ekuitas Dana Lancar; Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisish antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dapat dilakukan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio. Rasio Solvabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melunasi hutang jangka pendeknya.Semakin besar rasio yang diperoleh maka semakin cepar atau semakin lancar pembayaran hutang jangka pendeknya. Dari data tersebut dapat dilihat dan diukur rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tuban
Tahun 2013-2015

NO	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Rasio lancar (current ratio)	0,036	0,016	0,050
2	Rasio quick (quick ratio)	0,134	0,029	0,098
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,003	0,001	0,005
4	Rasio hutang terhadap modal	0,003	0,001	*
5	Rata-rata umur piutang	10,150	12,735	9,771
6	Rata-rata umur persediaan	3,64	4,32	3,21

*Tidak terdapat investasi di tahun 2015

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2013 adalah sebesar 0,036% dan pada tahun 2014 menurun menjadi0,016% , dan meningkat 0,050% di tahun 2015 yang artinya kemampuan Pemerintah Daerah masih cukup rendah dalam membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki dikarenakan rasio kurang dari 1. Begitu pula dengan perhitungan rasio quick pada tahun 2013 sebesar 0,134% dan pada tahun 2014 turun menjadi 0,029%, dan di tahun 2015 menjadi 0,098%. Rasio Quick mempertimbangkan nilai persediaan dalam perhitungannya.

Rasio perhitungan total hutang terhadap total aset menunjukkan keadaan yang baik karena hasil perhitungannya tidak menunjukkan angka yang besar. Pada Tahun 2013 perhitungannya sebesar 0,003% dan pada Tahun 2014 adalah sebesar 0,001%, dan tahun 2015 dikisaran 0,05%. Ratio total hutang terhadap total modal menunjukkan hasil pada Tahun 2013 sebesar 0,003% dan pada Tahun 2014 sebesar 0,001%, dan di tahun 2015 tidak terdapat rasio dikarenakan tidak terdapat nilai modal dalam neraca. Rasio hutang ini terbilang kecil dan berdampak baik bagi Neraca Keuangan karena apabila rasio hutang semakin besar atau meningkat maka beban Pemerintah Daerah akan semakin berat juga dalam mengatasi beban hutangnya, namun perlu diperhatikan pada pengadaan modal, agar tetap berjalan meskipun kecil. Sedangkan untuk rata-rata perputaran piutang dan persediaan juga menunjukkan angka lebih dari 1%, ini menandakan aktivitas perekonomian di Kabupaten Tuban berjalan cukup baik dan cepat.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwaanggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)**.** Adapun Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban selama tahun 2011-2015.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berbanding dengan total belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Adapun proporsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tuban

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2011	657.362.859.179,63	1.113.588.908.723,51	59,03
2	Tahun anggaran 2012	751.785.909.383,29	1.379.063.369.582,38	54,51
3	Tahun anggaran 2013	831.275.361.827,48	1.551.828.549.200,84	53,57
4	Tahun anggaran 2014	926.348.580.146,93	1.780.024.608.472,09	52,04
5	Tahun anggaran 2015	947.885.746.240,87	1.998.111.557.092,18	47,44

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur di Kabupaten Tuban cenderung mengalami penurunan, Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran di tahun 2011 mencapai 59,03 persen di tahun 2012 menurun menjadi 54,51 persen, di tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 53,57 persem, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2014 menjadi 52,04 persen dan terus mengalami penurunan di tahun 2015 berhasil menjadi 47,44 persen. Persentase yang cukup baik, dikarenakan kebutuhan aparatur harus dibawah 50 persen, dan di tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tuban sudah bersil mencapai angga tersebut.

Jika dikaitkan dengan realisasi belanja daerah Kabupaen Tuban di tahun 2011 sampai dengan 2015, kualitas realisasi belanja daerah Kabupaten Tuban mengalami peningkatan karena pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terlihat bahwa prosentase proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tuban mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Tuban berhasil menekan belanja pemenuhan aparatur dan memfokuskan pada belanja modal untuk pembangunan Kabupaten Tuban.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Tuban Tahun 2011 smapai dengan tahun 2015.

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

Uraian	2011 Rp.	2012 Rp.	2013 Rp.	2014 Rp.	2015 Rp.
Realisasi Pendapatan Daerah	**1.180.211.981.414,53**	**1.370.250.605.615,46**	**1.526.016.153.880,56**	**1.823.513.656.640,40**	**2.017.855.147.213,16**
Dikurangi realisasi :					
Belanja Daerah	1.113.558.578.723,51	1.379.033.039.582,38	1.489.827.940.912,12	1.768.024.608.472,09	1.998.111.557.092,18
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.018.330.000,00	9.645.330.000,00	64.224.608.288,72	16.307.000.000,00	2.607.500.000,00
Defisit riil	**48.635.072.691,02**	**(18.427.763.966,92)**	**(28.036.395.320,28)**	**39.182.048.168,31**	**17.136.090.120,98**

Pada tabel 3.5 tersebut terlihat bahwa kondisi keuangan Kabupaten Tuban tidak begitu baik, bahkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sempat mengalami defisit anggaran,meskipun pada tahun 2014 telah kembali mengalami surplus, namun kondisi tersebut tidak begitu baik bagi kehidupan pemerintah Kabupaten Tuban, oleh karena itu dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tuban melakukan upaya penutupan defisit melalui berbagai cara yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	146.035.249.666,53	199.750.297.763,53	184.273.733.033,06	158.968.722.178,91	250.431.954.314,24
2	Pencairan dana cadangan				50.000.000.000,00	23.985.443.288,72
3	Hasil Penjualan Kekayan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.645.398.122,21	2.419.881.549,24	2.498.081.755,08	1.762.220.900,00	2.224.139.700,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	434.577.283,77	531.317.687,21	233.302.711,05	518.963.067,02	241.209.051,54

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rp	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	199.750.297.763,53		184.273.733.033,06		158.968.722.178,91		250.431.954.314,24		294.018.836.475,48	
2	Pelampauan peneriman PAD	12.799.392.626,00	6,41%	32.903.816.876,13	18%	16.607.490.265,40	9%	32.704.999.560,98	18%	42.259.685.287,61	23%
3	Pelampauan peneriman dana perimbangan	24.638.904.408,00	12,33%	18.490.897.462,00	10%	18.515.654.465,45	10%	13.465.983.149,00	7%	(15.053.055.628,00)	-8%
4	Pelampauan peneriman lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.568.320.030,00	18,31%	5.707.229.551,00	3%	4.928.745.326,00	3%	24.953.335.028,00	14%	2.693.443.715,00	1%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	99.479.503.468,97	49,80%	83.990.281.740,07	46%	102.354.205.759,93	56%	180.330.648.709,24	98%	259.096.411.469,33	141%
6	Selisih lebih/kurang pembiayaan tahun lalu	1.285.833.875,98	0,64%	(371.731.561,14)	0%	2.366.956.042,13	1%	(1.023.012.132,98)	-1%	5.022.351.631,54	3%
7	Kegiatan lanjutan	24.978.343.354,00	12,50%	43.553.238.965,00	24%	14.195.670.320,00	8%	-	0%	-	0%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

3.3. Kerangka Pendanaan

Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok *(necessary condition)* bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah. Untuk itu,ada beberapa hal yang biasdilakukan yang pertama pertama, struktur anggaran di daerah harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan.Untuk memenuhi syarat kecukupan *(sufficient condition)* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerahserta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Tuban.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pada tabel berikut akan dipaparkan data mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama:

Tabel 3.8
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
A	**Belanja Tidak Langsung**	**617.746.218.558,99**	**698.362.221.428,63**	**777.950.876.241,54**	**864.668.733.515,86**	**879.663.004.080,00**	1,03
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	504.847.875.086,00	546.915.927.252,00	570.975.528.506,00	595.469.411.768,00	633.282.091.998,00	3,16
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.918.996.900,00	4.372.811.700,00	4.373.457.000,00	4.380.000.000,00	4.373.300.000,00	0,12
3	Tambahan penghasilan PNS untuk guru	105.648.659.645,00	141.869.898.450,00	191.038.073.525,00	250.722.304.448,00	225.948.295.885,00	(4,77)
4	Belanja bunga	8.137.286,25	4.533.913	974.481,90	-	-	(64,90)
5	Belanja bagi hasil	4.322.549.641,74	5.199.050.113,88	11.562.842.728,64	14.097.017.299,86	16.059.316.197,00	7,08
B	**Belanja Langsung**	**50.073.871.870,89**	**71.619.126.240,81**	**34.402.970.103,63**	**29.220.585.515,00**	**32.720.005.966,00**	5,39
1	Belanja Honorarium Non PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	312.000.000,00	180.000.000,00	261.000.000,00	1.368.000.000,00	1.324.000.000,00	1,70

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
2	Belanja bea siswa pendidikan PNS	46.620.000,00	34.000.000,00	70.400.000,00	182.600.000,00	182.600.000,00	0,64
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor al listrik, telepon dan sejenisnya)	32.070.307.834,39	53.651.357.783,81	19.142.870.703,00	22.607.614.134,00	26.386.886.924,00	7,57
4	Belanja sewa gedung kantor yang telah ada kontrak jangka panjangnya	-	-	-	-	-	
5	Belanja premi asuransi kesehatan*	-	326.592.000,00	352.750.000,00	-	-	
6	Belanja Bahan dapur rumah sakit, makanan dan minuman pasien	1.589.131.669,50	234.921.400,00	200.943.120,00	-	-	(8,54)
7	Belanja Bahan obat-obatan, bahan kimia dan penunjang alat kesehatan	16.253.958.867,00	17.216.753.757,00	14.453.625.810,63	6.349.058.881,00	6.006.391.972,00	(3,22)

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
8	Belanja pemeliharaan alat kesehatan, alat kedokteran dan alat laboratorium	113.853.500,00	155.501.300	182.380.470	81.312.500	144.127.070,00	27,71
9	Belanja barang jasa (belanja cetak buku-buku dan alat tulis siswa)	-	-	-	-	-	
C	**Pembiayaan pengeluaran**	**30.330.000,00**	**30.330.000,00**	**62.000.608.288,72**	**12.000.000.000,00**	**0,00**	(66,57)
1	Pembentukan dana cadangan*			61.985.443.288,72	12.000.000.000,00	-	
2	Pembayaran pokok utang	30.330.000,00	30.330.000,00	15.165.000,00	-	-	(33,33)
	TOTAL	**667.850.420.429,88**	**770.011.677.669,44**	**874.354.454.633,89**	**905.889.319.030,86**	**912.383.010.046,00**	**0,51**

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, Data diolah, tahun 2016
Keterangan : *Tidak dapat dilihat pertumbuhannya dikarenakan nilai hanya terdapat 1-2 tahun

3.1.1. Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dana sumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah dan juga belanja daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun Proyeksi Pendapatan, belanja, dan prioritas utama dan periodik tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun 2015	Rata-rata Pertubuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**PENDAPATAN**	**2.017.855.147.213,16**	**5,28**	**2.182.323.451.022,99**	**2.282.312.886.418,00**	**2.390.731.839.806,90**	**2.487.194.824.869,91**	**2.583.657.809.932,92**	**2.680.120.794.995,93**
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	**345.965.620.446,16**	8,99	**300.384.944.111,99**	331.079.269.215,29	367.539.735.135,11	398.234.060.238,41	428.928.385.341,71	459.622.710.445,01
1.1.1.	Pajak daerah	164.078.450.924,10	7,02	155.886.224.220,00	166.823.747.138,25	177.761.270.056,49	188.698.792.974,74	199.636.315.892,98	210.573.838.811,23
1.1.2.	Retribusi daerah	22.490.448.766,50	(24,69)	16.848.648.029,00	12.688.384.458,74	9.555.372.033,16	5.395.108.462,90	1.234.844.892,65	(2.925.418.677,61)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.746.001.490,99	3,92	10.746.001.490,99	11.166.943.113,85	11.604.373.832,68	12.025.315.455,54	12.446.257.078,40	12.867.198.701,26
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	148.650.719.264,57	20,10	116.904.070.372,00	140.400.194.504,45	168.618.719.212,78	192.114.843.345,23	215.610.967.477,68	239.107.091.610,13
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.124.228.787.332,00**	**1,73**	**1.529.080.660.860,00**	**1.569.824.936.675,23**	**1.608.457.603.895,27**	**1.645.675.429.378,50**	**1.682.893.254.861,74**	**1.720.111.080.344,97**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	101.683.874.332,00	(5,82)	98.157.424.000,00	95.974.002.709,43	90.391.141.910,49	84.681.270.287,93	78.971.398.665,36	73.261.527.042,80
1.2.2.	Dana alokasi umum	955.939.873.000,00	3,00	1.046.758.509.000,00	1.078.161.264.270,00	1.110.506.102.198,10	1.141.908.857.468,10	1.173.311.612.738,10	1.204.714.368.008,10
1.2.3.	Dana alokasi khusus	66.605.040.000,00	3,00	384.164.727.860,00	395.689.669.695,80	407.560.359.786,67	419.085.301.622,47	430.610.243.458,27	442.135.185.294,07
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**547.660.739.435,00**	**10,86**	**352.857.846.051,00**	**381.408.680.527,48**	**414.734.500.776,52**	**443.285.335.253,00**	**471.836.169.729,47**	**500.387.004.205,95**
1.3.1	Hibah	5.097.448.000,00		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-		-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	120.861.318.435,00	(0,02)	101.935.738.534,00	101.718.100.000,00	106.804.005.000,00	112.144.205.000,00	117.751.415.000,00	123.538.985.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	391.297.020.000,00	15,42	197.768.399.000,00	197.768.399.000,00	207.656.819.000,00	218.039.660.000,00	228.941.643.000,00	240.388.725.000,00

No.	Uraian	Tahun 2015	Rata-rata Pertubuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	30.404.953.000,00	(3,63)	53.281.580.000,00	53.281.580.000,00	53.281.580.000,00	53.281.580.000,00	53.281.580.000,00	53.281.580.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Perkiraan pada lima tahun mendatang sumber pendapatan masih didominasi oleh dana perimbangan, meskipun secara pasti DAU dan DAK tidak dapat diprediksi, namun dapat dilihat pertumbuhan Nasional yang mencapai delapan sampai sembilan persen, sehingga rata-rata daerah memprediksikan tiga persen sebagai pertumbuhan dengan angka yang aman. Adapun Proyeksi Belanja Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Proyeksi Kebutuhan Belanja Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

N0	Uraian	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.165.584.813.843,87**	**7,69**	**1.380.914.526.940,99**	**1.564.947.182.048,83**	**1.748.979.837.156,68**	**1.933.012.492.264,52**	**2.117.045.147.372,37**	**2.301.077.802.480,21**
1	Belanja Pegawai	876.244.501.908,87	0,76	980.282.079.765,44	987.739.811.620,10	995.197.543.474,77	1.002.655.275.329,43	1.010.113.007.184,09	1.017.570.739.038,76
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	66.356.073.069,00	26,81	46.673.780.600,00	59.185.646.023,87	71.697.511.447,74	84.209.376.871,62	96.721.242.295,49	109.233.107.719,36
5	Belanja Bantuan Sosial	9.777.800.000,00	(31,20)	12.359.586.000,00	8.503.898.034,88	4.648.210.069,75	792.522.104,63	(3.063.165.860,50)	(6.918.853.825,62)
6	Belanja Bagi Hasil	16.059.316.197,00	7,08	17.273.487.225,00	18.496.028.588,65	19.718.569.952,29	20.941.111.315,94	22.163.652.679,58	23.386.194.043,23
7	Belanja Bantuan Keuangan	196.290.205.348,00	50,17	315.834.887.392,00	474.277.650.616,33	632.720.413.840,67	791.163.177.065,00	949.605.940.289,33	1.108.048.703.513,66
8	Belanja Tidak Terduga	856.917.321,00	97,21	8.490.705.958,55	16.744.147.165,01	24.997.588.371,46	33.251.029.577,92	41.504.470.784,37	49.757.911.990,83
B	**Belanja Langsung**	**832.526.743.248,31**	**4,53**	**859.243.874.760,00**	**898.868.141.705,06**	**938.492.408.650,12**	**978.116.675.595,18**	**1.017.740.942.540,24**	**1.057.365.209.485,30**
1	Belanja Pegawai	71.641.244.332,00	8,78	84.293.487.500,00	91.695.896.914,31	99.098.306.328,62	106.500.715.742,93	113.903.125.157,24	121.305.534.571,55
2	Belanja Barang dan Jasa	374.229.841.167,37	4,82	384.670.054.560,00	403.198.786.232,30	421.727.517.904,60	440.256.249.576,90	458.784.981.249,20	477.313.712.921,50
3	Belanja Modal	386.655.657.748,94	3,51	390.280.332.700,00	403.973.458.558,45	417.666.584.416,90	431.359.710.275,35	445.052.836.133,80	458.745.961.992,25
Total Belanja		**1.998.111.557.092,18**	**6,34**	**2.240.158.401.700,99**	**2.382.181.787.112,02**	**2.524.205.172.523,06**	**2.666.228.557.934,09**	**2.808.251.943.345,12**	**2.950.275.328.756,15**

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Selain proyeksi kebutuhan belanja, adapun terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihindari yaitu kebutuhan yang wajib mengikat serta prioritas utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tuban 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**879.663.004.080,00**	**1,03**	**987.220.600.789,44**	**985.714.820.000,16**	**984.209.039.210,88**	**982.703.258.421,60**	**981.197.477.632,32**	**979.691.696.843,04**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	633.282.091.998,00	3,16	703.071.773.064,44	725.287.743.752,11	747.503.714.439,78	769.719.685.127,45	791.935.655.815,13	814.151.626.502,80
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.373.300.000,00	0,12	4.380.000.000,00	4.385.416.094,68	4.390.832.189,35	4.396.248.284,03	4.401.664.378,70	4.407.080.473,38
3	Tambahan penghasilan PNS untuk guru	225.948.295.885,00	(4,77)	262.495.340.500,00	249.979.127.812,65	237.462.915.125,30	224.946.702.437,95	212.430.489.750,60	199.914.277.063,25
4	Belanja bunga	-	(64,90)	-	-	-	-	-	-
5	Belanja bagi hasil	16.059.316.197,00	7,08	-	-	-	-	-	-
B	**Belanja Langsung**	**32.720.005.966,00**	**5,39**	**37.043.654.560,00**	**38.921.135.829,55**	**40.798.617.099,11**	**42.676.098.368,66**	**44.553.579.638,22**	**46.431.060.907,77**
1	Belanja Honorarium Non PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	1.324.300.000,00	-	4.380.000.000,00	4.402.001.670,05	4.424.113.859,17	4.446.337.122,51	4.468.672.018,01	4.491.119.106,44
2	Belanja bea siswa pendidikan PNS	182.600.000,00	0,64	182.600.000,00	183.760.606,38	184.921.212,75	186.081.819,13	187.242.425,51	188.403.031,88

No	Uraian	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor al listrik, telepon dan sejenisnya)	26.386.886.924,00	7,57	26.023.342.650,00	27.994.443.303,44	29.965.543.956,87	31.936.644.610,31	33.907.745.263,75	35.878.845.917,18
4	Belanja sewa gedung kantor yang telah ada kontrak jangka panjangnya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja premi asuransi kesehatan*	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Belanja Bahan dapur rumah sakit, makanan dan minuman pasien	-	(8,54)	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bahan obat-obatan, bahan kimia dan penunjang alat kesehatan	6.006.391.972,00	(3,22)	9.970.709.410,00	9.649.504.974,34	9.328.300.538,68	9.007.096.103,02	8.685.891.667,36	8.364.687.231,70
8	Belanja pemeliharaan alat kesehatan, alat kedokteran dan alat laboratorium	144.127.070,00	27,71	817.002.500,00	1.043.426.945,40	1.269.851.390,80	1.496.275.836,20	1.722.700.281,60	1.949.124.727,01
9	Belanja barang jasa (belanja cetak buku-buku dan alat tulis siswa)	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**Pembiayaan pengeluaran**	**0,00**	**(66,57)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pembentukan dana cadangan*	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Pembayaran pokok utang	-	(33,33)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**912.383.010.046,00**	**0,51**	**1.024.264.255.349,44**	**1.024.635.955.829,71**	**1.025.007.656.309,99**	**1.025.379.356.790,26**	**1.025.751.057.270,54**	**1.026.122.757.750,81**

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

3.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu lima tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tuban diharapkan semakin meningkat.Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap sedikit dari anggaran yang ada. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi. Adapun gambaran kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	2.182.323.451.022,99	2.282.312.886.418,00	2.390.731.839.806,90	2.487.194.824.869,91	2.583.657.809.932,92	2.680.120.794.995,93
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	317.878.593.571,50	341.738.350.667,53	365.598.107.763,55	389.457.864.859,57	413.317.621.955,60	437.177.379.051,62
	Total penerimaan	2.500.202.044.594,49	2.624.051.237.085,53	2.756.329.947.570,45	2.876.652.689.729,49	2.996.975.431.888,52	3.117.298.174.047,55
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.024.264.255.349,44	1.024.635.955.829,71	1.025.007.656.309,99	1.025.379.356.790,26	1.025.751.057.270,54	1.026.122.757.750,81
5.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.475.937.789.245,05	1.599.415.281.255,81	1.731.322.291.260,46	1.851.273.332.939,22	1.971.224.374.617,98	2.091.175.416.296,74

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia tersebut, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I adalah diperuntukkan untuk mendanai program unggulan kepala daerah, kebijakan nasional dalam RPJMN dan harus dilaksanakan, seperti bidang pendidikan 20%, bidang kesehatan 10% dsb.

Prioritas II adalah diperuntukkan mendanai program SKPD yag merupakan penjabaran dari analisis per urusan.

Prioritas III adalah diperuntukkan mendanai belanja tidak langsung seperti tambahan PNS, Belanja Hibah, Belanja Sosial Masyarakat dan belanja rutin pemerintahan.

Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.Sedangkan pembagian penggunaannya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.475.937.789.245,05	1.599.415.281.255,81	1.731.322.291.260,46	1.851.273.332.939,22	1.971.224.374.617,98	2.091.175.416.296,74
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	859.243.874.760,00	898.868.141.705,06	938.492.408.650,12	978.116.675.595,18	1.017.740.942.540,24	1.057.365.209.485,30
II.b	Pembentukan dana cadangan						
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	37.043.654.560,00	38.921.135.829,55	40.798.617.099,11	42.676.098.368,66	44.553.579.638,22	46.431.060.907,77
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
II.e	Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a+II.b-II.c-II.d)	822.200.220.200,00	859.947.005.875,51	897.693.791.551,01	935.440.577.226,52	973.187.362.902,02	1.010.934.148.577,53
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	653.737.569.045,05	739.468.275.380,31	833.628.499.709,45	915.832.755.712,71	998.037.011.715,96	1.080.241.267.719,21
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.380.914.526.940,99	1.564.947.182.048,83	1.748.979.837.156,68	1.933.012.492.264,52	2.117.045.147.372,37	2.301.077.802.480,21
	Dikurangi :						

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	987.220.600.789,44	985.714.820.000,16	984.209.039.210,88	982.703.258.421,60	981.197.477.632,32	979.691.696.843,04
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	393.693.926.151,55	579.232.362.048,68	764.770.797.945,80	950.309.233.842,92	1.135.847.669.740,05	1.321.386.105.637,17
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	**260.043.642.893,50**	**160.235.913.331,63**	**68.857.701.763,66**	**(34.476.478.130,22)**	**(137.810.658.024,09)**	**(241.144.837.917,96)**

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Data Diolah, Tahun 2016

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada tahun ketiga kemampuan daerah mengalami defisit anggaran hingga pada tahun kelima. Berikut ini adalah kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah :

Tabel 3.14
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

No	Jumlah Dana	Alokasi									
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)
1	Prioritas I	63,73	993.780	61,72	1.068.652	63,95	1.183.944	68,27	1.345.807	74,17	1.551.107
2	Prioritas II	0,70	11.864	0,74	12.891	0,74	13.713	0,74	14.595	0,75	15.775
3	Prioritas III	35,51	553.771	37,53	649.779	35,31	653.616	30,99	610.822	25,07	524.293
	Jumlah	100,00	1.559.415	100,00	1.731	100,00	1.851.273	100,00	1.971.224	100,00	2.091.175

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menyajikan mengenai isu-isu strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tuban. Analisis Isu-isu strategis sangat penting dalam menentukan arah dan strategi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban. bab ini disusun dengan mengikuti kaidah penulisan RPJMD yang berlaku. Adapun susunan bab IV ini terdiri dari penyajian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, yang diiringi dengan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban. Yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan isu-isu strategis Kabupaten Tuban.

VISI :

Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera

MISI :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.
4. Membangun struktur ekomoni daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dapat dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Guna membantu memastikan visi dan misi Kepala Daerah telah dirumuskan secara tepat maka dibutuhkan pemahaman yang benar tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Permasalahan pembangunan diperlukan sebagai informasi dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Tabel 4.1. berikut ini adalah permasalahan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Tabel 4.1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
1.	**Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai upaya penciptaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**	**A. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur satpol PP 2. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya untuk mematuhi perundang-undangan daerah serta tingkat pemahaman terhadap pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum 4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam menciptakan toleransi, kerukunan, dan perlindungan masyarakat. **B. Urusan Pendidikan** Belum optimalnya akses, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. **C. Urusan Sekretariat Daerah** Belum optimalnya kemitraan keagamaan dan kemasyarakatan
2.	**Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**	**A. Urusan Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan** 1. Masih rendahnya sinkronisasi antara sistem perencanaan, sistem pengawasan, dan sistem pengelolaan keuangan sehingga berakibat pada rendahnya akuntabilitas kinerja. 2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. **B. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Belum optimalnya pengelolaan keuangan, aset, dan kelembagaan pemerintahan desa

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
		C. Urusan Kesehatan, Perhubungan, Perijinan, Perpustakaan, serta Komunikasi dan Informatika Kurang optimalnya pelayanan publik di bidang Kesehatan, Perhubungan, Perijinan, Perpustakaan, serta Komunikasi dan Informatika **D. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil** 1. Belum semua wajib KTP memiliki KTP elektronik dari 68,61 % pada tahun 2012 menjadi 85,74 % pada tahun 2015 2. Perlunya Kepemilikan Kartu Keluarga bagi setiap Kepala Keluarga. Walaupun saat ini telah kepemilikannya telah mencapai 100 % tetapi untuk KK berbasis SIAK 7,18 % pada tahun 2011 menjadi 51,32 % pada tahun 2015 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan target nasional indikator kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun sebesar 75 % sedangkan capaian Januari 2016 baru sebesar 49,36 % sehingga terjadi gap sebesar 25,64 % 4. Masih rendahnya kepemilikan akta kematian
3.	**Peningkatan pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang**	**A. Urusan Lingkungan Hidup** 1. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan lingkungan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan **B. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** 1. Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang 2. Belum ada sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan pembangunan infrastruktur sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai terhadap rencana tata

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
		ruang. 3. Masih adanya daerah / desa rawan genangan / bencana **C. Urusan Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan, Perpustakaan, Sosial, serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** 1. Cakupan aksesibilitas terhadap sarana kesehatan yang kurang merata 2. Masih rendahnya cakupan aksesibilitas terhadap sarana pendidikan berkualitas 3. Kemacetan di wilayah perkotaan 4. Cakupan aksesibilitas terhadap fasilitas perpustakaan yang kurang merata 5. Masih minimnya fasilitas layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas 6. Belum optimalnya cakupan layanan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman sesuai standar yang berakibat pada munculnya kawasan kumuh.
4.	**Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh**	**A. Urusan Pertanian, Perikanan, dan Pekerjaan Umum** 1. Belum optimalnya produksi sektor pertanian dan perikanan 2. Masih rendahnya tingkat konsumsi dan olahan hasil produksi yang berakibat pada rendahnya nilai tambah hasil produksi 3. Belum optimalnya cakupan layanan sistem pengairan guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perikanan **B. Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja** 1. Masih rendahnya minat investor akibat iklim investasi yang tidak mendukung

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
		2. Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja **C. Urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pemberdayaan Masyarakat** 1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan koperasi, UKM, IKM, dan lembaga ekonomi masyarakat desa (BUMDes) 2. Belum Optimalnya sistem distribusi dan pengawasan distribusi barang serta perlindungan konsumen. **D. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan** 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang terintegrasi dengan perningkatan sektor pariwisata 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata daerah (di luar wisata religi) sehingga masih rendahnya minat wisatawan. **E. Urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan** Rendahnya cakupan konektivitas wilayah dan jaringan transportasi umum yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah, pusat-pusat industri, perkotaan – perdesaan.
5.	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**	**A. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB** 1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk 2. Masih tingginya jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi **B. Urusan Kesehatan** 1. Lambatnya penurunan jumlah kematian ibu dari 18 jiwa pada tahun 2011 menjadi 12 jiwa

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
		pada tahun 2015. 2. Meningkatnya jumlah kematian bayi dari 176 jiwa pada tahun 2011 menjadi 225 jiwa pada tahun 2015. 3. Dari Jumlah desa 328 yang ODF baru 8 Desa 4. Kejadian penyakit dapat dicegah dengan imunisasi masih sering ditemukan 5. Masih rendahnya cakupan desa siaga purnama mandiri 5.2 % dari target 9% **C. Urusan Sosial** Masih rendahnya taraf hidup dan kemandirian PMKS (kualitas kesejahteraan sosial) serta partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesjahteraan sosial **D. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Masih tingginya angka tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan **E. Urusan Pendidikan** 1. Masih rendahnya kualitas pendidikan 2. Belum optimalnya kualitas/kompetensi dan penempatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan **F. Urusan Pemuda dan Olahraga** 1. Belum optimalnya penumbuhan kreativitas dan peran pemuda dalam bidang pembangunan

No.	Misi	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015
		dan olahraga 2. Belum optimalnya peran lembaga sekolah dalam pembinaan seni dan budaya

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, data diolah tahun 2016

1.2. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN TUBAN

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban 2005 – 2025 maka dapat ditentukan isu-isu strategi Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas keberagamaan dan Moral Etika sebagai pilar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.**

   Masyarakat Kabupaten Tuban yang memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang religius perlu untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dengan meningkatakan kuantitas dan kualitas ibadah baik yang berdimensi vertikal maupun horisontal. Ibadah vertikal terkait dengan kesalehan ritual yakni melaksanakan perintah Tuhan YME sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam kitab suci dan maupun tuntunan dari pada Nabi dan Rasul.

   Persoalan ancaman peredaran Narkotika dan Obat terlarang (Narkoba), Minuman Keras, Pergaulan bebas serta nilai nilai yang tidak sejalan dengan nilai nilai ajaran Agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tuban perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga akan terwujud kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang tentram, tertib, aman, dan nyaman.

2. **Reformasi Birokrasi**

   Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan Teknologi informasi yang dikenal sebagai electronic government (E-Government) dalam sektor publik.

3. **Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang mengutamakan kelestarian ekosistem dan lingkungan**

   Kabupaten Tuban yang memiliki sangat banyak potensi kekayaan alam baik di sektor industri dan pertambangan perlu memperhatikan keberlansungan ekosistem dan lingkungan agar hasil-hasil pembangunan tidak saja bisa dinikmati oleh generasi saat ini, namun juga oleh generasi mendatang. Lingkungan yang terjaga juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari segala zat berbahaya yang bisa membahayakan makhluk hidup.

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan hutan sebagai akibat perkembangan pembangunan industrialisasi di Kabupaten Tuban.
- Terjadinya pencemaran pantai dan kerusakan kawasan pantai Kabupaten Tuban.
- Tingginya pencemaran lingkungan (udara, air, tanah) dan kerusakan sumber daya alam sebagai akibat kegiatan pertambangan dan industri di kabupaten Tuban.
- Penurunan kuantitas dan kualitas sumber air (air tanah dan air permukaan)
- Kepedulian dan wawasan sadar lingkungan oleh masyarakat yang masih rendah.
- Adanya rawan bencana banjir pada kawasan permukiman dan pertanian.

4. Pertumbuhan Ekonomi berbasis keunggulan lokal

Kabupaten Tuban secara geografis memiliki lokasi yang strategis. Sebelah utara yang berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan sungai bengawan solo, wilayah tengah yang didominasi wilayah perbukitan kapur dan hutan, secara langsung juga telah memberikan banyak potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan baik minyak maupun mineral diharapkan dapat menjadi basis industrialisasi.

Dari beragamnya potensi yang dimiliki dan melimpahnya produksi pada satu bagian wilayah di Kabupaten Tuban harus dapat memberikan nilai manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Ketersediaan sistem jaringan distribusi barang/jasa dan penguatan kelembagaan usaha berbasis kemasyarakatan seperti koperasi, UKM, dan BUMDes menjadi satu hal penting dalam penguatan perekonomian regional.

5. Kemiskinan dan Masalah Sosial.

Bahwa kemiskinan di Kabupaten Tuban termasuk masih tinggi, hal ini berkaitan dengan angka kemiskinan Kabupaten Tuban pada tahun 2015 masih 17,08 yang menduduki urutan ke 6 dari bawah untuk kabupaten/kota di Jawa Timur. Diperlukan upaya serius untuk mengejar ketertinggalan angka kemiskinan yang saat ini di Jawa Timur pada kisaran 12,34%.

Tabel 4.2. Menilai Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Isu Strategis

Bab V RPJMD			Bab IV RPJMD
Visi Kepala Daerah	**No.**	**Misi Kepala Daerah**	**Isu Strategis/Permasalahan**
Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Maju dan Sejahtera	1.	1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan menggutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.	Perlunya mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Agama dalam kehidupan sehari hari dan terjaganya kerukunan umat beragama. Baik kerukunan umat seagama, kerukunan antar pemeluk agama dan kerukunan antara pemeluk agama sebagai pilar penciptaan suasana dan kondisi yang aman dan tertib.
		2. Peningkatan tata kelola	Perlunya perbaikan dalam pengelolaan

		penyelenggaraan pemerintah yang kreatif dan bersih;	birokrasi penyelenggaraan pemerintahan (Reformasi Birokrasi) dalam rangka proses pelayanan publik yang lebih berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
		3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah;	Perlu ditingkatkannya perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable developement).
		4. Membangun struktur ekomoni daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;	Perlunya peningkatan produksi, nilai tambah hasil produksi, penguatan sistem kelembagaan, pengawasan, pembinaan, dan pembiayaan terhadap usaha kerakyatan, penyediaan sistem jaringan distribusi barang / jasa, realisasi investasi, serta pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang kebudayaan daerah.
		5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.	Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat, percepatan pengentasan kemiskinan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah sosial.

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, data diolah, Tahun 2016.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Tuban lima tahun ke depan, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis menuju Tuban yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan.Visi pembangunan Tuban yang ingin diwujudkan pada peiode 2016-2021 adalah :

"Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera"

Pada visi tersebut diatas, terdapat empat kata kunci dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

1. Religius

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

2. Bersih

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.

3. Maju

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

a. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajad kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik.
b. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil.
c. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaran politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik

4. Sejahtera

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembanghunan Kabupaten Tuban 2016-2020 yaitu "**Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"** diterjemahkan melalui 5 (lima) misi berikut :

Misi kesatu : Peningkatan pengemalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama sebagai pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Misi kedua : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta pelayanan prima (*excellent service*) pada pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat pemerintah desa.

Misi ketiga : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kabupaten layak huni.

Misi keempat : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berdaya saing melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan hasil olahan dan tingkat konsumsi masyarakat sebagai upaya dalam menaikkan nilai tambah hasil produksi, pengembangan destinasi wisata, penguatan kelembagaan koperasi/usaha kecil mikro/BUMDes, industri dan perdagangan, peningkatan investasi dalam rangka membuka lapangan kerja, serta penyediaan sistem jaringan distribusi.

Misi kelima : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas dan askesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan sarana prasarana dan prestasi olah raga, serta peningkatan peran dan kreatifitas pemuda.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional dan Provinsi JawaTimur.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Tuban dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator

beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Tabel 5.1. berikut menggambarkan hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Visi : "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"									
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 1 : Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan.	Indeks Toleransi Umat Beragama	1.1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	Indeks Toleransi Umat Beragama	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih	2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	2.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan,	Nilai AKIP	CC	B	B	BB	A
				Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD)	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Visi : "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"									
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan						
			2.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Misi 3 : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3.1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00	67,20	67,40	67,60	67,80
		Persentase pencapaian kinerja pelayanan publik terhadap kriteria	3.2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan	Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas	43,98	49,49	53,77	58,46	61,54

Visi : "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"									
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Kabupaten Layak Huni	Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%)					
Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif	4. Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembanguna	– Tingkat Pertumbuhan Ekonomi – Angka PDRB Per Kapita – Indeks Gini Rasio – Tingkat Penganggur an Terbuka	4.1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,34	5,46	5,56	5,72	6,00
			4.2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan	Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	50.590,91	55.650,00	61.215,00	67.336,50	74.070,15
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,73	2,63	2,53	2,53	2,43
				Indeks Gini Ratio	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21

Visi : "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"									
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	n dan penyediaan lapangan kerja		koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja						
			4.3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Regional / *Williamson Index*	0,835	0,833	0,831	0,829	0,827
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan	5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata	– Indeks Pembangunan Manusia – Angka	5.1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu	Indeks Pembangunan Manusia	66,31	67,16	67,22	67,28	67,34

Visi : "Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"									
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
berkeadilan	dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial	Kemiskinan	pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang						
			5.2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,50	15,50	14,50	13,50	12,50

BAB VI. STRATEGI, ARAH, DAN KEBIJAKAN

Strategi, arah dan kebijakan dalam bab ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Adapun visi Kabupaten Tuban adalah **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih.** Berikut ini diuraikan arah kebijakan dan strategi dari RPJMD Kabupaten Tuban 2016 – 2021.

6.1. Misi Pertama

Misi 1: Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Tujuan dari misi pertama adalah :

Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Adapun **sasaran dari misi pertama** adalah

1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Adapun **strategi Misi 1** yang ditetapkan adalah sebagi berikut

1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan.
2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan.

Sedangkan **kebijakan dari Misi 1** ini antara lain adalah

1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, sosial dan kemasyarakatan

6.2. Misi Kedua

Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih

Tujuan dari Misi 2 adalah sebagai berikut:

Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih, dengan **sasaran misi 2** sebagi berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun **strategi misi 2** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Kebijakan Misi 2 antara lain adalah

1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan
2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders.
3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur.

6.3. Misi Ketiga

Misi 3: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah

Tujuan Misi 3:

Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan infrstruktur pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran misi 3

1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan
2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal.

Strategi Misi 3 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang.
3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni.
4. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal.

Kebijakan misi 3:

1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan.
2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni.
4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim.

6.4. Misi Keempat

Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif

Tujuan Misi 4 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Ekonomi Lokal yang kuat, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, serta potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi untuk pemeratahaan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja

Sasaran Misi 4 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta produk unggulan daerah lainnya.
2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
3. Meningkatnya sistem jaringan distribusi hasil produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah

Strategi Misi 4 adalah sebagai berikut:

1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan.
2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.
4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor.
5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja.
6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah.
7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi.

Kebijakan Misi 4 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan.
2. Diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan.
3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.
4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif.
5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja.
6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.
7. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah.

6.5. Misi Kelima

Misi 5 :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Tujuan misi 5 adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial.

Sasaran misi 5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Strategi misi 5 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan program keluarga berencana
2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan
5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kebijakan misi 5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana.
2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.
3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal.
4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan
5. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak

Dari uraian di atas maka akan untuk memperjelas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan akan dituangkan dalam bentuk tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 1 : **Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama**								
Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan.	1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan	√	√	√	√	√
		2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan,	2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, soaial dan kemasyarakatan	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan						
Misi 2 : **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih**								
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai	3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme	√	√	√	√	√
			4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 3 : **Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah**								
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan.	√	√	√	√	√
		2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang.	2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni	3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni.	√	√	√	√	√
		4. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal	4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim.	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 4 : **Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif**								
Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja	1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya	1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha	2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.	2. Diversifikasi produk dan olahan hasil produksi.	√	√	√	√	√
		3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.	3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor.	4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif.	√	√	√	√	√
		5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja.	5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja.	√	√	√	√	√
		6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.	√	√	√	√	√
	3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi.	7. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 5 : **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan**								
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial	1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang	1. Mengoptimalkan program keluarga berencana	1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana.	√	√	√	√	√
		2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	√	√	√	√	√
		3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.	3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat	√	√	√	√	√

Visi : **Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih**								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			buta huruf dalam pendidikan non formal.					
		4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan	4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak	√	√	√	√	√

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

7.1. Kebijakan Umum

Untuk mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas pada masing-masing Misi yang semestinya disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang akan memeuhi empat perspektif sebagai berikut:

a. Kebijakan dengan perspektif pada masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.Penyedia kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas public sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan lain-lain)
b. Kebijakan dengan perspektif proses internal akan diarahkan pada *e-gov*, menuju sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi guna menjamin kemudahan bagi masyarakat dengan kualitas layanan secara prima, cepat mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
c. Kebijakan umum dengan perspektif kelembagaan, hal ini dirahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, trasparan dan akuntabel.
d. Kebijakan umum dengan persektif keuangan., hal ini diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan *asset* dan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntable dan lain-lain, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan (implementasi).

7.2 Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya perencanaan Visi dan Misi Kabupaten Tuban melalui strategi dan arah kebijakan maka disusunlah program pembangunan yang menjadi pedoman bagi tiap OPD dalam merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Misi 1
Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Strategi yang menunjang Misi 1 meliputi:

1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan.
2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan.

Adapun Arah kebijakan dalam menunjang strategi di atas meliputi:

1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, sosial dan kemasyarakatan

Program Prioritas yang mendukung strategi 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Optimalisasi Kemitraan Keagamaan dan Kemasyarakatan
2. Non Program ; pemberian dana hibah (belanja tidak langsung) untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana keagamaan dan operasional pendidikan keagamaan

Program Prioritas yang mendukung strategi 2 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan
2. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4. Program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan
5. Program Pembinaan Kemasyarakatan

Misi 2
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif, dan bersih.

Strategi yang mendukung misi 2 meliputi:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Adapun Arah kebijakan dari strategi tersebut di atas meliputi:

1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan
2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders.
3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur.

Program Prioritas yang mendukung strategi 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4. Program Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
5. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Aset Daerah
9. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
10. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa

Program Prioritas yang mendukung strategi 2 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program peningkatan pelayanan perpustakaan daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Program Pelayanan pendaftaran penduduk
6. Program Pelayanan pencatatan sipil
7. Program Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
9. Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Misi 3
Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.

Strategi yang mendukung misi 3 meliputi :

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang.
3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni.
4. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal.

Adapun arah kebijakan dari strategi tersebut di atas meliputi :

1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan.
2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni.

4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim.

Program Prioritas yang mendukung strategi 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Lingkungan
2. Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan

Program Prioritas yang mendukung strategi 2 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Prioritas yang mendukung strategi 3 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
2. Program Penanganan Kawasan Kumuh
3. Program Pemasangan dan Pemeliharaan lampu penerangan jalan kabupaten
4. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Permukiman
5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah
6. Program Penyediaan, Pemeliharaan, pembangunan RTH Publik dan Sarana umum perkotaan
7. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
8. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
9. Program Pengendalian Banjir
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
12. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal
13. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
14. Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana
15. Non Program ; pemberian dana Hibah / Bansos kepada lembaga pendidikan swasta untuk pengembangan sarana dan prasrana pendidikan dasar

Program Prioritas yang mendukung strategi 4 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
3. Program Fasilitasi Kaum Difabel pada Penyelenggaraan Pelayanan publik daerah

Misi 4
Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

Strategi yang menunjang misi ke 4 meliputi:

1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan.
2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.
4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor.
5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja.
6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah.
7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi.

Adapun Arah kebijakan yang mendukung strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan.
2. Diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan.
3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan.
4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif.
5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja.
6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.
7. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah.

Program prioritas yang mendukung strategi 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
3. Program Peningkatan Kawasan Hortikultura
4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program prioritas yang mendukung strategi 2 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Peternakan

Program prioritas yang mendukung strategi 3 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program penumbuhan Industri kecil dan Menengah
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa

Program prioritas yang mendukung strategi 4 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program prioritas yang mendukung strategi 5 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program prioritas yang mendukung strategi 6 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program prioritas yang mendukung strategi 7 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Misi 5

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Strategi yang menunjang Misi ke 5 meliputi :

1. Mengoptimalkan program keluarga berencana
2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan
5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun Arah Kebijakan Dalam mendukung strategi di atas meliputi :

1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana.
2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.
3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal.
4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan
5. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak

Program prioritas yang mendukung strategi 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Program prioritas yang mendukung strategi 2 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak
2. Program Peningkatan Kesehatan Remaja

3. Program Peningkatan Kesehatan Lansia
4. Program perbaikan gizi masyarakat
5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Program pengembangan lingkungan sehat

Program prioritas yang mendukung strategi 3 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan SMP
3. Non Program ; Pemberian Dana Hibah / Bansos kepada lembaga pendidikan swasta dan organisasi kependidikan untuk operasional dan peningkatan mutu pendidikan formal, Informal, dan Non Formal

Program prioritas yang mendukung strategi 4 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
4. Non Program ; Pemberian Dana Hibah / Bansos kepada organisasi untuk pembinaan olahraga dan kepemudaan

Program prioritas yang mendukung strategi 5 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Perempuan
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
8. Non Program ; pemberian dana hibah / bansos kepada organisasi / lembaga sosial

Berikut ini adalah tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.

Tabel.7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
Misi 1 **Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama**													
1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan	1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan	1	Indeks Toleransi Umat Beragama	n/a	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	1. Program Optimalisasi Kemitraan Keagamaan dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, sosial dan kemasyarakatan										2. Program Pengembangan dan pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan 3. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan 6. Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Semua Kecamatan
Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih													

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan 2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi	2	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB	A	A	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Program Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 6. Program Peningkatan	Bappeda Bappeda Inspektorat Bagian Organisasi SETDA Semua OPD BPPKAD
			3	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
		kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders										pengelolaan keuangan daerah 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Pengelolaan Aset Daerah 9. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa 10. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	BPPKAD BPPKAD Dispemsydes dan KB, semua Kecamatan Dispemsydes dan KB, semua Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan	3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang	4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3. Program peningkatan pelayanan perpustakaan daerah	Dinas PMPTSPTK dan Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	pegawai	berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur										4. Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Program pelayanan pendaftaran penduduk 6. Program pelayanan pencatatan sipil 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 8. Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD dr. R. Koesma
Misi 3 : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah													
1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga	1. Menyelenggarakan penataan,	5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,00	67,20	67,40	67,60	67,80	67,80	1. Program Penataan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	lingkungan hidup 2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang	pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan 2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang										Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan 5. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR Dinas PUPR
2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni 4. Menciptakan	3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni	6	Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi	n/a	43,98	49,49	53,77	58,46	61,54	61,54	1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih 2. Program Penanganan Kawasan Kumuh 3. Program Pemasangan dan	Dinas PRKP Dinas PRKP Dinas PRKP

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
				(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal	4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim	bencana (%)								Pemeliharaan lampu penerangan jalan kabupaten 4. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Permukiman 5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah 6. Program Penyediaan dan Pemeliharaan RTH Publik dan sarana umum perkotaan 7. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan 8. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 9. Program	Dinas PRKP Dinas PRKP Dinas PRKP Dinas PRKP Dinas PRKP Dinas PUPR

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
												Pengendalian Banjir	
												10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
												11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	Dinas Pendidikan
												12. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	Dinas Pendidikan
												13. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	BPBD
												14. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
												15. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
												16. Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana	Dinas Kesehatan
												17. Program Fasilitasi Kaum	Dinas Sosial dan P3A

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
												Difabel pada Penyelenggaraan Pelayanan publik daerah	
Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif													
1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta produk unggulan daerah lainnya	1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan	7	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	5,34	5,46	5,56	5,72	6,00	6,00	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 3. Program Peningkatan Kawasan Hortikultura 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas PUPR

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
												konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR
2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan 3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdaganga 4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor 5. Meningkatka	2. Diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan 3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan 4. Memberi	8 9 10	Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Indeks Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	41.810,6 0,29 3,03	50.590,91 0,23 2,73	55.650,00 0,22 2,63	61.215,00 0,22 2,53	67.336,50 0,21 2,53	74.070,15 0,21 2,43	74.070,15 0,21 2,43	1. Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Perikanan 2. Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Peternakan 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program penumbuhan Industri kecil dan Menengah 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan	Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Koperindag Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Parbudpora Dinas PM, PTSP, dan TK

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	n kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja 6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	kan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif 5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja 6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata										Realisasi Investasi 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Dinas PM, PTSP, dan TK Dinas Pemasydes dan KB
3. Meningkatnya sistem jaringan distribusi hasil produksi, olahan, serta potensi	7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil	7. Membangun infrastruktur dan sarana	11	Indeks Ketimpangan Regional / *Williamson Index*	0,835	0,835	0,833	0,831	0,829	0,827	0,827	1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	produksi	transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah										2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan													
1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang	1. Mengoptimalkan program keluarga berencana 2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan	1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana. 2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat	12	Indeks Pembangunan Manusia	65,52	66,31	67,16	67,22	67,28	67,34	67,34	1. Program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga 2. Program Keluarga Berencana 3. Program Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak 4. Program Peningkatan Kesehatan Remaja 5. Program Peningkatan Kesehatan Lansia 6. Program perbaikan gizi masyarakat 7. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Pemasydes dan KB Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan	terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya. 3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara										8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Program pengembangan lingkungan sehat 10. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 11. Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan SMP 12. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Parbudpora Dinas Parbudpora Dinas Parbudpora

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
		merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal. 4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan											
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah	5. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyara	13	Persentase Penduduk Miskin (%)	17,08	16,50	15,50	14,50	13,50	12,50	12,50	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial, P3A Dinas Sosial, P3A

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Tahun Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Tahun Akhir RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
					(2015)	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)		
	sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana	kat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak										dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Perempuan 7. Program Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas Sosial, P3A Dinas Sosial, P3A Dinas Sosial, P3A Dinas Sosial, P3A Dinas Sosial, P3A

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menyajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Penyajian informasi dalam tabel dibawah ini berdasarkan program-program sesuai urusan-urusan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Program-program ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu program prioritas yang diberi warna dasar hijau adalah program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan amanat kebijakan nasional. Sedangkan program penunjang yang diberi warna dasar putih polos adalah program-program organisasi perangkat daerah yang mendukung kesuksesan program prioritas. Program-program tersebut akan terukur dengan jelas karena sudah ditentukan indikator-indikator kinerja program beserta target dan dana yang dibutuhkan setiap tahunnya. Total anggaran juga direkap pertahun dan untuk keseluruhan jangka periode, serta berdasarkan total prioritas dan peninjang untuk melihat kebutuhan dana pertahun dan keseluruhan periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1		**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**															
1	1	01	**PENDIDIKAN**															
X			**Dinas Pendidikan**															
X	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.763	80%	1.803	80%	1.843	80%	1.883	80%	1.923	80%	9.213	Dinas Pendidikan
X	01	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	225	80%	225	80%	225	80%	225	80%	225	80%	1.125	Dinas Pendidikan
X	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	8	80%	8	80%	8	80%	8	80%	8	80%	41	Dinas Pendidikan
X	01	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	170	B	170	B	170	BB	170	A	170	A	850	Dinas Pendidikan
X	01	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Dinas Pendidikan
X	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Persentase peningkatan SD/MI berakreditasi minimal B (%)	N/A	20%	35.490	25%	34.190	30%	27.690	40%	26.390	50%	12.740	50%	136.500	Dinas Pendidikan
				Persentase sekolah pelaksana kurikulum K-13 (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
				Persentase siswa SD mendapatkan bantuan operasional sekolah (%)	N/A	100%		100%		100%		1005		100%		100%		Dinas Pendidikan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	01	21	Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan SMP	Persentase peningkatan SMP berakreditasi minimal B (%)		20%	9.070	25%	6.050	30%	6.050	40%	6.050	50%	6.050	50%	33.270	Dinas Pendidikan
				Persentase siswa SMP mendapatkan bantuan operasional sekolah (%)	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
X	01	15	Program Peningkatan Kualitas, Disiplin, dan Pemerataan Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik TK telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	94,76%	100%	3.804	100%	3.804	100%	3.804	100%	3.804	100%	3.804	100%	19.019	Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik SD telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	97.80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik SMP telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	99.70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
				Persentase tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi sesuai ketentuan (%)	95.30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik TK/SD/SMP dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu (%)	74.70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan
X	01	19	Program Peningkatan Mutu PAUD dan Dikmas	Persentase Dikmas dan PAUD yang menerapkan standar kualitas pembelajaran sesuai standar		76%	1.415	80%	1.545	84%	1.585	88%	1.625	92%	1.685	92	7.855	Dinas Pendidikan
X	01	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik (%)		72	35.000	76	36.000	80	37.000	84	38.000	88	39.000	88	185.000	Dinas Pendidikan
X	01	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik (%)		76	22.000	80	23.000	84	24.000	88	25.000	92	26.000	92	120.000	Dinas Pendidikan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	01	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal dalam kondisi baik (%)		50	1.400	55	1.500	60	1.600	65	1.700	70	1.800	70	8.000	Dinas Pendidikan
1	1	02	**KESEHATAN**															
X			**Dinas Kesehatan**															
X	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.744	80%	1.872	80%	1.974	80%	2.072	80%	2.183	80%	9.845	Dinas Kesehatan
X	02	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	70%	80%	5.489	80%	3.331	80%	3.459	80%	2.596	80%	2.955	80%	17.830	Dinas Kesehatan
X	02	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	75%	80%	496	80%	545	80%	600	80%	660	80%	726	80%	3.027	Dinas Kesehatan
X	02	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	255	B	106	B	121	BB	127	A	142	A	751	Dinas Kesehatan
X	02	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	20%	32%	159	50%	259	63%	159	78%	254	92%	159	92%	990	Dinas Kesehatan
X	02	27	Program standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas terakreditasi	3%	24%	24.373	48%	26.455	84%	27.617	100%	28.965	100%	31.441	100%	138.851	Dinas Kesehatan
				Persentase klinik terakreditasi	0%	0%		0%		0%		5%		9%		9%		Dinas Kesehatan
				Preosentase Sarana Pelayanan Kesehatan Teregistrasi	n/a	92%		94%		95%		97%		97%		97%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIK sesuai standar	27,27%	30%		36%		42%		51%		60%		60%		Dinas Kesehatan
X	02	17	Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	55.731	Baik	61.416	Baik	63.661	Baik	65.963	Baik	68.334	Baik	315.105	Dinas Kesehatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	02	18	Program Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	97%	95%	2.744	95%		95%	2.972	95%	2.988	95%	3.001	95%	11.705	Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan peserta KB aktif MKJP	27%	35%		37%		40%		47%		50%		50%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi	100%	95%		95%		95%		95%		96%		96%		Dinas Kesehatan
X	02	19	Program Peningkatan Kesehatan Remaja	Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja	80,39%	81%	60	81%	70	81,5%	80	82%	95	82,5%	105	82,5%	410	Dinas Kesehatan
X	02	20	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Persentase cakupan pelayanan kesehatan Lansia	56,5%	60%	43	62%	47	65%	52	86%	56	70%	62	70%	260	Dinas Kesehatan
X	02	15	Program Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75%	80%	4.446	85%	9.544	90%	10.497	95%	11.541	100%	12.692	100%	48.720	Dinas Kesehatan
				Persentase sediaan farmasi memenuhi syarat	0%	35%		45%		50%		60%		75%		75%		Dinas Kesehatan
X	02	16	Program pengawasan makanan dan minuman	Persentase produk makanan minuman memenuhi syarat	43%	50%	54	60%	70	70%	80	80%	90	90%	100	90%	394	Dinas Kesehatan
X	02	25	Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana	Persentase UPTD dengan kondisi baik	74%	83%	35.812	85%	47.249	88%	41.142	91%	70.515	94%	237.902	94%	432.620	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik	79,6%	83%		87%		90%		92%		94%		94%		Dinas Kesehatan
				Persentase Alkes sesuai standar	35%	50%		55%		60%		65%		70%		70%		Dinas Kesehatan
X	02	26	Program peningkatan sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM yang meningkat keterampilan teknisnya	18%	20%	373	23%	585	25%	635	27%	705	28%	750	28%	3.048	Dinas Kesehatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	02	23	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase cakupan desa /kel yang melaksanakan posbindu PTM	9,70%	30%	1.216	40%	1.303	50%	1.585	60%	1.648	70%	1.716	70%	7.468	Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita TB HIV	100%	40%		50%		60%		70%		80%		80%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan diare	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan pneumonia	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		Dinas Kesehatan
				Persentase RFT Rate	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		Dinas Kesehatan
				Persentase penyakit menular dan wabah dilakukan PE	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase desa UCI	78%	91%		91%		92%		92%		93%		93%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa	6%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
X	02	24	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase cakupan Posyandu Aktif Purnama Mandiri	58%	60%	2.719	62%	2.645	64%	2.464	66%	2.385	68%	2492	68%	12.705	Dinas Kesehatan
				Persentase Rumah Tangga Sehat	40,54%	55%		59%		62%		65%		68%		68%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan sekolah sehat purnama dan pesantren Sehat mandiri	2%	3%		4%		5%		6%		7%		7%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan Desa / kel Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	5,2%	10,00%		11%		12%		13%		14%		14%		Dinas Kesehatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	02	22	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih	72,58%	85%	211	86%	275	87%	294	88%	314	90%	335	90%	1.429	Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan penduduk yang menggunakan jamban	71,69%	77%		78%		80%		82%		84%		84%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan Olah raga	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
X	02	21	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Kurang Gizi (underweight)	9,5%	9,5%	655	9,4%	2.444	9,3%	2.586	9,2%	2.731	9,2%	2.877	9,2%	11.293	Dinas Kesehatan
				Persentase Balita Stunting	12,3%	12,3%		12,2%		12,1%		12,0%		12,0%		12,0%		Dinas Kesehatan
				Persentase Balita Wasting (Kurus+Sangat Kurus)	5.40%	5.40%		5.30%		5.20%		5.10%		5.10%		5.10%		Dinas Kesehatan
				Persentase Bumil KEK	7.70%	7.70%		7.60%		7.50%		7.40%		7.40%		7.40%		Dinas Kesehatan
				Persentase ASI Eksklusif	64.60%	64.60%		65.20%		65.40%		65.60%		65.80%		65.80%		Dinas Kesehatan
X	02	30	Program standarisasi pelayanan kesehatan rujukan RSUD Jatirogo	Persentase capaian ALOS RSUD Jatirogo	0%	0%		3%	2.500	3%	3.500	3%	4.500	3%	4.500	3%	15.000	Dinas Kesehatan
X			**RSUD dr R. Koesma**															
X	02	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD		CC		B	72	B	84	BB	91	A	325	A	572	RSUD dr R. KOESMA
X	02	28	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Prosentase pemenuhan sarana prasarana administrasi dan umum	N/A	65	25.687	66	26.700	67	29.600	68	33.900	69	38.200	69	154.087	RSUD dr R. KOESMA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prosentase pemenuhan sarana prasarana program dan pelaporan	N/A	65		66		67		68		69		69		RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase pemenuhan sarana prasarana medis	N/A	65		66		67		68		69		69		RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase pemenuhan sarana prasarana keperawatan	N/A	65		66		67		68		69		69		RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase pemenuhan sarana prasarana penunjang	N/A	65		66		67		68		69		69		RSUD dr R. KOESMA
X	02	17	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase pasien penduduk tuban rawat jalan gratis	N/A	63.02	380		330		330		310		310		1.660	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase pasien terlantar yang meninggal dunia yang dilayani	N/A	63.02												RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase jumlah anggota kelompok lansia yang dilayani	N/A	63.02												RSUD dr R. KOESMA
X	02	29	Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (RSUD dr R. KOESMA)	Capaian standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)	55,68	80.00	132	80.00	150	80.00	200	80.00	176	80.00	193	80.00	851	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar tata kelola kepemimpinan dan pengarahan (TKP)	59.18	80.00	2.437	80.00	2.680	80.00	3.653	80.00	4.396	80.00	5.229	80.00	18.394	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar kualifikasi dan pendidikan staf (KPS)	73.74	80.00	610	80.00	671	80.00	739	80.00	969	80.00	1.066	80.00	4.055	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase capaian standar manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK)	66.48	80.00	5.403	80.00	5.944	80.00	10.718	80.00	12.490	80.00	13.962	80.00	48.516	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian manajemen pengelolaan obat (MPO)	66.67	80.00	12.188	80.00	22.053	80.00	33.258	80.00	36.584	80.00	40.246	80.00	144.329	RSUD dr R. KOESMA

Pemerintah Kabupaten Tuban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban

Tahun 2016-2021

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Capaian Standar Hak pasien dan keluarga (HPK)	77.5	80.00	1.091	80.00	1.236	80.00	1.442	80.00	1.700	80.00	1.870	80.00	7.339	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar pendidikan pasien dan keluarga (PPK)	62.5	80.00	175	80.00	220	80.00	300	80.00	330	80.00	363	80.00	1.388	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar sasaran keselamatan pasien (SKP)	60.42	80.00	53	80.00	58	80.00	64	80.00	70	80.00	77	80.00	321	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar pencegahan dan pegendalian infeksi (PPI)	76.51	80.00	3.346	80.00	3.681	80.00	4.469	80.00	4.957	80.00	5.493	80.00	21.946	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian Standar M.Dgs	76.32	80.00	**0**	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase capaian standar Asesmen Pasien (AP)	82.34	80.00	5.217	80.00	5.739	80.00	10.668	80.00	11.825	80.00	14.190	80.00	47.640	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar pelayanan pasien (PP)	81.08	80.00	2.393	80.00	2.632	80.00	4.682	80.00	5.150	80.00	6.220	80.00	21.077	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar Asuhan pasien dan kontinuitas pelayanan (APK)	76.19	80.00	846	80.00	931	80.00	1.079	80.00	1.187	80.00	1.450	80.00	5.493	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar manajemen komunikasi dan informasi (MKI)	78.44	80.00	760	80.00	835	80.00	1.193	80.00	1.312	80.00	1.475	80.00	5.575	RSUD dr R. KOESMA
				Capaian standar pelayanan Anesthesi dan pembedahan (PAB)	89.22	80.00	**0**	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentasi karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	60,00	60,00	1.074	60,00	1.182	60,00	1.300	60,00	1.430	60,00	1.675	60,00	6.660	RSUD dr R. KOESMA
				Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	7.55	8.00	58.723	8,5	68.805	9.00	72.361	9,5	99.567	10.00	133.313	10.00	432.768	RSUD dr R. KOESMA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prosentase capaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	77	77.00	156	78.00	66	79.00	173	80.00	80	80.00	208	80.00	682	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase capaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja	50	55.00	50	60.00	55	65.00	61	70.00	67	75.00	73	75.00	305	RSUD dr R. KOESMA
				Prosentase Unit Pelayanan Yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	80			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		RSUD dr R. KOESMA
1	1	03	**PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG**															
X			**Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**															
X	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.345	80%	1.480	80%	1.628	80%	1.791	80%	1.970	80%	8.213	DINAS PUPR
X	03	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	1.975	80%	2.173	80%	2.390	80%	2.629	80%	2.892	80%	12.058	DINAS PUPR
X	03	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	83	80%	92	80%	101	80%	111	8%	122	80%	510	DINAS PUPR
X	03	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	135	B	149	B	163	B	180	A	198	A	824	DINAS PUPR
X	03	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	DINAS PUPR
X	03	15	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik	70.50%	71.70%	173.507	73.80%	169.048	75.70%	215.608	77.40%	233.159	77.17%	161.744	77.2	953.066	DINAS PUPR

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase jembatan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik	4.30%	46.07%		57.60%		69.10%		99.97%		99.97%		99.97%		DINAS PUPR
X	03	16	Program Pengendalian Banjir	Presentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	35.02%	51.10%	35.200	62.90%	31.007	76.01%	12.001	82.80%	37.375	96.80%	20.100	96.80%	135.683	DINAS PUPR
X	03	17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase sumberdaya air yang dikelola dengan baik	40.95%	74.30%	6.150	89.95%	13.715	92.65%	4.720	95.11%	4.845	99.34%	7.350	99.34%	36.780	DINAS PUPR
X	03	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	47,5%	53,77%	16.720	65,41%	19.540	74,93	15.625	81,14%	10.095	95,54%	28.325	95,54%	90.305	DINAS PUPR
X	03	22	Program Evaluasi, Monitoring, dan Survei Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung sesuai SLF BG (%)	N/A	-	-	25%	200	26%	200	27%	200	28%	200	29%	800	DINAS PUPR
X	03	19	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersusunnya rencana tata ruang (%)	N/A	15%	1.200	20%	1.300	25%	1.400	30%	1.500	35%	1.600	35%	7.000	DINAS PUPR
X	03	20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Luas Ijin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan peruntukannya		-	-	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	600	DINAS PUPR
X	03	21	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase cakupan tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten	100%	-	-	100%	10	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PUPR
X			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**															
X	03	19	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen RTRW ditetapkan tepat waktu		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prosentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan daerah dalam dokumen Renja SKPD dengan dokumen RTRW		50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
X	03	20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Luas Ijin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan peruntukannya	N/A	100%	1.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
1	1	04	**PERUMAHAN**															
X			**Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman**															
X	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.445	80%	1.590	80%	1.748	80%	1.923	80%	2.116	80%	8.822	DINAS PRKP
X	04	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	80%	80%	2.330	80%	2.563	80%	2.819	80%	3.101	80%	3.411	80%	14.225	DINAS PRKP
X	04	05	Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	154	80%	169	80%	186	80%	205	80%	225	80%	939	DINAS PRKP
X	04	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	135	B	149	B	163	BB	180	A	198	A	824	DINAS PRKP
X	04	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	DINAS PRKP
X	04	16	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	49,5%	5,7%	3.500	23,3%	3.850	30,3%	4.235	33,2%	4.659	43,2%	8.152	43,2%	24.396	DINAS PRKP
X	04	17	Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Persentase pengurangan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) (%)	N/A	0,9%	14.520	1,6%	14.400	2,4%	15.600	3,1%	16.800	3,9%	18.000	3,9%	79.320	DINAS PRKP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	04	23	Program Peningkatan PSU Permukiman Kawasan perkotaan	Persentase Cakupan layanan PSU Jalan Lingkungan kawasan perkotaan	66%	68%	3.700	72%	4.070	76%	4.477	80%	4.925	84%	5.417	84%	22.589	DINAS PRKP
X	04	21	Program Penyediaan, Pembangunan, serta Pemeliharaan RTH Publik dan Sarana Perkotaan	Persentase kenaikan luas RTH Publik		4,50	5.800	4,83	6.000	4,83	6.000	4,83	6.000	4,83	6.000	20,00	29.500	DINAS PRKP
				Persentase Sarana Umum Perkotaan yang terbangun dan terpelihara		70		72		74		76		78		80		DINAS PRKP
X	04	22	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Persentase kenaikan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah (%)		9,49	5.000	9,49	5.000	9,49	5.000	9,49	5.000	9,49	5.000	47,45	25.000	DINAS PRKP
X	04	19	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Drainase Lingkungan Permukiman	Persentase Pengurangan luas area genangan pada kawasan permukiman		5	6.000	5	6.000	5	6.000	5	6.000	5	6.000	25	30.000	DINAS PRKP
X	04	20	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah	Persentase peningkatan penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang memadai		5	5.500	5	5.500	5	5.500	5	5.500	5	5.500	25	27.500	DINAS PRKP
X	04	15	Program peningkatan kinerja pengelolaan sarana prasarana air bersih	Persentase peningkatan penduduk terlayani SPAM perpipaan terlindungi		10	18.000	10	18.000	10	18.000	10	18.000	10	18.000	50	90.000	DINAS PRKP
X	04	18	Program Pemasangan dan Pemeliharaan lampu penerangan jalan kabupaten	Persentase lampu jalan yang terpasang pada daerah rawan (%)	71,4%	75,5%	8.800	79,7%	4.050	83,9%	4.200	88,03%	4.350	92,2%	450	92,2%	21.850	DINAS PRKP
1	1	05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
X			**Kantor Kesatuan Bangsa & Politik**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	80%	270	80%	270	80%	270	80%	270	80%	270	80%	1.349	KESBANGPOL
X	05	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi (%)	100%	80%	80.00	80%	80	80%	80	80%	80	80%	80	80%	400	KESBANGPOL
X	05	05	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase aparatur OPD yang mematuhi peraturan kedinasan (%)	100%	80%	5.73	80%	9	80%	6	80%	6	80%	9	80%	36	KESBANGPOL
X	05	03	Program peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	nilai LAKIP OPD		CC	60	B	60	B	60	BB	60	A	60	A	300	KESBANGPOL
X	05	02	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	KESBANGPOL
X	05	15	Program pengembangan dan pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Persentase angka penyelesaian konflik agama dan kemasyarakatan	6 konflik	< 12 konflik	2.208	< 10 konflik	2.338	< 9 konflik	2.501	< 7 konflik	2.701	< 5 konflik	2.701	< 5 konflik	12.451	KESBANGPOL
				Persentase angka Ormas yang terdaftar	0,5	> 50%		> 55%		> 60%		> 65%		> 70%		> 70%		KESBANGPOL
				persentase angka kelompok sasaran	0,5	> 50%		>55%		> 60%		> 65%		> 70%		> 70%		KESBANGPOL
				Persentase angka partisipasi Pemilih	0,5208	> 52,08%		> 54%		> 55%		> 55%		> 55%		> 55%		KESBANGPOL
				Persentase angka konflik sosial	0,5	> 50%		> 55%		> 60%		> 65%		> 70%		> 70%		KESBANGPOL
X			**Satuan Polisi Pamong Praja**															
X	05	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	434	80%	477	80%	525	80%	578	80%	635	80%	2.650	SATPOL PP
X	05	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	80%	80%	580	80%	638	80%	702	80%	772	80%	849	80%	3.541	SATPOL PP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	05	05	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	493	80%	543	80%	597	80%	657	80%	722	80%	3.012	SATPOL PP
X	05	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	60	B	66	B	73	BB	80	A	88	A	366	SATPOL PP
X	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kenaikan Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	5,0%	5%	2.366	5%	2.978	5%	3.625	5%	4.151	5%	4.688	30%	17.808	SATPOL PP
				Persentase kenaikan Aparatur SatpolPP yang telah lulus bimbingan TekFnis pemahaman perundang-undangan daerah (%)	65,0%	5%		5%	0	5%		5%	0	5%		90%		SATPOL PP
				Persentase kenaikan Aparatur Yang telah lulus mengikuti bimbingan teknis kesemaptaan (%)	75,0%	5%		5%	0	5%		5%	0	5%		100%		SATPOL PP
X	05	16	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat	Persentase kasus Pelanggaran Perundang-undangan Daerah yang terselesaikan secara Non Yustisia (%)	35,2%	80%	1.051	40%	1.051	45%	1.051	50%	1.081	55%	1.087	55%	5.321	SATPOL PP
				Persentase kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan secara Yustisia	14,8%	68,1 %		30%		35%		40%		40%		40%		SATPOL PP
X	05	17	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Gangguan Terhadap Kegiatan Pemerintahan (%)	61,5%	65%	2.546	68%	2.546	72%	2.596	77%	3.115	80%	3.109	80%	13.912	SATPOL PP
				Persentase Gangguan Terhadap Ketertiban Umum	54,5%	75%		63%		68%		76%		80%		80%		SATPOL PP
X	05	18	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan	Cakupan Jumlah Petugas Satlinmas	N/A	60%	1.030	65`%	1.030	70%	1.030	75%	1.030	80%	1.030	80%	5.149	SATPOL PP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Petugas Satlinmas Yang Terlatih (%)	N/A	60%		65%		70%		75%		80%		80%		SATPOL PP
				Persentase Desa Rawan Konflik Yang Mendapatkan Pembinan (%)	N/A	60%		65%		70%		75%		80%		80%		SATPOL PP
X	05	19	Program Pemberantasan Barang Cukai Ilegal (DBHCHT)	Presentase Peredaran Rokok Ilegal	5,84 %		220		220		231		243		255		1.169	SATPOL PP
X			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**															
X	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	477	80%	525	80%	577	80%	635	80%	699	80%	2.914	BPBD
X	05	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	1.599	80%	1.759	80%	1.935	80%	2.129	80%	2.341	80%	9.763	BPBD
X	05	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	38	80%	42	80%	46	80%	51	80%	56	80%	234	BPBD
X	05	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	60	B	66	B	73	BB	80	A	88	A	366	BPBD
X	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	BPBD
X	05	20	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah desa tangguh bencana terhadap desa rawan bencana	4%	13%	500	23%	650	32%	800	41%	950	51%	1.100	51%	4.000	BPBD
X	05	21	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Sarana Prasarana rusak akibat bencana yang ditangani	65%	75%	455	80%	455	85%	455	90%	455	95%	455	95%	2.275	BPBD

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	05	22	Program Penanganan Darurat dan Logistik	Prosentase Penanganan Kejadian dan korban dalam pengurangan risiko bencana (%)	100%	100%	1.780	100%	1.855	100%	1.930	100%	2.005	100%	2.090	100%	9.660	BPBD
X			**Kecamatan**															
X	05	23	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan dan Pelanggaran yang ditindaklanjuti		100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	1.000	Kecamatan
1	1	06	**SOSIAL**															
X			**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**															
X	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	714	80%	785	80%	864	80%	950	80%	1.045	80%	4.359	DINSOS P3A
X	06	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	264	80%	290	80%	319	80%	351	80%	387	80%	1.612	DINSOS P3A
X	06	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	34	80%	38	80%	41	80%	45	80%	50	80%	209	DINSOS P3A
X	06	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD		CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	DINSOS P3A
X	06	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	DINSOS P3A
X	06	16	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Besaran PMKS yang mendapatkan bantuan dan pemberdayaan.	88% (880 orang)	89%	2.345	90%	2.345	91%	2.655	92%	2.655	93%	2.965	93%	12.965	DINSOS P3A
X	06	15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Besaran PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dasar.	88% (102.165 orang)	89%	770	90%	770	91%	870	92%	870	93%	970	93%	4.250	DINSOS P3A

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	06	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kenaikan Besaran partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	47,77% (450/942)	5%	630	5%	630	5%	665	5%	665	5%	700	72,77%	3.290	DINSOS P3A
X	06	20	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Besaran PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial		90	900	90	900	90	900	90	900	90	900	450	4.500	DINSOS P3A
X	06	21	Program Fasilitasi Kaum Difabel pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah	Persentase kenaikan rekomendasi penyediaaan fasilitas kaum difabel yang ditindaklanjuti		5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	25	250	DINSOS P3A
X	06	18	Program Pengembangan Areal Pemakaman	Persentase Besaran Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terpelihara.	100%	100%	55	100%	55	100%	60	100%	60	100%	65	100%	295	DINSOS PP
X	06	19	Program Penanggulangan dan Bantuan Bencana	Persentase Besaran korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan.	100%	100%	30.000	100%	30.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	40.000	100%	170.000	DINSOS PP
1	2		**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**															
1	2	01	**TENAGA KERJA**															
X			**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**															
X	01	15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Besaran Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.	75,72% (792 orang)	942 orang	325	1.092 orang	325	1.242 orang	350	1.392 orang	350	1.542 orang	375	1.542 orang	1.725	DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Jumlah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	64,80% (648 orang)	768 orang		888 orang		1.008 orang		1.128 orang		1.248 orang		1.248 orang		DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	01	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Besaran Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan.	64 PP	89 PP	615	114 PP	615	139 PP	645	164 PP	645	189 PP	680	189 PP	2.521	DPMPTSP & Tenaga Kerja

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Besaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yg didaftarkan.	18 PKB	20 PKB		22 PKB		24 PKB		26 PKB		28 PKB		28 PKB		DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Jumlah Besaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dicatatkan.	460 PKWT	760 PKWT		.060 PKWT		1.360 PKWT		1.660 PKWT		1.960 PKWT		1.960 PKWT		DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Jumlah Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan.	6 LKS Bipartit	11 LKS Bipartit		16 LKS Bipartit		21 LKS Bipartit		26 LKS Bipartit		31 LKS Bipartit		31 LKS Bipartit		DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Persentase Besaran penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK).	55%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Persentase Besaran pekerja yg menjadi peserta program BPJS.	55%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		DPMPTSP & Tenaga Kerja
				Jumlah Besaran pekerja anak yang kembali sekolah.	63 anak	100 anak		100 anak		100 anak		100 anak		100 anak		100 anak		DPMPTSP & Tenaga Kerja
1	2	02	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
X			**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Anak**															
X	02	15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Persentase tingkat penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	n/a	5%	750	5%	750	5%	750	5%	750	5%	750	25%	3.750	DINSOS P3A
X	02	16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Perempuan yang menjadi Kepala Keluaga secara mandiri	0,7	0,7	90		90		70		105		80		435	DINSOS P3A
X	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Perempuan.	Rasio Partisipasi Perempuan di bidang Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			485		485		485		485		485		2.425	DINSOS P3A

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	03	**PANGAN**															
X			**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**															
X	03	15	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Persentase ketahanan pangan	12%	12%	775	10%	825	8%	875	6%	925	5%	975	5%	4.375	Dinas Pertaian & Ketahanan Pangan
1	2	04	**PERTANAHAN**															
X			**Sekretariat Daerah**															
X	04	15	Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase Pelaksanaan Penataan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah	N/A	15	75	-	-	-	-	-	-	-	-	15	75	Sekretariat Daerah
X	04	16	Program Pengendalian dan Penataan Keagrariaan	Persentase jumlah desa dengan tanah Negara yang telah terpetakan (%)		-	-	2	75	2	75	3	75	3	75	3	300	Sekretariat Daerah
				Persentase jumlah desa yang telah terinventarisasi ke-rupabumian-nya (%)				55		60		65		70		70		Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi pemanfaatan tanah Negara dan penetapan lokasi telah sesuai ketentuan (%)				100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
1	2	05	**LINGKUNGAN HIDUP**															
X			**Dinas Lingkungan Hidup**															
X	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	455	80%	501	80%	551	80%	606	80%	666	80%	2.778	Dinas Lingkungan Hidup
X	05	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	153	80%	168	80%	185	80%	204	80%	224	80%	934	Dinas Lingkungan Hidup

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	05	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	75	80%	83	80%	91	80%	100	80%	110	80%	459	Dinas Lingkungan Hidup
X	05	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	75%	519	Dinas Lingkungan Hidup
X	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Dinas Lingkungan Hidup
X	05	15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang LH	20%	20%	350	40%	775	60%	810	80%	895	100%	930	100%	3.760	Dinas Lingkungan Hidup
				Penurunan beban pencemar badan air (COD)	98,4 Ton	19,7 Ton		19,7 Ton		19,7 Ton		19,7 Ton		19,7 Ton		19,7 Ton		Dinas Lingkungan Hidup
				Berkurangnya Luasan Lahan Kritis	-	15 Ha		15 Ha		15 Ha		15 Ha		15 Ha		75 Ha		Dinas Lingkungan Hidup
				Prosentase pelayanan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		Dinas Lingkungan Hidup
X	05	19	Program Penataan Lingkungan	Prosentase rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan sesuai tata laksana	100%	100%	200	100%	595	100%	200	100%	200	100%	200	100%	1.395	Dinas Lingkungan Hidup
				Prosentase Penyelesaian Dokumen Penataan Lingkungan Yang diamanatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup
X	05	18	Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Tingkat Reduksi sampah pada TPA	0%	5%	5.670	10%	2.986	15%	2.045	20%	2.190	25%	2.320	25%	15.211	Dinas Lingkungan Hidup
				Prosentase permohonan ijin limbah B3 yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	05	17	Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan	Cakupan RT yang berstatus KIB pada Kawasan Perkotaan	2.293 RT	5 RT	750	10 RT	875	10 RT	950	10 RT	1.000	10 RT	1.075	45 RT	4.650	Dinas Lingkungan Hidup
				Luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	0%	2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		10 Ha		Dinas Lingkungan Hidup
				Prosentase sekolah berbudaya lingkungan	11%	13%		15%		17%		20%		22%		22%		Dinas Lingkungan Hidup
X	05	16	Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Terwujudnya pengelolaan laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025 akreditasi dan registrasi	16 % para-meter ter-akredi-tasi (8 dari 50 para-meter)	25%	990	33%	1.575	42%	1.060	50%	1.270	58%	4.625	58%	9.520	Dinas Lingkungan Hidup
1	2	06	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**															
X			**Dinas Kependudkan & Pencatatan Sipil**															
X	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	744	80%	818	80%	900	80%	990	80%	1.089	80%	4.540	Dinas DUKCAPIL
X	06	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	80%	80%	262	80%	288	80%	317	80%	349	80%	384	80%	1.600	Dinas DUKCAPIL
X	06	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	40	80%	44	80%	48	80%	53	80%	58	80%	243	Dinas DUKCAPIL
X	06	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	60	B	66	B	73	BB	80	A	88	A	366	Dinas DUKCAPIL
X	06	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	35	80%	39	80%	42	80%	47	80%	51	80%	214	Dinas DUKCAPIL
X	06	15	Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu (%)	100%	100%	1.175	100%	1.625	100%	1.725	100%	1.625	100%	1.725	100%	7.875	Dinas DUKCAPIL

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	06	16	Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase penerbitan akta pencatatan sipil tepat waktu (%)	100%	100%	480	100%	575	100%	405	100%	405	100%	405	100%	2.270	Dinas DUKCAPIL
X	06	17	Program pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase layanan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan (%)	100%	100%	1.113	100%	783	100%	783	100%	783	100%	783	100%	4.245	Dinas DUKCAPIL
X	06	18	Program pemanfaatan data dan pengembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase OPD di lingkup Pemkab Tuban yang memanfaatkan data kependudukan	44,45%	48,89%	752	51,12%	752	53,34%	752	55,56%	752	57,78%	752	57,78%	3.760	Dinas DUKCAPIL
1	2	07	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**															
X			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana**															
X	07	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	85%	1.134	80%	1.230	80%	1.310	80%	1.375	80%	1.451	80%	6.499	Dinas Pemasydes & KB
X	07	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Persentase Sarana dan Prasarana Layak Fungsi %	75%	80%	1.489	80%	674	80%	709	80%	761	80%	796	80%	4.427	Dinas Pemasydes & KB
X	07	05	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Pencapaian Peningkatan disiplin Aparatur	75%	80%	47	80%	122	80%	122	80%	123	80%	123	85%	536	Dinas Pemasydes & KB
X	07	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pencapaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	5 Paket	250	Dinas Pemasydes & KB
X	07	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP OPD	-	CC	60	B	65	B	68	BB	68	A	68	A	328	Dinas Pemasydes & KB

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	07	15	Program Peningkatan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa dengan administrasi baik (%)	N/A	60%	980	70%	1.670	80%	1.670	90%	1.670	100%	1.670	100%	7.660	Dinas Pemasydes & KB
X	07	16	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Persentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60%	1.226	70%	2.053	80%	2.077	90%	2.347	100%	2.397	100%	10.100	Dinas Pemasydes & KB
X	07	17	Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan SOTK telah seusai ketentuan (%)	N/A	60%	900	70%	2.745	80%	3.975	90%	2.825	100%	2.975	100%	13.420	Dinas Pemasydes & KB
X	07	18	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan SOTK telah seusai ketentuan (%)	N/A	60%	100	70%	1.730	80%	3.050	90%	1.800	100%	1.800	100%	8.480	Dinas Pemasydes & KB
X	07	19	Program peningkatan tata kelola Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase kelembagaan masyarakat desa dengan administrasi baik (%)	N/A	60%	420	70%	460	80%	1.175	90%	1.200	100%	1.400	100%	4.655	Dinas Pemasydes & KB
				Persentase kelembagaan masyarakat desa yang terllibat dalam kegiatan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) (%)		60%		70%		80%		90%		100%		100%		Dinas Pemasydes & KB
X	07	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Persentase desa memiliki BUMDES (%)	N/A	7,4%	875	7,4%	925	7,4%	925	7,4%	950	7,4%	950	37%	4.625	Dinas Pemasydes & KB
				Persentase UPK dengan kriteria baik (%)	N/A	42,1%		42,1%		42,1%		42,1%		42,1%		210,5%		Dinas Pemasydes & KB
X			**KECAMATAN**															
X	07	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Jumlah BUMDes	N/A	20	313	60	344	80	379	100	417	120	458.2633	120	1.911	Kecamatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	07	16	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60%	626	70%	689	80%	757	90%	833	100%	917	100%	3.822	Kecamatan
				Persentase lembaga desa beradministrasi baik sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60%		70%		80%		90%		100%		100%		Kecamatan
1	2	08	**PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA**															
X			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana**															
X	08	16	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS mengkuti program keluarga berencana	75,00%	80%	600	80%	600	85%	600	85%	650	90%	650	90%	3.100	Dinas Pemasydes & KB
				Persentase Akseptor KB yang mengikuti MKJP (%)	75,00%	80%		80%		85%		85%		90%		90%		Dinas Pemasydes & KB
				Persentase Wanita Menikah dibawah 20 Tahun	29,20%	25%		25%		20%		20%		15%		15%		Dinas Pemasydes & KB
X	08	18	Program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Persentase Angka Kelahiran	14,30%	14,30%	3.030	14,30%	2.730	14,3%	1.830	14,3%	1.830	14,3%	1.830	14,3%	11.250	Dinas Pemasydes & KB
				Persentase Pra Sejahtera	30,00%	30%		25%		25%		20%		20%		20%		Dinas Pemasydes & KB
1	2	09	**PERHUBUNGAN**															
X			**Dinas Perhubungan**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.364	80%	1.500	80%	1.650	80%	1.815	80%	1.997	80%	8.327	DISHUB
X	09	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	525	80%	578	80%	635	80%	699	80%	769	80%	3.205	DISHUB
X	09	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	188	80%	207	80%	227	80%	250	80%	275	80%	1.146	DISHUB
X	09	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	DISHUB
X	09	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	DISHUB
X	09	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang mengalami kemacetan (%)	44%	42%	843	39%	645	36%	1.695	22%	1.695	19%	1.695	19%	6.573	DISHUB
X	09	20	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase sarana prasarana bidang perparkiran yg tersedia dan berfungsi dengan baik (%)	90%	90%	998	90%	10.662	90%	3.662	90%	962	90%	662	90%	16.946	DISHUB
X	09	16	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji (%)	95%	95%	475	95%	1.345	95%	1.245	95%	2.045	95%	2.045	95%	7.155	DISHUB
X	09	18	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase fasilitas sarana prasarana bidang angkutan yg tersedia dan berfungsi dengan baik (%)	90%	90%	840	90%	1.050	90%	1.060	90%	875	90%	875	90%	4.700	DISHUB
X	09	19	Program Peningkatan Kinerja Perhubungan Laut	Persentase kapal yang memiliki Pas kapal	16%	30%	226	50%	180	60%	180	70%	180	90%	180	90%	946	DISHUB
X	09	17	Program Peningkatan Alat Perlengkapan Jalan	Persentase alat perlengkapan jalan yang terpasang (%)	50%	55%	4.255	60%	4.315	65%	4.365	70%	4.850	75%	4.590	75%	22.375	DISHUB
1	2	10	**KOMUNIKASI & INFORMASI**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X			**Dinas Komunikasi & Informatika**															
X	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	281	80%	309	80%	340	80%	374	80%	411	80%	1.716	DKI
X	10	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	80	80%	88	80%	97	80%	106	80%	117	80%	488	DKI
X	10	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	29	80%	32	80%	35	80%	38	80%	42	80%	175	DKI
X	10	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	DKI
X	10	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	DKI
X	10	17	Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data	persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data		20%	150	25%	175	30%	175	35%	175	40%	175	40%	850	DKI
				persentase desa telah mengakses sistem informasi data		15%		20%		25%		30%		35%		35%		DKI
X	10	15	Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika	Persentase Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika di Kecamatan (%)		75%	1.200	80%	2.422	85%	2.400	90%	2.400	95%	2.400	95%	10.822	DKI
				Persentase Cakupan pelayanan Jaringan Teknologi Informatika di Desa/Kelurahan (%)		75%		80%		85%		90%		95%		95%		DKI
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Informasi Terintegrasi		45%		50%		95%		95%		95%		95%		DKI

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	10	16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat maksimal 10 hari (%)	80%	80%	2.481	80%	2.847	100%	2.962	100%	2.962	100%	2.962	100%	14.214	DKI
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal tujuh hari	60%	80%		80%		100%		100%		100%		100%		DKI
				Persentase Penyebaran informasi pembangunan	60%	80%		80%		100%		100%		100%		100%		DKI
1	2	11	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**															
X			**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**															
X	11	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	75%	80%	2.719	80%	2.992	80%	3.290	80%	3.617	80%	3.976	80%	16.594	Dinas Koperindag
X	11	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	75%	80%	1.494	80%	1.468	80%	1.268	80%	768	80%	768	80%	5.764	Dinas Koperindag
X	11	05	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Pencapaian Peningkatan disiplin Aparatur	75%	80%	174	80%	246	80%	246	80%	246	80%	246	80%	1.160	Dinas Koperindag
X	11	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pencapaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	I Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	5 Paket	500	Dinas Koperindag
X	11	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Pencapaian Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	-	CC	60	B	46	B	50	BB	51	A	52	A	258	Dinas Koperindag
X	11	15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	40,35%	45%	850	50%	1.440	55%	1.560	60%	1.610	65%	1.640	65%	7.100	Dinas Koperindag

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	11	17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wiirausaha baru (%)	30%	35%	1.850										1.850	Dinas Koperindag
				Persentase Peningkatan Usaha UMKM	25%	50%												Dinas Koperindag
X	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil	Persentase pertumbuhan wiirausaha baru (%)	30%			35%	1.788	35%	1.984	35%	1.969	35%	2.182	35%	7.922	Dinas Koperindag
				Persentase Peningkatan Usaha UMK	25%			50%		50%		50%		50%		50%		Dinas Koperindag
1	2	12	**PENANAMAN MODAL**															
X			**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**															
X	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.041	80%	1.146	80%	1.260	80%	1.386	80%	1.525	80%	6.358	DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	12	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	736	80%	810	80%	891	80%	980	80%	1.078	80%	4.493	DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	12	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	29	80%	32	80%	36	80%	39	80%	43	80%	179	DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	12	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	60	B	66	B	73	BB	80	A	88	A	366	DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	12	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	125	80%	138	80%	151	80%	166	80%	183	80%	763	DPMPTSP & Tenaga Kerja
X	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor yang terjaring dalam pelaksanaan promosi dan	6	0	0	6	800	8	850	10	900	12	900	36	3.450	DPMPTSP & Tenaga Kerja

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kerjasama investasi														
X	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi di Kabupaten	-	10%	0	15%	700	20%	400	25%	450	30%	500	30%	2.050	DPMPTSP & Tenaga Kerja
1	2	13	**KEPEMUDAAN & OLAHRAGA**															
X			**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga**															
X	13	15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan pada tahun n (%)		100	160	100	163	100	185	100	188	100	210	100	905	Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
				Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dalam pembangunan pada tahun n (%)		70		75		80		85		90		90		Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
X	13	16	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Peningkatan Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi pada tahun n	100%	111%	200	110%	215	109%	240	108%	245	104%	270	104%	1.170	Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
				Persentase Atlit Berprestasi pada tahun n	100%	105%	370	105%	380	105%	405	105%	415	105%	370		1.940	Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
				Prosentase Peningkatan Jumlah Cabang Olahraga Tradisional/Difabel Daerah pada tahun n	100%	100%	35	140%	35	114%	35	113%	35	111%	35	111%	175	Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
				Persentase Peningkatan Atlit Olahraga Tradisional/Difabel pada tahun n (%)	100%	101%		101%		101%		101%		101%		101%		Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	13	17	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase cakupan sarana prasarana olahraga per kecamatan (%)	20%	25%	2.000	30%	2.000	35%	2.000	40%	2.000	45%	2.000	45%	10.000	Dinas Pariwisata, kebudayaan &OR
1	2	16	**KEBUDAYAAN**															
X			**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga**															
X	16	16	Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Jumlah Pelaku Seni dan Budaya Daerah pada tahun n (%)		75	1.640	80	1.760	85	1.965	90	2.090	95	2.150	95	9.605	Dinas Parbudpora
				Persentase Jumlah Pementasan Seni Budaya pada Destinasi Wisata (%)		75		80		85		90		95		95		Dinas Parbudpora
X	16	15	Program Pengembangan dan Ketahanan Nilai Budaya	Persentase Jumlah Benda cagar budaya dalam kondisi baik (%)		75	251	80	652	85	687	90	697	95	727	95	3.013	Dinas Parbudpora
				Persentase peningkatan jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina pada tahun n		75		80		85		90		95		95		Dinas Parbudpora
1	2	14	**STATISTIK**															
X			**Dinas Komunikasi dan Informatika**															
X	14	15	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase elemen data dan informasi statistic sektoral terpublikasi		0	0	50	400	60	400	70	400	80	400	80	1.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	2	17	**PERPUTAKAAN**															
X			**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	938	80%	1.031	80%	1.135	80%	1.248	80%	1.373	80%	5.725	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	238	80%	262	80%	288	80%	317	80%	349	80%	1.455	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	59	80%	65	80%	72	80%	79	80%	87	80%	361	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	15	Program peningkatan pelayanan perpustakaan	Persentase penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan perpustakaan	70%	80%	4.200	80%	4.300	80%	4.400	80%	4.500	80%	4.600	80%	2.200	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	17	16	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya akses pelayanan perpustakaan daerah (%)	30%	45%	2.400	60%	2.500	75%	2.600	90%	2.700	100%	2.800	100%	13.000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Persentase perpustakaan daerah telah memiliki sistem automasi (%)	30%	45%		60%		80%		90%		100%		100%		Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Persentase perpustakaan mitra telah memiliki sistem automasi (%)	N/A	10%		20%		30%		40%		50%		50%		Dinas Perpustakaan & Kearsipan
1	2	18	**KEARSIPAN**															
X			**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	18	15	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip inaktif/statis yang telah tertata	-	35%	1.233	40%	1.858	45%	1.068	50%	1.078	55%	1.088	55%	6.325	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
X	18	16	Program Pembinaan Kearsipan	Persentase peningkatan OPD telah menerapkan sistem kearsipan secara baku (%)	-	5%	195	5%	225	5%	225	5%	230	5%	235	5%	1.110	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Persentase Desa/Kelurahan telah menerapkan sistem kearsipan secara baku (%)	23%	39%						84%		100%		100%		Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	0		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
2	0	01	**PERIKANAN**															
X			**Dinas Perikanan dan Peternakan**															
X	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	80%	957	80%	1.053	80%	1.158	80%	1.274	80%	1.401	80%	5.843	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	N/A	80%	533	80%	586	80%	645	80%	709	80%	780	80%	3.254	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	N/A	80%	77	80%	85	80%	93	80%	103	80%	113	80%	471	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	B	285	B	314	B	345	BB	379	A	417	A	1.740	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	N/A	75%	50	75%	50	75%	50	75%	50	75%	50	75%	250	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	15	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (Ton)	12.013	13.214	9.515	14.415	7.765	15616,51	7.520	16817,78	6.865	18019,05	8.220	18019,05	39.885	Dinas Perikanan & Peternakan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	01	16	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	30252	48403,2	5.150	37512,48	5.200	39932,64	5.655	42352,8	7.755	44772,96	6.355	44772,96	30.115	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	19	Program Optimalisasi Pengelolaan Produk Perikanan	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	20849,86	22934,85	1.980	25019,83	2.015	27104,82	2.035	29189,8	2.065	31274,79	2.690	31274,79	10.785	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	18	Program Pengembangan Perbenihan Ikan	Jumlah Produksi benih ikan yang berkualitas (ekor)	3834,28	3834.28	875	3872.62	875	3911.35	950	3950.46	950	3989.97	950	3989.97	4.600	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	17	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Jumlah Produksi Garam (Ton)	29525	31380	510	32180.77	950	32476	1.050	33166.48	600	34000	600	34000	3.710	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	20	Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Cakupan Bina Kelompok	135 kelompok pemula, 8 kelompok madya (jumlah 811 Kelompok)	70	120	70	100	70	120	70	120	70	135	70	595	Dinas Perikanan & Peternakan
X	01	21	Program Pengembangan Lingkungan Pesisir	Prosentase penurunan tingkat abrasi	N/A	15%	200	15%	200	15%	200	15%	200	15%	200	15%	1.000	Dinas Perikanan & Peternakan
2	0	02	**PARIWISATA**															
X			**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga**															
X	02	01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	322	80%	354	80%	389	80%	428	80%	471	80%	1.965	Dinas Parbudpora
X	02	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	80%	80%	80	80%	88	80%	97	80%	106	80%	117	80%	488	Dinas Parbudpora

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	02	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	45	80%	49	80%	54	80%	170	80%	187	80%	505	Dinas Parbudpora
X	02	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	Dinas Parbudpora
X	02	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Dinas Parbudpora
X	02	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah Destinasi Wisata (%)	30%	40%	5.925	50%	5.025	60%	3.150	70%	6.700	80%	7.250	80%	28.050	Dinas Parbudpora
				Persentase sarana prasarana Destinasi Wisata yang dikelola dalam kondisi baik (%)	58,94%	59,85%		68,76%		73,67%		78,57%		83,48%		83,48%		Dinas Parbudpora
				Persentase peningkatan PAD Pariwisata pada tahun n (%)	110%	112%		102%		102%		102%		102%		102%		Dinas Parbudpora
				Persentase Jumlah Usaha Pariwisata yang bersertifikat usaha	0%	4%		7%		11%		14%		18%		18%		Dinas Parbudpora
				Persentase Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi	0%	0%		1%		1%		2%		2%		2%		Dinas Parbudpora
2	0	03	**PERTANIAN**															
			Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan															
X	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	80%	1.430	80%	1.383	80%	1.434	80%	1.488	80%	1.541	80%	7.276	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	03	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	N/A	80%	493	80%	2.401	80%	451	80%	421	80%	471	80%	4.237	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	N/A	80%	59	80%	60	80%	101	80%	63	80%	64	80%	347	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	N/A	CC	60	B	63	B	67	BB	70	A	74	A	334	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	N/A	75%	50	75%	50	75%	50	75%	50	75%	50	50%	250	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Padi, Jagung dan Kacang Tanah)	padi 546.310 ton , jagung 506.966 ton, kacang tanah 41.559 ton	Padi 0,3% Jagung 0,3% Kacang tanah 0,3%	24.195	Padi 0,6% Jagung 0,6% Kacang tanah 0,6%	29.110	Padi 0,9% Jagung 0,9% Kacang tanah 0,9%	33.150	Padi 1,2% Jagung 1,2% Kacang tanah 1,2%	37.290	Padi 1,5% Jagung 1,5% Kacang tanah 1,5%	41.550	Padi 1,5% Jagung 1,5% Kacang tanah 1,5%	165.295	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	17	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	persentase peningkatan produksi komoditas Tebu, Tembakau, dan Kelapa	tebu 78.712 ton, tembakau 17.288 ton, kelapa 2.292 ton	tebu 5,93%, tembakau 4,63%, kelapa 6,01%	3.430	tebu 12,02% , tembakau 9,37%, kelapa 12,73%	3.430	tebu 18,28%, tembakau 14,21%, kelapa 19,63%	3.430	tebu 24,70% , tembakau 19,16% , kelapa 26,70%	3.430	tebu 31,29% , tembakau 24,21% , kelapa 33,96%	3.430	tebu 31,29% , tembakau 24,21% , kelapa 33,96%	17.150	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
				persentase peningkatan produktivitas komoditas Tebu, Tembakau, dan Kelapa	tebu 52,55 ton/ha/th, tembakau 7,2 ton/ha/th, kelapa 0,96 ton/ha/th	tebu 2,5%, tembakau 2,5%, kelapa 2%		tebu 5%, tembakau 5%, kelapa 4%		tebu 7,5%, tembakau 7,5%, kelapa 6%		tebu 10%, tembakau 10%, kelapa 8%		tebu 12,5%, tembakau 12,5%, kelapa 10%		tebu 12,5%, tembakau 12,5%, kelapa 10%		Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	03	18	Program Peningkatan Infrastruktur dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rasio Panjang Jalan Usaha Tani terhadap Luas Kawasan Pertanian	n/a		17.575		18.410		19.040		19.670		20.300		94.995	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
				Rasio Jumlah Embung Terhadap Luas Kawasan Pertanian														Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
				Rasio Panjang Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Luas Kawasan Permukiman														Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	19	Program Peningkatan Kawasan Hortikultura	Jumlah luas kawasan holtikultura	30 ha sawo, 15 ha durian, 20 ha klengkeng, 3,3 blimbing madu	35 ha sawo, 20 ha durian, 30 ha klengkeng, 6,7 blimbing madu	475	40 ha sawo, 25 ha durian, 40 ha klengkeng, 10 blimbing madu	510	45 ha sawo, 30 ha durian, 45 ha klengkeng, 13,3 blimbing madu	545	50 ha sawo, 35 ha durian, 50 ha klengkeng, 16,7 blimbing madu	580	55 ha sawo, 40 ha durian, 55 ha klengkeng, 20 blimbing madu	625	55 ha sawo, 40 ha durian, 55 ha klengkeng, 20 blimbing madu	2.735	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	20	Program Pendukung Kawasan Agropolitan	Persentase kenaikan produksihasil pertanian pada kawasan agropolitan (%)	n/a	2,6%	150	2,6%	150	2,6%	150	2,6%	150	2,6%	150	2,6%	750	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani yang menerapkan Rekomendasi teknologi spesifik lokasi	11%	21%	2.635	28%	2.492	34%	2.707	39%	2.538	44%	2.763	44%	13.135	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
X	03	24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan jumlah populasi Ternak (%)	13260688	3.43%	6.452	2.57%	6.182	2.57%	6.601	2.57%	6.677	2.57%	6.757	15243269	32.669	Dinas Perikanan & Peternakan
X	03	25	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Prosentase kematian ternak (angka kematian/mortalitas)	0.0200	0.0175	1.000	0.0150	1.050	0.0125	1.075	0.0100	1.025	0.0075	1.025	0.0075	5.175	Dinas Perikanan & Peternakan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	03	26	Program Optimalisasi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase Populasi Ternak sapi potong	13%	15%	1.475	17%	1.375	19%	725	0,21	625	23%	725	23%	4.925	Dinas Perikanan & Peternakan
X	03	27	Program Optimalisasi Pengolahan Produk Peternakan	Jumlah Produksi Daging (Ton)	17745.478	18594.658	218	19011.013	1.750	19437.993	775	19875.9	850	20325.047	1.325	20325.047	4.918	Dinas Perikanan & Peternakan
2	0	06	**PERDAGANGAN**															
X			**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**															
X	06	15	Program Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase penumbuhan usaha dan peningkatan skala usaha (%)	23.500	5%	15.965	3%	42.840	4%	42.890	4%	6.835	5%	3.825	5%	112.355	Dinas Koperindag
				Persentase peningkatan total omzet UMKM sektor perdagangan (%)	12.690	5%		3%		4%		4%		5%		5%		Dinas Koperindag
				Persentase Prasarana Sarana Perdagangan dalam kondisi baik (%)	45%	3%		3%		3%		3%		3%		15%		Dinas Koperindag
X	06	16	Program pemantapan sistim distribusi bahan pokok dan perlindungan konsumen	Persentase rata-rata kenaikan harga 22 bahan pokok setiap bulan	< 13%	<13%	650	<13%	690	<13%	720	<13%	730	<13%	730	<13%	3.520	Dinas Koperindag
				Jumlah temuan kasus pelanggaran pelaku usaha atas pemakaian bahan berbahaya (kasus)	32%	29%		29%		29%		29%		29%		29%		Dinas Koperindag
				Jumlah temuan kasus pelanggaran pelaku usaha atas SNI (kasus)	9%	8%		29%		29%		29%		29%		29%		Dinas Koperindag

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah temuan kasus pelanggaran pelaku usaha atas tanggal kadaluarsa (kasus)	37%	34%		34%		34%		34%		34%		34%		Dinas Koperindag
				Jumlah temuan kasus pelanggaran pelaku usaha atas peredaran minuman beralkohol (kasus)	11%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		Dinas Koperindag
				Jumlah temuan kasus pelanggaran pelaku usaha atas ketepatan takaran/ukuran (kasus)	18%	17%		17%		17%		17%		17%		17%		Dinas Koperindag
2	0	07	**PERINDUSTRIAN**															
X			**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**															
X	06	15	Program Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah sektor formal	3,08%	3,28%	1.385	3,75%	1.650	3,9%	1.700	4,56%	1.700	4,87%	1.700	4,87%	8.135	Dinas Koperindag
				Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah sektor Non Formal (%)	2%	2,1%	0	2,22%		2,52%	0	2,71%		2,94%		2,94%		Dinas Koperindag
				Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Produksi menjadi pelaku industri (%)	27,78%	27,78%		29,51%		31,48%		33,16%		34,86%		34,86%		Dinas Koperindag
X	06	16	Program pengembangan Industri kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan skala usaha industri kecil menengah IKM menjadi 25-50 juta (%)	3,83%	3,97%	1.526	4,11%	1.926	4,24%	2.081	4,39%	2.171	4,54%	2.321	4,54%	10.025	Dinas Koperindag

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Peningkatan skala usaha industri kecil menengah IKM menjadi 50-200 juta (%)	3,13%	3,15%	0	3,16%		3,174%		3,18%	0	3,19%		3,19%		Dinas Koperindag
				Persentase Peningkatan skala usaha industri kecil menengah IKM menjadi 200-500 juta (%)	0,38%	0,391%		0,397%		0,409%		0,419%		0,434%		0,434%		Dinas Koperindag
			Program pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan hasil produksi dalam sentra (%)	0%	10%	560	10%	295	10%	530	10%	790	10%	600	10%	2.775	Dinas Koperindag
2	**0**	**08**	**TRANSMIGRASI**															
X			**Dinas PMPTSPTK**															
X	**08**	**15**	Program Transmigrasi Regional	Persentase Cakupan transmigrasi yang dapat ditempatkan (%)	18.92%	25%	215	30%	215	35%	235	40%	235	50%	255	50%	1.155	DPMPTSP & Tenaga Kerja
3	**0**		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
3	**0**	**01**	**PERENCANAAN**															
X			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**															
X	**01**	**01**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	684	80%	753	80%	828	80%	911	80%	1.002	80%	4.177	BAPPEDA
X	**01**	**04**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	1.408	80%	1.549	80%	1.704	80%	1.874	80%	2.061	80%	8.596	BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	20	80%	22	80%	24	80%	26	80%	29	80%	121	BAPPEDA
X	01	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	BAPPEDA
X	01	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	139	80%	153	80%	168	80%	185	80%	204	80%	849	BAPPEDA
X	01	15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD Telah menetapkan dokumen Renstra OPD tepat waktu (%)	95,56%	100%	4.085	100%	1.540	100%	1.615	100%	1.615	100%	2.515	100%	8.820	BAPPEDA
				Prosentase OPD Telah menetapkan dokumen Renja OPD tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Persentase OPD telah menetapkan dokumen RKA OPD tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase program pembangunan lingkup bidang ekonomi yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Prosentase OPD mitra lingkup bidang ekonomi telah menetapkan dokumen DPA OPD tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase program pembangunan lingkup bidang sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Prosentase OPD mitra lingkup bidang sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat telah menetapkan dokumen DPA OPD tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Persentase program pembangunan lingkup bidang fisik dan prasarana yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Prosentase OPD mitra lingkup bidang fisik dan prasarana telah menetapkan dokumen DPA OPD tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
X	01	16	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Prosentase OPD mitra lingkup bidang ekonomi telah menetapkan dokumen perencanaan OPD (Renstra dan Renja OPD) tepat waktu (%)		100%	-	100%	700	100%	700	100%	700	100%	700	100%	2.800	BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prosentase program pembangunan lingkup bidang ekonomi yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Prosentase OPD lingkup bidang Ekonomi telah menjabarkan program renja OPD kedalam dokumen DPA OPD 100% (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
X	01	17	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase OPD mitra lingkup bidang Sosial, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan dokumen perencanaan OPD (Renstra dan Renja OPD) tepat waktu (%)		100%	-	100%	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%	2.400	BAPPEDA
				Prosentase program pembangunan lingkup bidang Sosial, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
				Prosentase OPD lingkup bidang Sosial, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat telah menjabarkan program renja OPD kedalam dokumen DPA OPD 100% (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	01	18	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Prosentase OPD mitra lingkup bidang Fisik dan Prasarana telah menetapkan dokumen perencanaan OPD (Renstra dan Renja OPD) tepat waktu (%)		100%	1.000	100%	975	100%	1.650	100%	1.650	100%	1.650	100%	6.925	BAPPEDA
				Prosentase program pembangunan lingkup bidang Fisik dan Prasarana yang direncanakan dalam dokumen Renstra OPD dilaksanakan dalam dokumen Renja OPD (%)		100%		100%		100%		100%		100%				BAPPEDA
				Prosentase OPD lingkup bidang Fisik dan Prasarana telah menjabarkan program renja OPD kedalam dokumen DPA OPD 100% (%)		100%		100%		100%		100%		100%				BAPPEDA
X	01	20	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Prosentase OPD telah menjabarkan program renstra OPD kedalam renja OPD 100% (%)		100%	325	100%	375	100%	375	100%	375	100%	375	100%	1.825	BAPPEDA
				Prosentase OPD telah menjabarkan program renja OPD kedalam dokumen DPA OPD 100% (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAPPEDA
X	01	19	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan	Persentase Kinerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan tercapai sesuai rencana			175		175		175		175		175		875	BAPPEDA
3	0	02	**KEUANGAN**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X			**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**															
X	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	1.278	80%	1.406	80%	1.546	80%	1.701	80%	1.871	80%	7.801	BPPKAD
X	02	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	278	80%	305	80%	336	80%	369	80%	406	80%	1.694	BPPKAD
X	02	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	51	80%	56	80%	61	80%	68	80%	74	80%	310	BPPKAD
X	02	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	98	B	108	B	119	BB	130	A	143	A	598	BPPKAD
X	02	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	BPPKAD
X	02	15	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pendapatan Daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB	11%	11%	29.131	11%	30.588	11%	32.117	11%	33.723	11%	35.409	11%	160.968	BPPKAD
				Persentase kenaikan Pendapatan Daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Dana Perimbangan	N/A	11%		11%		11%		11%		11%		11%		BPPKAD
X	02	17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	57%	100%	1.200	100%	1.200	100%	1.200	100%	1.200	100%	1.200	100%	3.000	BPPKAD
				Persentase Penyusunan LKD yang akurat dan tepat waktu (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPPKAD
				Persentase penyerapan anggaran sesuai anggaran kas (rencana penarikan dana) (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPPKAD

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	02	16	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah pada triwulan I minimal 20% (%)	-	100%	956	100%	1.052	100%	1.158	100%	1.277	100%	1.401	100%	5.844	BPPKAD
				Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah pada triwulan II minimal 40% (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPPKAD
				Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah pada triwulan III minimal 70% (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPPKAD
				Persentase program pada tahun n dalam dokumen perencanaan dilaksanakan dalam dokumen anggaran		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPPKAD
X	02	18	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase keakuratan data neraca aset		100%	750	100%	810	100%	880	100%	940	100%	990	100%	4.370	BPPKAD
X	02	19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tingkat penyelesaian sertifikasi terhadap lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat (%)		10%	250	20%	250	30%	250	40%	250	50%	250	50%	1.250	BPPKAD
3	0	03	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
X			**Badan Kepegawaian Daerah**															
X	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	666	80%	733	80%	806	80%	886	80%	975	80%	4.066	BKD
X	03	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	122	80%	134	80%	148	80%	162	80%	179	80%	745	BKD
X	03	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	29	80%	31	80%	35	80%	38	80%	42	80%	175	BKD

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	03	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	85	B	94	B	103	BB	113	A	124	A	519	BKD
X	03	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	60	80%	66	80%	73	80%	80	80%	88	80%	368	BKD
X	03	16	Program pendidikan dan pelatihan bagi PNSD	Persentase pejabat administrasi yang telah lulus mengikuti diklat jabatan administrasi (%)	100%	100%	3.011	100%	3.612	100%	2.694	100%	2.683	100%	2.650	100%	14.650	BKD
				Persentase PNS yang telah lulus mengikuti diklat (teknis dan fungsional) (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
X	03	17	Program Pengembangan dan Pembinaan SDM Aparatur	Persentase PNS yang telah melakukan tindakan indispliner dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan (%)	97%	90%	1.031	88%	1.001	88%	1.015	88%	1.045	91%	1.065	91%	5.157	BKD
				Persentase banyaknya PNS yang memahami peraturan undang-undang kepegawaian (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
X	03	18	Program Peningkatan Sistem Remunerasi ASND	Persentase PNSD dengan kualitas knerja yang baik	N/A	80%	190	80%	70	80%	50	80%	50	80%	50	80%	410	BKD
X	03	15	Program Pelayanan Sistem Administrasi Pegawai	Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu dan sasaran	99,8	100%	1.445	100%	1.316	100%	1.576	100%	1.790	100%	2.066	100%	8.193	BKD
				Persentase penyelesaian administrasi kenaikan gaji berkala tepat waktu dan sasaran	99,79	100		100		100		100		100		100		BKD
				Persentase penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS	96%			100%		100%		100%		100%		100%		BKD

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase penyelesaian administrasi pensiun (pindah puna tugas) tepat waktu dan sasaran	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
				Persentase penyelesaian administrasi penempatan PNS dalam jabatan fungsional tepat waktu dan sasaran	103%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
				Persentase penyelesaian administrasi penempatan PNS (termasuk mutasi pindah luar daerah) tepat waktu dan sasaran	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
				Persentase penyelesaian administrasi penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	167%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
				Persentase data PNS yang valid dalam simpeg		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKD
3	**0**	**04**	**PENELITIAN & PENGEMBANGAN**															
X			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**															
X	**04**	**15**	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase kajian dan penelitian yang dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah (%)	N/A	5%	1.550	10%	1.550	15%	1.550	20%	1.550	25%	1.550	25%	7.750	BAPPEDA
X	**04**	**16**	Program Optimalisasi Inovasi Daerah	Prosentase program inovasi yang dilaksanakan	N/A	20%	500	20%	500	20%	500	20%	500	20%	500	20%	2.500	BAPPEDA
3	**0**	**05**	**SEKRETARIAT DPRD**															

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X			**Sekretariat DPRD**															
X	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	80	3.735	80	4.051	80	4.161	80	4.254	80	4.413	80	20.612	Sekretariat DPRD
X	05	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	N/A	80%	3.555	80%	1.410	80%	1.606	80%	1.695	80%	2.115	80%	10.381	Sekretariat DPRD
X	05	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	N/A	80%	182	80%	182	80%	247	80%	182	80%	182	80%	973	Sekretariat DPRD
X	05	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	60	B	60	B	60	BB	60	A	60	A	300	Sekretariat DPRD
X	05	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Derah	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	N/A	70%	23.272	70%	24.163	70%	24.528	70%	24.343	70%	24.858	70%	121.162	Sekretariat DPRD
X	05	16	Program Peningkatan Pelayanan Informasi / Kehumasan DPRD	Prosentase Informasi kegiatan DPRD dengan Media Masa	80	80%	440	80%	440	80%	440	80%	440	80%	440	80%	2.200	Sekretariat DPRD
3	0	06	**SEKRETARIAT DAERAH**															
X			**Sekretariat Daerah**															
X	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	3.643	85%	3.969	85%	4.092	90%	4.208	90%	4.328	90%	20.240	SETDA
X	06	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Layak Fungsi %	80%	80%	4.866	80%	3.497	80%	3.497	80%	3.551	80%	3.635	80%	19.045	SETDA
X	06	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	260	80%	260	80%	260	80%	260	80%	260	80%	1.300	SETDA
X	06	03	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	n/a	CC	270	B	297	B	327	BB	359	A	395	A	1.648	SETDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	06	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	SETDA
X	06	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	N/A	75%	1.100	75%	1.100	75%	1.100	75%	1.100	75%	1.100	75%	5.500	SETDA
X	06	25	Program Kehumasan, Pers, dan Protokoler	Persentase Perangkat Daerah telah menyelenggaranakan tugas kehumasan sesuai ketentuan	85%	87%	1.115	89%	1.305	91%	1.365	93%	1.445	95%	1.530	95%	6.760	SETDA
				Persentase Perangkat Daerah telah menyelenggaranakan tugas keprotokoleran sesuai ketentuan		85%		87%		89%		91%		93%		93%		SETDA
X	06	21	Program Optimalisasi Kemitraan Keagamaan dan Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan yang menjadi rumusan kebijakan dibidang agama	N/A	23	10.025	24	10.050	25	10.075	26	10.100	27	10.150	27	50.400	SETDA
				Prosentase Fasilitasi Proposal Tempat Ibadah/lembaga yang terealisasi	N/A	80%		80%		80%		90%		90%		90%		SETDA
X	06	24	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan.	Persentase OPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP		90%	100	92%	150	93%	175	94%	200	95%	225	95%	850	SETDA
X	06	18	Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase serah terima pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan tepat waktu		91%	100	92%	150	93%	175	94%	200	95%	225	95%	850	SETDA
X	06	20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase tercapainya Program Legislasi Daerah		90%	3.654	90%	3.654	90%	3.654	90%	3.654	90%	3.654	90%	18.270	SETDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase penyelesaian kasus sengketa hukum yang terjadi di lingkup pemerintahan (%)		90%		90%		90%		90%		90%		90%		SETDA
X	06	16	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016		100%	100	-		100%	100	-		100%	100	100%	300	SETDA
X	06	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Prosentase jabatan yang sudah tersedia informasi dan syarat jabatannya		100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	7.500	SETDA
X	06	19	Program Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Pelaporan kinerja hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	N/A	9,86%	150	10%	200	10%	225	10,5%	250	11%	300	11%	1.125	SETDA
X	06	22	Program Optimalisasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ekonomi yang ditetapkan menjadi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan		65%	1.500	65%	1.500	70%	1.500	85%	1.500	85%	1.500	85%	7.500	SETDA
				Persentase rumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam yang ditetapkan menjadi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan		65%		65%		70%		75%		80%		80%		SETDA
3	0	07	**PENGAWASAN**															
X			**Inspektorat**															
X	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	80%	669	80%	736	80%	809	80%	890	80%	979	80%	4.084	Inspektorat
X	07	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi (%)	80%	80%	275	80%	302	80%	332	80%	365	80%	402	80%	1.676	Inspektorat

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	07	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	24	80%	26	80%	29	80%	32	80%	35	80%	145	Inspektorat
X	07	03	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	-	CC	60	B	66	B	73	BB	80	A	88	A	366	Inspektorat
X	07	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Inspektorat
X	07	15	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat yang di tindaklakjuti	87%	87%	1.310	88%	1.349	90%	1.389	91%	1.431	92%	1.474	92%	6.952	Inspektorat
				Persentase kasus pengaduan yang ditangani;	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat
				Persentase LHP yang di terbitkan secara tepat waktu;	80%	80%		85%		87%		90%		93%		93%		Inspektorat
X	07	16	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pe - meriksa dan Aparatur Pe ngawas yang memiliki kompetensi dibidangnya	80%	80%	166	80%	171	81%	176	81%	181	82%	186	82%	879	Inspektorat
3	0	08	**PELAYANAN PERIJINAN**															
X			**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**															
X	08	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Izin yg Diterbitkan Sesuai SOP	N/A	100%	1.100	100%	1.175	100%	1.325	100%	1.375	100%	1.525	100%	6.500	DPMPTSP &Tenaga Kerja

KODE			Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		OPD Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah masyarakat yang mengakses perijinanan secara online		1000 orang		1250 orang		1500 orang		1750 orang		2000 orang		7500 orang		DPMPTSP &Tenaga Kerja
				Persentase Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengendalian izin usaha	N/A	60%		65%		70%		75%		80%		80%		DPMPTSP &Tenaga Kerja
X			**Kecamatan**															DPMPTSP &Tenaga Kerja
X	08	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	N/A	Baik	1.050	Baik	1.155	Baik	1.271	Baik	1.398	Baik	1.537	Baik	6.410	Kecamatan
X	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	80%	3.883	80%	4.271	80%	4.698	80%	5.168	80%	5.685	80%	23.704	Kecamatan
X	08	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	N/A	80%	1.225	80%	1347.522	80%	1.482	80%	1.631	80%	1793.551782	80%	7.479	Kecamatan
X	08	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	80%	554	80%	610	80%	671	80%	738	80%	812	80%	3.385	Kecamatan
X	08	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai LAKIP OPD	N/A	CC	800	B	880	B	968	BB	1.065	A	1.171	A	4.884	Kecamatan
X	08	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur OPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	N/A	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Kecamatan

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapain visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumusan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Perumusan Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut harus digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperimbangkan kriteria sebagai berikut :

a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
b. *Well Defined,* yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. *Measurable,* yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
d. *Approriate,* yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
e. *Reliable,* yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
f. *Verifiable,* yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator.
g. *Cost-effective,* kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria : SMART-C (*spesific, measurable, achieable, relevant, time bond dan continousty improve*). Tingkat validitas

indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator :

a. *Exact* : ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
b. *Proxy* : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
c. *Activity* : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Indikator kinerja dipilih seyogyanya merupakan indikator kinerja *exact*, karena indikator ini memiliki gap mendekati nol atau sama sekali tidak ada gap dalam menjelaskan. Apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkannya, dimungkinkan digunakan indikator p*roxy* atau *activity* dengan catatan bahwa terus diupayakan untuk mendapatkan (yang mengarah) pada indikator *exact*.

Validitas indikator kinerja dapat dibedakan berdasarkan gap antar indikator kinerja dan sasaran strategis. Indikatir kinerja dan upaya-upaya untuk mencapainya juga mempertimbangkan tingkat kendali (degree of contollability) pemerintahan daerah atas apa yang ditargetkan dari kinerja tersebut. Suatu tingkat kendali menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam menontrol/mengelola pencapain target indikator kinerja :

a. High : Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh unit / individu yang bersangkutan
b. Moderate : Pencapaian target juga dipengaruhi unit / individu lain
c. Low : pencapaian target sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit / individu lain

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tuban dibagi menjadi dua kelompok yakni Indikator Kinerja Daerah yang mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja bidang sosial dan ekonomi masyarakat, serta Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-masing indikator kinerja selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Indeks Toleransi Umat Beragama	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
2	Nilai AKIP	C	CC	B	B	BB	A	A
3	Opini BPK atas LKD	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,00	67,20	67,40	67,60	67,80	67,80
6	Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Kawasan Perumahan dan Permukiman (%)	N/A	43,98	49,49	53,77	58,46	61,54	61,54
7	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional	5,10	5,34	5,46	5,56	5,72	6,00	6,00
8	Angka PDRB per kapita	41.810,67	50.590,91	55.650,00	61.215,00	67.336,50	74.070,15	74.070,15
9	Tingkat pengangguran terbuka	3,03	2,73	2,63	2,53	2,53	2,43	2,43
10	Indeks Gini Rasio	0,29	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
11	Indeks Ketimpangan Regional	0,835	0,835	0,833	0,831	0,829	0,827	0,827
12	Indeks Pembangunan Manusia	65,52	66,31	67,16	67,22	67,28	67,34	67,34
13	Angka Kemiskinan	17,08	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5	12,5

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 9.2 Indikator Kinerja Utama Pendukung Indikator Kinerja Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**							
1.1.01	**Urusan Pendidikan :**							
1	Cakupan akses terhadap fasilitas pendidikan dasar	70,82	77,00	82,50	88,33	94,17	100,00	100,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA/PAUD/Penitipan Anak		96,10	96,15	96,20	96,25	96,30	96,30
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		110,1	110,5	110,8	111,5	112,3	112,3
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		96,81	97,85	98,10	98,50	98,90	98,90
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		98,8	98,9	99,0	99,5	99,8	99,8
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		76,7	78,23	79,78	81,79	83,79	83,79
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 7-12 Tahun		100	100	100	100	100	100
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 13-15 Tahun		100	100	100	100	100	100
9	Angka Melanjutkan ke SD/MI		72	75	76	78	80	80
10	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs		95,6	96	96,5	97	97,5	97,5
11	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI		0	0	0	0	0	0
12	Angka Putus Sekolah (APts) SMP/MTs		0,15	0,11	0,10	0,05	0,02	0,02

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
13	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI		1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12
14	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs		1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12
15	Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100	100	100
16	Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100	100	100
17	Nilai NEM rata-rata Ujian Sekolah SD/MI		26,0	26,3	26,5	27,0	27,5	27,5
18	Nilai NEM rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs		28,8	29,0	29,3	29,5	29,7	29,7
19	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B		82,93	86,03	88,99	91,94	92,59	92,59
20	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		71,98	72,68	72,83	73,51	73,66	73,66
21	Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	74,71	81,63	87,63	93,75	100,00	100,00	100,00
22	Persentase pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu (%)	74,71	81,63	87,63	93,75	100,00	100,00	100,00
1.1.02	**Urusan Kesehatan**							
1	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Sesuai Standar (%)	2	12,7	29	49	54.5	58,2	58,2
2	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (%)	80	80	80	80	100	100	100
3	Rasio Pelayanan Kesehatan Dasar per satuan penduduk		1 : 7.706	1 : 7.441	1 :7.423	1: 7.331	1: 7.177	1: 7.177
4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		1 : 232.723	1 : 233.655	1 : 195.465	1: 168.145	1 : 168.145	1 : 168.145
5	Persentase imunisasi dasar lengkap (%)		92	92,5	93	93,5	94	94
6	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%)		10	11	12	13	14	14
7	Persentase Desa *Open Defecation Free* (%)	2,04	3,04	6,09	9,10	12,19	15,24	15,24
8	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.81

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Jumlah Kematian Ibu	12	< 17	< 16	< 16	< 15	< 14	< 14
10	Jumlah Kematian Bayi	225	< 350	< 340	< 330	< 320	< 310	< 310
1.1.03	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang (%)		71	73	75	77	79	79
2	Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang berkurang (%)		66	69	72	75	78	78
3	Persentase ketersediaan air baku/irigasi		75	80	83	85	100	100
4	Cakupan Konektivitas Wilayah	90.2	94.75	94.78	94.82	94.87	94.92	94.92
1.1.04	**Urusan Perumahan**							
1	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	85	84.27	84.39	84.51	84.63	84.74	84.74
2	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (%)	15	10	5	0	0	0	0
3	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas kawasan perkotaan	4.78	4.8	4.82	4.84	4.86	4.88	4.88
4	Rasio Panjang Jalan Lingkungan terhadap Luas Kawasan Permukiman di kawasan perkotaan							
5	Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani	46.05	27.59	21	7.88	1.32	0	0
6	Cakupan Pelayanan Drainase (%)		100	100	100	100	100	100
7	Cakupan akses air minum yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi (%)	27.49	28,15	28,54	30,81	33,87	34,71	34,71

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
8	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	69.52	70.06	70.73	70.55	71.23	71.93	71.93
9	Cakupan layanan persampahan (%)	82.86	83.07	83.88	84.70	85.53	86.37	86.37
10	Cakupan Layanan LPJU (%)		100	100	100	100	100	100
1.1.05	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
1	Angka Konflik Agama (Kasus)	3	<6	<5	<4	<3	<2	<2
2	Angka konflik Politik (Kasus)	0	<6	<5	<4	<3	<2	<2
3	Angka konflik Sosial (Kasus)	2	<6	<5	<4	<3	<2	<2
4	Persentase Desa Rawan Bencana (%)	66	64	62	60	58	56	56
5	Jumlah Pelanggaran / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kasus)	401	368	335	302	274	236	236
6	Angka Kasus Pelanggaran Perundang-undangan Daerah (Kasus)	236	200	180	160	140	120	120
7	Persentase Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten (%)	20	30	40	55	70	85	85
8	Persentase penyelesaian konflik sosial / bencana oleh masyarakat (%)		61	66	74	78	80	80
1.1.06	**Urusan Sosial**							
1	Persentase ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel pada penyelenggaraan pelayanan publik daerah (%)	-	0	10	11	12	13	13
2	Persentase PMKS yang sudah Mandiri (%)	-	25	28	31	34	37	37

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	47,77	50,4	53,08	55,7	58,4	61	61
1.2	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**							
1.2.01	**Bidang Tenaga Kerja**							
1	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)		100	100	100	100	100	100
2	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	71.99	75	77,5	80	82,5	85	85
1.2.02	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.2.03	**Urusan Pangan**							
1	Persentase Ketersediaan kebutuhan energi dan protein perkapita (%)		81	83	85	87	90	90
2	Persentase Cadangan Pangan Daerah (%)	40	50	60	70	80	100	100
3	Skor Pola Pangan Harapan (%)		88,60	90,20	91,80	93,40	95,00	95,00
4	Persentase Keamanan Pangan (%)		90	94	96	98	100	100
5	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	47.2	57.14	67.85	78.57	89.28	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	(%)							
1.2.05	**Urusan Lingkungan Hidup**							
1	Indeks Kualitas Air	60	60.2	60.4	60.6	60.8	61	61
2	Indeks Kualitas Udara	94.07	94.27	94.47	94.67	94.87	95.07	95.07
3	Indeks Tutupan Lahan	51.44	51.64	51.84	52.04	52.24	52.44	52.44
1.2.06	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase kepemilikan KTP elektronik (%)	85,74	88	90	92	94	96	96
2	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	0	5	7,5	10	12,5	15	15
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun (%)	49,36	80	82,5	85	87	88	88
5	Persentase kepemilikan akta kematian (%)	6,73	10	15	20	30	35	35
6	IKM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Persentase ketersediaan data informasi kependudukan (%)	-	100	100	100	100	100	100
1.2.07	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih (%)	21	33,65	46,85	55,75	64,00	72,00	72,00
2	Persentase Kecamatan yang berhasil membina	0	10	20	30	40	50	50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	pemerintahan desa sesuai dengan aturan (%)							
3	Tingkat Pertumbuhan BUMDes (%)	7	33	33	33	33	33	33
1.2.08	**Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**							
1	Tingkat Fertilitas Total / *Total Fertility Rate*	1,8	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,5
1.2.09	**Urusan Perhubungan**							
1	IKM pelayanan bidang perhubungan	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	0,43	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Cakupan angkutan umum per desa (%)	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76
1.2.10	**Urusan Komunikasi dan Informasi**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Persentase sub domain OPD yang ter-update secara berkala (%)	50	55	60	65	70	75	75
3	Persentase sistem informasi pengelolaan data dan layanan publik yang aktif (%)	12	25	45	50	75	100	100
4	Cakupan layanan sistem jaringan TIK untuk Sistem Informasi Desa (%)	0	2	3	8	11	15	15
1.2.11	**Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil**							
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	80.79	82.69	84.88	86.73	88.95	90	90
2	Persentase Peningkatan Usaha Mikro (%)	5,26	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.2.12	**Urusan Penanaman Modal**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (milyar rupiah)	-	9.183	9.413	9.648	9.889	10.136	10.136
2	Jumlah investor berskala nasional (investor)	28	30	35	40	45	50	50
1.2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**							
1	Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	6	10	12	15	17	20	20
2	Jumlah Atlet Daerah yang Berprestasi di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional (orang)	50	50	50	50	50	50	50
1.2.16	**Urusan Kebudayaan**							
1	Cakupan desa/kelurahan berbudaya (%)	N/A	40	50	60	70	80	80
1.2.17	**Urusan Perpustakaan**							
1	Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan umum (%)	30	45	60	75	90	100	100
2	Jumlah Pengunjung (Orang)	215.099	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000
3	Jumlah akses ke perpustakaan digital (Kunjungan)	-	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan perpustakaan	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1.2.18	**Urusan Kearsipan**							
1	Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku (%)	44	54	64	76	88	100	100
2	Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata (Berkas)	331.006	366.006	401.006	436.006	471.006	506.006	506.006

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.0	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
2.0.01	**Urusan Perikanan**							
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	42.264,7	48.306,29	51.927,72	55.549,15	59.170,58	62.792,01	62.792,01
2	Jumlah Produksi Peternakan (Ekor)	13.260.688	13.732.686	14.095.049	14.467.406	14.850.046	15.243.269	15.243.269
3	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	31,75	35,01	36,76	38,60	40,53	42,56	42,56
4	Tingkat Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kapita/Tahun)	2,90	3,08	3,15	3,22	3,30	3,38	3,38
2.0.02	**Urusan Pariwisata**							
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Tuban (orang)	4.772.854	4.868.311	4.965.677	5.064.991	5.166.291	5.269.616	5.269.616
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98
3	*Long Stay* / Waktu lama tinggal wisatawan (Hari)	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
2.0.03	**Urusan Pertanian**							
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.080.936	1.102.477	1.110.120	1.117.762	1.125.404	1.133.046	1.133.046
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	103.898	103.898	103.996	104.095	104.193	104.291	104.291
3	Jumlah Produksi Tanaman Hotikultura (Ton)	31.419,9	31.419,9	31.830,6	32.241,1	32.651,6	33.062,1	33.062,1
4	Pendapatan Bruto Petani (Rupiah/Kapita/Tahun)	30.070.685	30.070.685	30.935.526	31.840.134	32.775.232	33.716.411	33.716.411
5	Persentase kenaikan kelas kelompok tani (%)	15,40	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
2.0.06	**Urusan Perdagangan**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Unit Usaha Dagang (unit)		24.675	25.415	26.432	27.489	28.864	28.864
2	Jumlah Omzet UMKM sektor perdagangan (Triliun Rupiah)		13.325	13.724	14.274	14.844	15.587	15.587
3	Tingkat stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat <13 persen (%)		13%	12,5%	12,25%	12%	11,5%	11,5%
2.0.07	**Urusan Perindustrian**							
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	1,8	2.38	2.51	2.82	3.02	3.27	3.27
2	Persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya (%)	0,34	0,34	0,34	0,37	0,40	0,43	0,43
3.0	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
3.0.01	**Urusan Perencanaan**							
1	Persentase OPD dengan kualitas dokumen perencanaan yang baik (%)		60	70	80	90	100	100
2	Persentase penjabaran program RPJMD dalam dokumen RKPD (%)		80	85	90	95	95	95
3	Persentase capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% (%)		70	75	80	85	90	90
3.0.02	**Urusan Keuangan**							
1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)		0,13	4,93	4,78	4,70	4,95	4,95

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah (%)		15,44	15,89	16,32	16,75	17,21	17,21
3	Persentase kesesuaian program pada dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan (%)		100	100	100	100	100	100
4	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kesesuaian antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%		80	85	90	95	100	100
5	Persentase penyerapan anggaran (%)		89,62	90,43	89,38	87,98	86,82	86,82
6	Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%)		25	30	35	40	45	45
7	Persentase kesesuaian LKD terhadap SAP (%)		100	100	100	100	100	100
8	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP (%)		75	80	85	90	95	95
3.0.03	**Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**							
1	Persentase penyelesaian administrasi pegawai tepat waktu (%)		46	47	48	49	50	50
2	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian (%)		90	95	96	97	98	98
3	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi Jabatan (%)		80	85	90	92	95	95
4	Persentase ASN dengan kualitas kinerja yang baik (%)		90	95	96	97	98	98

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
3.0.04	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**							
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan (%)		0	50	55	60	65	65
3.0.05	**Urusan Sekretariat DPRD**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.0.06	**Urusan Sekretariat Daerah**							
1	Persentase jumlah kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Agama (%)		74	75	77	81	83	83
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		CC	B	B	BB	A	A
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan ekonomi (%)		70	72	74	76	78	78
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.0.07	**Urusan Pengawasan**							
1	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	91	93	94	95	96	97	97
2	Persentase penanganan kasus aduan (%)		100	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP (%)	93	93	94	95	96	97	97

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP-nya dengan kategori peringkat minimal B (%)	80	81	82	83	85	87	87
3.0.08	**Urusan Perijinan**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun yaitu Tahun 2016 – 2021. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan visi pembangunan selama lima tahun ***"Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera".***

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 (RKPD Tahun 2022) diperlukan adanya pedoman bagi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Meengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tuban Tahun 2020, maka dalam menyusun RPJMD Tahun 2022 – 2026 nanti dan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Rancangan Program Transisi (Tahun 2022) sesuai dengan jadwal dengan prioritas menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu Tahun 2021 dan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2022 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten,

berkesinambungan, sinergis baik antar penanggungjawab maupun dengan masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) setiap tahunnya;
2. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
3. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, setiap OPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Tuban, perguruan tinggi, dan masyarakat;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyakarat (*stakeholder*) di Kabupaten Tuban agar dapatnya melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
5. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan ;
6. Untuk mengantisipasi perkembangan permasalahan dan potensi yang sangat cepat di Kabupaten Tuban maka perlu dilakukan evaluasi tahunan terhadap dokumen RPJMD Tahun 2016-2021;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
    a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
    b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah periode sebelumnya
    c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya akan dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Tuban untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksa.